

Lestari Sukarniati
Firsty Ramadhona Amalia Lubis
Nurul Azizah Az Zakiyyah

Ekonomi Pembangunan

Teori dan Praktik di Negara Berkembang



Lestari Sukarniati
Firsty Ramadhona Amalia Lubis
Nurul Azizah Az Zakiyyah

EKONOMI PEMBANGUNAN

(Teori dan Tantangan di Negara Berkembang)



**Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014
Tentang Hak Cipta**

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Lestari Sukarniati
Firsty Ramadhona Amalia Lubis
Nurul Azizah Az Zakiyyah

EKONOMI PEMBANGUNAN

(Teori dan Tantangan di Negara Berkembang)



Ekonomi Pembangunan
(Teori dan Tantangan di Negara Berkembang)

Copyright © 2021 Lestari Sukarniati, Firsty Ramadhona Amalia Lubis, Nurul Azizah Az Zakiyyah

ISBN: 978-623-6071-75-5

e-ISBN: 978-623-6071-76-2

16 x 24 cm, xiv + 192 hlm

Cetakan Pertama, Juni 2021

Penulis: Lestari Sukarniati, Firsty Ramadhona Amalia Lubis, Nurul Azizah Az
Zakiyyah

Editor: Budi Ashari

Layout: Indah Nur Amanah

Desain Cover: Hafidz Irfana

Diterbitkan oleh:

UAD PRESS

(Anggota IKAPI dan APPTI)

Alamat Penerbit:

Kampus II Universitas Ahmad Dahlan

Jl. Pramuka No.42, Pandeyan, Kec. Umbulharjo,

Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55161

E-mail: uadpress@uad.ac.id

HP/WA: 088239499820

All right reserved. Semua hak cipta © dilindungi undang-undang. Tidak diperkenankan memproduksi ulang, atau mengubah dalam bentuk apa pun melalui cara elektronik, mekanis, fotocopy, atau rekaman sebagian atau seluruh buku ini tanpa izin tertulis dari pemilik hak cipta.

PRAKATA

Puji syukur kepada Allah *Subhanahu Wata'ala*, atas berkah dan karunia-Nya penulisan buku ini dapat terselesaikan dengan baik.

Buku *Ekonomi Pembangunan: Teori dan Praktik di Negara Berkembang* ini merupakan sedikit sumbangsih yang dapat penulis berikan untuk dapat menambah ketersediaan khazanah buku ajar ekonomi pembangunan. Kebutuhan adanya buku ajar ekonomi pembangunan, mendorong penulis menyusun buku ini. Materi dalam buku ajar ini, terdiri dari teori-teori terkait pembangunan ekonomi dan berbagai masalah yang mungkin dihadapi negara berkembang. Oleh karena itu, harapannya mampu mengakomodir semua materi yang dibutuhkan mahasiswa program studi strata satu dan akademisi yang membutuhkan untuk proses pengajaran. Buku ini dilengkapi dengan bahan diskusi yang dapat digunakan untuk lebih meningkatkan keaktifan dan pemahaman mahasiswa.

Semoga buku ini dapat bermanfaat dan penulis mengharapkan masukan dan kritik yang sifatnya membangun demi penyempurnaan buku ini pada edisi selanjutnya.

Yogyakarta, 23 Juni 2021

Lestari Sukarniati

Firsty Ramadhona Amalia Lubis

Nurul Azizah Az Zakiyyah

DAFTAR ISI

Prakata	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	xi
Daftar Gambar	xiii
Bab I : Pendahuluan	1
A. Praktik Pelaksanaan Pembangunan	6
B. Pertumbuhan Ekonomi vs Pembangunan Ekonomi	8
C. Munculnya Kebutuhan Pembangunan Ekonomi	10
D. Sifat-Sifat Umum Negara Sedang Berkembang	11
E. Manfaat Pembangunan Ekonomi	12
F. Kerugian-Kerugian Pembangunan Ekonomi	13
G. Paradigma Pembangunan	14
H. Hambatan Pembangunan	16
I. Dampak Kekuatan Internasional	18
Bab II : Teori-Teori Pembangunan	21
A. Aliran Historis	22
B. Aliran Klasik	26
C. Neo Klasik (Sollow-Swan)	39
D. Teori Ketergantungan Schumpeter	43
E. Keynesian (Harrod–Domar)	48
F. Teori Pertumbuhan Endogen	52
Bab III : Komponen-Komponen Pembangunan Ekonomi	61
A. Akumulasi Modal	61
B. Penduduk dan Tenaga Kerja	65
C. Teknologi Dan Fungsi Wiraswasta	67

Bab IV : Indikator-Indikator Pembangunan	71
A. Sekilas Indikator Pembangunan	71
B. Klasifikasi Indikator Pembangunan	72
Bab V : Syarat-Syarat Pembangunan Ekonomi.....	89
A. Penyerapan Kapital.....	93
B. Stabilitas dan nilai-nilai serta lembaga-lembaga yang ada.....	94
Bab VI : Masalah Masalah Pembangunan Ekonomi.....	97
A. Sekilas Masalah Pembangunan Ekonomi.....	.97
B. Masalah-Masalah Pembangunan Ekonomi97
Bab VII : Kebijakan Pembangunan Ekonomi.....	117
A. Tujuan Kebijakan Pembangunan	117
B. Kebijakan Pembangunan Ekonomi.....	118
C. Kebijakan Pembangunan Ekonomi di Indonesia	133
Bab VIII : Konsep Perencanaan Pembangunan Ekonomi.....	141
A. Perencanaan Ekonomi	141
B. Perencanaan Dengan Komando	142
C. Perencanaan Dengan Rangsangan/Partisipatif	142
D. Unsur Dan Fungsi Perencanaan	143
E. Sumber Daya Perencanaan	145
F. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional di Indonesia.....	146
G. Komponen Perencanaan Strategi	148
H. Model-Model Perencanaan.....	149
Bab IX : Dimensi Pembangunan Berkelanjutan.....	153
A. Pembangunan Berkelanjutan.....	153
B. Millenium Development Goals (MDGs).....	155
C. Sustainable Development Goals	158

Daftar Pustaka	187
Biografi Penulis	191

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Negara Berdasarkan Pendapatan Per kapita	2
Tabel 2.1 Tinggal Landas dan Sektor Pemimpin Beberapa Negara Menurut Rostow.....	26
Tabel 2.2 Pokok-pokok Pemikiran Para Tokoh Ekonomi	54
Tabel 4.2 Pendapatan Per kapita di 10 Negara Berkembang Tahun 2019.....	74
Tabel 4.3 10 Negara Dengan Pendapatan Per kapita Tertinggi Tahun 2019.....	75
Tabel 4.4 Daftar Indeks Pembangunan Manusia Indonesia Tahun 2017-2019	86
Tabel 4.5 Rangkaing Happiness Index 5 Negara ASEAN.....	87
Tabel 6.6 10 Negara Dengan Tingkat Korupsi Tertinggi dan Terendah 2019	112
Tabel 7.7 Capaian Sasaran Pertumbuhan Ekonomi Wilayah.....	135
Tabel 7.8 Capaian Sasaran Kemiskinan Wilayah	136
Tabel 9.9 Indikator MDGs	157
Tabel 9.10 Indikator SDGs (<i>Sustainable Development Goals</i>)	161

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Distribusi Negara Berdasarkan Rata-rata Tingkat Pendapatan.....	3
Gambar 1.2 Lingkaran Setan Kemiskinan Versi Nurkse	17
Gambar 1.3 Lingkaran Keterbelakangan.....	17
Gambar 2.4 Fungsi Produksi Neo Klasik.....	41
Gambar 2.2 Model Schumpeter	45
Gambar 2.3 Fungsi Produksi Harrod-Domar	50
Gambar 3.5 Pertambahan Penduduk dan Pertambahan Penghasilan.....	66
Gambar 3.6 Teori Penduduk Optimum.....	67
Gambar 4.7 Bagan Metode Perhitungan Indeks Pembangunan Manusia.....	83
Gambar 4.8 Klasifikasi Capaian Indeks Pembangunan Manusia.....	85
Gambar 4.9 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.....	85
Gambar 5.10 Perempuan Penerima Kredit Mikro Grameen Bank Bangladesh.....	96
Gambar 6.11 Kurva Lorenz.....	102
Gambar 6.12 Kurva Malthusian Population Trap	106
Gambar 7.13 Kurva SOC dan DPA	123
Gambar 7.14 Empat Pilar RPJMN 2020-2024	137
Gambar 8.15 Tahap-Tahap Perencanaan Menurut UU-No 25 Tahun 2005	147
Gambar 9.16 Indikator Millenium Development Goals	156
Gambar 9.17 Tujuan Global Ekonomi Berkelanjutan	159

BAB I

PENDAHULUAN

Apa yang terbayang di benak banyak orang tentang kehidupan masyarakat negara kaya? Sebagian besar orang, secara otomatis, akan membayangkan kondisi kehidupan masyarakat negara-negara yang tergabung dalam G7, yaitu kehidupan masyarakat Amerika, negara-negara Eropa Barat, seperti Inggris, Jerman, Kanada, Italia, dan Perancis, atau negara di Asia, yaitu Jepang. Dalam benak mereka, di negara-negara tersebut dibayangkan sebagai kehidupan yang serba berkecukupan, aman, dan nyaman. Semua kebutuhan mudah diperoleh karena suplai selalu mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Apakah benar demikian? Apakah semua orang di negara kaya hidup berkecukupan dan makmur?

Selain negara-negara kaya yang tergabung dalam G7 yang dianggap sebagai negara makmur, kini muncul negara-negara kaya yang lain, seperti Tiongkok, Korea Selatan, dan Qatar. Pada 2017, Tiongkok pernah menjadi negara yang memiliki cadangan devisa terbesar di dunia. Hal tersebut diperolehnya dari perdagangan internasional yang dilakukannya secara masif. Kunci awal keberhasilan ekonomi Tiongkok adalah transformasi ekonomi besar-besaran yang dilakukannya di awal era Deng Xiaoping (1978-1989). Sedangkan, keberhasilan ekonomi Korea Selatan diawali dari keputusannya untuk mengubah orientasi ekonomi mereka dari perekonomian pertanian beralih ke sektor industri perdagangan. Selain perubahan orientasi ekonomi, keberhasilan Korea Selatan didukung pula oleh pertumbuhan jiwa kewirausahaan yang kuat di masyarakatnya. Sedangkan, keberhasilan Qatar menjadi salah satu negara kaya baru sebab ditemukannya cadangan minyak melimpah dan berbagai investasi yang dilakukan oleh pemerintah.

Selain ada negara kaya seperti disebutkan di atas, ada juga negara yang tergolong sebagai negara miskin. Hal tersebut ditandai oleh rendahnya tingkat pendidikan, kesehatan, dan kualitas hidup secara keseluruhan.

Sebagian dari mereka berada di Eropa Timur, beberapa di negara Asia dan ada pula di belahan Benua Afrika.

Terdapat 217 negara yang tergabung dalam *World Bank* (<https://www.worldbank.org/2020>), masing-masing memiliki kondisi yang berbeda-beda. Setiap Juli, *World Bank* melakukan *update* terhadap penggolongan kondisi ekonomi negara-negara tersebut. Update terakhir Juli 2020, penggolongan kondisi ekonomi berdasarkan pendapatan per kapita, sebagai berikut:

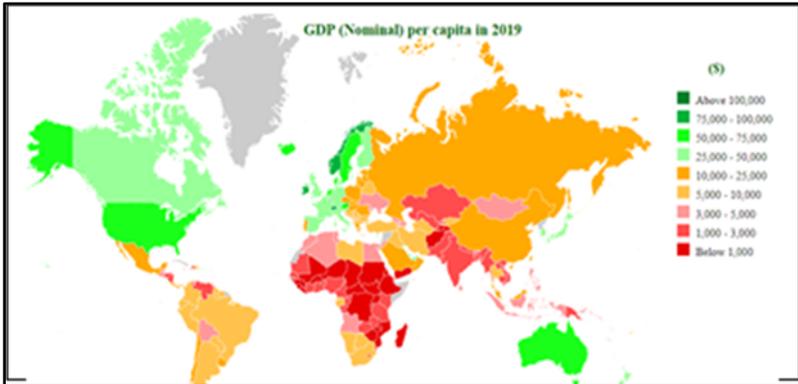
Tabel 1.1. Negara Berdasarkan Pendapatan Per kapita

Grup	1 Juli 2020 (US dollar)	1 Juli 2019
<i>Low income</i>	< 1,036	< 1.026
<i>Lower-middle income</i>	1,036 – 4,045	1,026 – 3,995
<i>Upper-middle income</i>	4,046 – 12,535	3,996-12,375
<i>High income</i>	>12,535	>12, 575

Sumber: World Bank 2020.

Jika pendapatan per kapita suatu negara tinggi, dapat diartikan kesejahteraan ekonomi masyarakatnya tinggi pula. Selain masyarakatnya sejahtera secara ekonomi, dalam peraturan ekonomi dunia negara kaya dapat memberi pengaruh yang besar terhadap kondisi global, sehingga dapat memengaruhi arah perekonomian dunia.

Perbedaan kondisi kesejahteraan berdasarkan tingkat pendapatan terlihat pada peta sebagai berikut



Gambar 1.1
Distribusi Negara Berdasarkan Rata-rata Tingkat Pendapatan
(Sumber: Wikipedia 2019).

Kenapa ada negara kaya dan ada negara miskin? Sebenarnya hampir semua negara memiliki potensi menjadi negara kaya. Ada yang karena potensi sumber daya alam, teknologi, sumber daya manusia, dan sumber daya lainnya, seperti letak geografis. Hanya saja, dengan sumber daya yang dimiliki, masih saja ada negara yang jauh dari sebutan kaya, bahkan dekat dengan kemiskinan. Pertanyaannya adalah faktor apa saja yang menyebabkan suatu negara mampu menjadi negara kaya, sedangkan negara lain tetap miskin? Faktor-faktor penyebab itu adalah:

1. Kondisi Geografis

Faktor kondisi geografis dapat menjadi penentu suatu negara menjadi kaya atau miskin. Negara-negara miskin di Afrika, seperti Kongo, Ethiopia, Nigeria, Liberia memiliki cuaca yang kering, hal tersebut menyebabkan tanahnya menjadi tandus tidak produktif untuk pertanian. Kemiskinan beberapa negara di Afrika diperparah oleh berbagai penyakit yang menghantui warganya, hewan ternak yang mereka miliki dan tanaman pangan, sehingga menyebabkan rendahnya hasil pangan. Rendahnya hasil pangan membuat rendahnya kesejahteraan warganya. Kongo merupakan negara kedua terbesar di Benua Afrika yang sebenarnya memiliki kekayaan sumber daya alam berlimpah. Namun, oleh karena sistem politiknya

yang korup menyebabkan negara tersebut tertinggal dalam bidang ekonomi dan sosial.

Beberapa negara di Afrika menjadi miskin karena kekurangan sumber air untuk lahan pertanian, kering karena jauh dari pengaliran sungai nil yang menjadi sumber air bagi kebanyakan negara-negara Afrika. Hal tersebut menyebabkan pertaniannya sangat tidak produktif dan tidak mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Kebutuhan pangan yang tidak tercukupi membuat mereka rentan terhadap penyakit karena daya tahan tubuh yang lemah. Selain faktor cuaca dan penyakit, letak geografis yang tidak menguntungkan juga menjadi penyebab kemiskinan sebagaimana yang dialami oleh negara-negara Amerika Selatan, seperti Bolivia dan Paraguay yang mobilitas ekonominya terbatas akibat semua sisinya diapit oleh negara lain.

Berbeda dengan negara-negara miskin, negara kaya rata-rata mereka memiliki lahan pertanian yang subur, banyak di antara negara-negara tersebut berada di daerah dengan empat musim. Selain karena lahan pertanian yang subur, ada juga yang menjadi kaya karena memiliki sumber daya alam yang banyak, Qatar misalnya, atau letak geografisnya yang menguntungkan untuk melakukan hubungan perdagangan, seperti Singapura.

2. Kelembagaan yang Ada

Kelembagaan yang baik adalah salah satu kunci kemajuan ekonomi suatu negara. Kebanyakan negara kaya atau negara maju memiliki lembaga-lembaga yang profesionalitas dan komitmennya tinggi. Sebaliknya, banyak negara tergolong miskin disebabkan sarat dengan praktik korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Negara-negara miskin umumnya memiliki tingkat korupsi tinggi yang ditunjukkan oleh indeks persepsi korupsi yang kecil.

Indeks persepsi korupsi yang dikeluarkan transparansi internasional didasarkan pada survei dan laporan tentang bagaimana persepsi

pebisnis dan pakar pemerintah terhadap korupsi di sektor publik. Indeks persepsi korupsi skalanya antara 0 sampai 100. Semakin mendekati 0 berarti tingkat korupsinya semakin tinggi, sedangkan indeks korupsi yang mendekati 100 berarti suatu negara semakin bersih dari korupsi. Beberapa negara yang tergolong bersih dari praktik korupsi adalah Denmark, Kanada, Finlandia, Swedia dan Swiss, sedangkan negara terkorup adalah Somalia. Kondisi yang sangat memperlihatkan bahwa negara-negara dengan tingkat korupsinya tinggi adalah negara yang termasuk negara miskin, sedangkan yang tingkat korupsinya rendah umumnya termasuk dalam golongan negara kaya.

Negara dengan tingkat korupsinya rendah menyebabkan mereka memiliki dana yang cukup untuk melaksanakan proses pembangunan. Selain itu, pembangunan juga dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sebaliknya, banyaknya praktik korupsi dapat menyebabkan tergerusnya dana yang seharusnya dapat digunakan untuk peningkatan pendidikan, kesehatan, transportasi, prasarana dan kebutuhan masyarakat yang lainnya. Dengan demikian, korupsi berdampak pada terhambatnya penciptaan kemakmuran rakyat.

Praktik korupsi dalam arti lebih luas adalah praktik nepotisme, yakni mementingkan diri dan keluarganya termasuk dalam penyelenggaraan ekonomi dan praktik kenegaraan. Kondisi ini akan membuat orang miskin menjadi terpinggirkan dan kondisi ekonomi serta penyelenggaraan negara akan didominasi oleh orang yang tidak *capable*, tetapi dekat dengan penguasa.

3. Budaya

Faktor berikutnya yang memengaruhi kesejahteraan negara adalah budaya yang dimiliki dan dianut masyarakatnya. Budaya dalam arti luas meliputi cara pandang, sikap hidup dan keyakinan yang dipakai oleh masyarakat tersebut. Negara-negara yang miskin dengan

sumber daya alam, tetapi memiliki budaya kerja keras dan bersikap profesional mendorong mereka untuk menjadi negara maju. Sebagai contoh, masyarakat Korea Selatan dan Jepang adalah masyarakat yang loyal, pekerja keras, dan bekerja dengan sungguh-sungguh. Bahkan, menurut OECD, Korea Selatan adalah negara dengan jam kerja terpanjang. Etos kerja yang kuat dapat mengantarkan suatu negara menjadi negara makmur dan maju.

A. PRAKTIK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

Jumlah penduduk dunia semakin hari semakin meningkat, sehingga kebutuhan sarana untuk pemenuhan kebutuhan juga semakin meningkat. Dalam memenuhi kebutuhan yang semakin banyak tersebut, seringkali manusia berperilaku berlebihan, sehingga menyebabkan kerusakan alam, seperti terkurasnya sumber daya alam, menumpuknya limbah yang sulit diurai oleh tanah, sehingga menyebabkan berkurangnya kesuburan, munculnya berbagai penyakit yang mematikan (terakhir adalah pandemic Covid-19), masalah kerusakan lingkungan yang mengakibatkan banjir, longsor, bahkan peningkatan suhu bumi. Semua itu berdampak pada berkurangnya suplai pangan dan berimbas pada masalah kemiskinan. Dampak yang muncul tersebut tidak hanya dirasakan oleh masyarakat di negara miskin, tetapi dirasakan oleh juga penduduk negara maju. Hanya saja tingkat dampak yang dirasakan berbeda.

Pada awal abad ke-21, telah terjadi krisis, yakni krisis keuangan Amerika pada 2008-2009. Krisis yang sering disebut sebagai “*great recession*” tersebut terjadi akibat dari kemacetan kredit kepemilikan rumah yang dilakukan masyarakat Amerika. Banyak orang Amerika yang sesungguhnya tidak layak memperoleh pinjaman untuk pembelian rumah yang mereka yakini harganya akan terus meningkat, tetapi ternyata diberikan kredit. Ketika harga rumah ternyata tidak seperti yang diprediksi oleh para pengutang dan sektor perbankan pemberi kredit, akibatnya terjadi kredit macet. Sektor perbankan di Amerika pun *collapse*. Oleh karena hal ini

ada keterkaitannya dengan sektor keuangan global, maka krisis yang melanda Amerika pun menyebar ke seluruh dunia.

Krisis keuangan berikutnya terjadi pada 2011 yang melanda beberapa negara Eropa, seperti Irlandia, Portugal, Yunani, Spanyol dan yang paling parah adalah Italia. Krisis tersebut bersumber dari penumpukan hutang yang dilakukan pemerintah. Tumpukan hutang yang dibuat pemerintah telah menimbulkan ketidakmampuan untuk membayar. Akibat dari semakin intensifnya korelasi ekonomi antarnegara, ketidakmampuan bayar tersebut telah merembet menjadi krisis keuangan global (Ananta dan Aris, 2012).

Pada tahun sebelumnya, 1997, telah pula terjadi krisis yang melanda negara-negara Asia. Krisis tersebut telah menyebabkan kebangkrutan beberapa perusahaan dan pengangguran di mana-mana. Namun demikian, krisis yang melanda negara-negara Asia, seperti Malaysia, Thailand, Singapura, dan Korea Selatan telah menemukan jalan keluarnya. Hanya krisis di Indonesia yang berkembang menjadi krisis ekonomi, bahkan krisis politik yang berakhir pada kejatuhan pemerintahan saat itu.

Dalam hal krisis di Asia, di mana kawasan tersebut dinamika kapitalisme dan demokrasinya didasarkan pada mazhab komunalitas, ternyata perekonomiannya lebih tahan terhadap guncangan dibandingkan negara-negara Eropa yang dibangun atas dasar sikap individualisme dan memiliki tingkat kelenturan yang lebih rendah dari masyarakat kawasan Asia. Ketika orang-orang Asia terancam masalah pengangguran secara spontan mereka menggelar dagangan di kaki lima untuk mempertahankan hidup. Hal itu yang tak terlihat di banyak negara Eropa yang di antaranya telah menerapkan sistem jaminan sosial (pemerintah membayar sebagian besar biaya kesehatan, transportasi, pendidikan, dan pensiun). Adanya sistem jaminan sosial yang telah mapan membuat rakyat sulit diajak berhemat dan lebih produktif. Akibatnya, defisit anggaran pemerintah lebih sulit ditutup. Dampaknya, krisis menjadi sangat sulit untuk diatasi.

Selama ini, paradigma pembangunan yang dianut oleh banyak negara berorientasi pada pertumbuhan ekonomi. Jika semakin tahun, semakin

banyak barang dan jasa yang dapat dihasilkan dan pendapatan nasional semakin meningkat, dianggap perekonomian itu semakin membaik. Banyak negara yang lupa bahwa apa yang mereka lakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi telah menimbulkan berbagai akses, seperti kesenjangan ekonomi, eksploitasi kaum kapitalis terhadap pekerja, kerusakan lingkungan, dan pengurusan sehingga menipisnya kekayaan alam. Kondisi tersebut, semakin hari semakin parah. Pada pelaksanaan pembangunan yang dilakukan dengan menggunakan paradigma ini, keserakahan manusia seolah-olah memperoleh justifikasi. Oleh sebab itu, sebelum manusia lebih parah lagi merusak bumi, maka perlu ada perubahan paradigma pembangunan. Awalnya, hanya sekedar mengejar pertumbuhan ekonomi menjadi pembangunan yang bersifat lebih humanis, lebih berorientasi pada lingkungan, lebih menjaga keseimbangan dan pembangunan yang dilaksanakan dengan meminimalisir unsur spekulasi.

B. PERTUMBUHAN EKONOMI VS PEMBANGUNAN EKONOMI

Istilah pertumbuhan ekonomi semakin populer perang dunia II usai. Istilah pertumbuhan ekonomi seringkali disamakan dengan pembangunan ekonomi, walaupun sebenarnya makna pembangunan berbeda dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu aspek dari pembangunan. Pertumbuhan hanya mencatat peningkatan produksi barang dan jasa secara nasional, sedangkan pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan perubahan kelembagaan ke arah yang positif. Myrdal (1968) dalam Mudrajad (2000), mengartikan pembangunan sebagai pergerakan ke atas dari seluruh sistem sosial. Definisi lain lebih menekankan bahwa pembangunan adalah pertumbuhan dengan perubahan *growth with change*, terutama perubahan nilai-nilai kelembagaan. Kondisi ini dilandasi argumen tentang adanya dimensi kualitatif yang jauh lebih penting dibanding dengan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pembangunan tidak lagi terlalu mengedepankan peningkatan pendapatan nasional, tetapi perhatiannya lebih terpusat pa-

da kualitas proses pembangunan itu sendiri. Seperti dikemukakan Meier (1989: h. 6), yang dikutip oleh Mudrajat, bahwa pembangunan terjadi jika terdapat peningkatan pendapatan per kapita dalam jangka waktu yang lama, tidak terjadi peningkatan kemiskinan absolut, dan tidak terjadi peningkatan kesenjangan ekonomi.

Menurut Dudley Seers (1973), ada tiga sasaran pembangunan yang harus memperoleh perhatian. Sasaran tersebut menyangkut tiga pertanyaan:

1. Apa yang terjadi dengan kemiskinan?
2. Apa yang terjadi dengan pengangguran?
3. Apa yang terjadi dengan ketidak merataan?

Pembangunan yang dilaksanakan suatu negara seharusnya dapat mengurangi kemiskinan yang ada di masyarakat negara tersebut. Selain itu, juga mengurangi pengangguran dan mengurangi kesenjangan ekonomi/ketidakmerataan ekonomi di antara anggota masyarakatnya. Menurut Todaro (2013:22-23), ada beberapa aspek yang sangat perlu diperhatikan ketika suatu negara melaksanakan pembangunan:

1. *Sustenance: The ability to meet basic needs (food, shelter, health, protection).*
2. *Self esteem: To be a person.*
3. *Freedom from servitude: To be able to choose.*

Suatu negara dikatakan telah melakukan pembangunan, jika negara tersebut telah mampu menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakatnya, seperti sandang, pangan, dan papan. Selain itu, negara juga mampu meningkatkan harga diri penduduknya, antara lain dengan meningkatkan pendidikan, keterampilan, dan kepandaian. Negara juga dapat membuat masyarakatnya terbebas dari tekanan, bebas memilih berbagai hal yang berkaitan dengan kehidupannya, seperti bebas memilih pendidikan, pekerjaan, melakukan pilihan politik, dan memilih keyakinan.

C. MUNCULNYA KEBUTUHAN PEMBANGUNAN EKONOMI

Munculnya kebutuhan pembangunan ekonomi sangat dirasakan, terutama setelah terjadinya perang dunia II. Hal yang mendorong timbulnya kebutuhan tersebut yakni munculnya negara-negara baru yang ingin membangun perekonomiannya. Adanya kebutuhan dari negara-negara maju untuk memperluas perdagangan internasional, memperoleh dukungan politik, membantu dengan dasar sikap kemanusiaan, dan adanya negara yang lamban dalam meningkatkan pendapatan nasionalnya. Negara yang lamban dalam peningkatan ekonomi menyebabkan mereka hidup dalam kondisi hanya sekedar mengimbangi pertumbuhan penduduk saja. Akibatnya, dampak yang muncul yakni terjadi kesenjangan antara negara kaya dan negara miskin yang tidak saja hanya menjadi masalah di negara-negara miskin sendiri, tetapi juga menjadi masalah bagi negara-negara maju. Adanya ketimpangan tersebut telah menyebabkan terjadinya migrasi dari negara miskin ke negara kaya, seperti dari Filipina, India, Somalia dan negara-negara lain ke Australia dan negara-negara yang kaya. Akibat dari adanya migrasi ini telah menimbulkan berbagai masalah sosial dan ekonomi.

Selain alasan-alasan di atas, kini pembangunan ekonomi dibutuhkan karena munculnya berbagai masalah, seperti adanya krisis keuangan akibat meningkatnya *FIRE economic*, yakni perekonomian yang didominasi oleh sektor *Finance*, *Insurance*, dan *Real-estate* yang bersifat spekulatif (Ananta dan Aris, 2012). Oleh sebab itu, proses pembangunan harus memiliki arah yang lebih dari sekedar menciptakan pertumbuhan ekonomi. Arah pembangunan masa kini haruslah *pertama*, mampu mengarahkan keserakahan manusia dari memperoleh kekayaan tanpa memproduksi kepada perekonomian produksi. *Kedua*, pembangunan ekonomi harus mengarah pada *people centred development* yang memberikan perhatian pada pemenuhan kesehatan penduduk, peningkatan kependidikan, adanya jaminan untuk mobilitas penduduk dan masyarakat yang terbebas dari rasa takut (Ananta dan Aris 2012). *Ketiga*, pembangunan ekonomi harus ber-

orientasi pada lingkungan, sehingga perlu memperhatikan dampak aktivitas ekonomi terhadap kualitas lingkungan, keberlanjutan keberadaan natural *resources* deposit, sehingga menghindarkan dari kegiatan yang *over exploitation*. Keempat, pembangunan harus mampu menciptakan *good governance*, yakni pemerintah yang mampu menciptakan rasa keadilan di masyarakat, mampu mencukupi kebutuhan masyarakat untuk transportasi dan fasilitas publik serta pemerintahan yang bebas korupsi (Ananta dan Aris, 2012).

D. SIFAT-SIFAT UMUM NEGARA SEDANG BERKEMBANG

Berdasarkan kondisi perkembangannya di dunia ini, negara dapat dibedakan menjadi negara tidak berkembang, negara sedang berkembang, negara maju, dan negara gagal. Negara tidak berkembang adalah negara yang stagnan, tidak mengalami kemajuan apa pun. Hal itu dapat disebabkan karena sama sekali tidak memiliki sumber daya alam, sehingga tidak ada kegiatan ekonomi yang dapat dilakukan. Contoh, negara yang stagnan adalah Ethiopia, Gambia, Kongo, dan Liberia. Pada umumnya, negara tersebut memiliki tanah yang kurang subur dan karena adanya konflik.

Negara berkembang adalah negara yang memiliki beberapa sifat, sebagai berikut:

1. *Low level of living (low income, inequality, poor health and inadequate education)* -- taraf hidup rendah yang ditandai oleh pendapatan yang rendah, ketidakmerataan, tingkat kesehatan yang buruk dan pendidikan yang tidak cukup).
2. *Low level of productivity* -- produktivitas yang rendah.
3. *High rate of population growth and dependency burdens* -- tingkat pertumbuhan penduduk dan angka ketergantungan yang tinggi.
4. *Substantial dependence on agricultural production and primary-product exports* -- sangat tergantung pada produksi dan ekspor barang primer.

5. *Prevalence of imperfect markets and limited information* --kondisi pasar yang tidak sempurna dan informasi pasar yang terbatas.
6. *Dominance, dependence and vulnerability in international relations* – sangat dipengaruhi kondisi pasar internasional (Todaro, 2013:47).

Meier punya pendapat yang hampir sama. Menurutnya, sifat-sifat negara berkembang adalah sebagai berikut:

1. Produsen barang-barang primer.
2. Mengalami masalah tekanan penduduk seperti adanya pengangguran di desa, kenaikan jumlah penduduk yang pesat, tingkat kelahiran tinggi yang menurunkan tingkat konsumsi rata-rata.
3. Sumber alam belum banyak diolah karena kekurangan kapital.
4. Penduduk masih terbelakang.
5. Kekurangan kapital karena adanya *vicious circle*.
6. Orientasi ke perdagangan luar negeri komoditas ekspornya barang primer, hal ini menunjukkan ketidakmampuan dalam mengolah barang tersebut agar menjadi lebih berguna.

Negara gagal adalah negara yang mengalami kemunduran baik dari sisi sosial maupun ekonomi, seperti Somalia.

E. MANFAAT PEMBANGUNAN EKONOMI

Kondisi masyarakat yang belum makmur mendorong negara melakukan berbagai upaya pembangunan ekonomi. Selain kemakmuran, beberapa manfaat lain yang dapat diperoleh dari pelaksanaan pembangunan ekonomi adalah:

1. *Output* dan kekayaan akan bertambah.
2. Kesempatan mengadakan berbagai pilihan menjadi lebih luas.
3. Kemampuan penguasaan alam lebih besar, dengan teknologi keterbatasan alam dapat ditembus, produktivitas tanah ditingkatkan, dan sumber daya alam dapat dimanfaatkan.

4. Memberikan kesenangan yang lebih luas karena dengan adanya teknologi kehidupan manusia dapat menjadi lebih nyaman, waktu untuk melakukan kerja keras dengan produktivitas rendah dapat dikurangi, sehingga sisa waktunya dapat dialokasikan untuk menikmati kesenangan.

Pembangunan juga memungkinkan orang memikirkan lebih banyak sifat-sifat kemanusiaan karena sarana yang dimiliki tersedia untuk melakukan kegiatan kemanusiaan tersebut. Kesempatan seseorang menolong orang lain menjadi lebih besar ketika kebutuhan dirinya sudah terpenuhi. Adanya upaya menolong orang lain dapat pula menjadikan kesenjangan pendapatan antarpenduduk dan antargolongan dapat direduksi.

F. KERUGIAN-KERUGIAN PEMBANGUNAN EKONOMI

Pembangunan sering dimaknai sebagai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, sehingga memunculkan beberapa masalah, seperti pengangguran, kemiskinan di pedesaan, distribusi pendapatan yang tidak merata, ketidakseimbangan struktural, dan pertumbuhan ekonomi hanya menghasilkan peningkatan pada produksi barang dan jasa. Selain itu, munculnya sikap mementingkan diri sendiri karena semakin dipakainya prinsip *benefit and cost*, hancurnya sistem sosial yang ada, seperti hilangnya lumbung padi, sikap gotong royong, rusaknya ekosistem karena industrialisasi, pertanian intensif yang menyebabkan polusi air karena berlimpahnya bahan kimia, erosi lahan, habisnya air tanah, perusakan keanekaragaman genetika, polusi bahan pangan, dan kerugian kesehatan umum yang kemudian memunculkan penyakit. Adanya dampak negatif dari pembangunan yang mengedepankan pertumbuhan, tetapi merusak lingkungan tersebut, kemudian muncul konsep *eco development* yang intinya bahwa masyarakat dan ekosistem harus berkembang bersama dalam meningkatkan produktivitas dan pemenuhan kebutuhan yang lebih tinggi. Namun, strategi pembangunan ini harus berkelanjutan baik dari sisi ekologi maupun sosial.

G. PARADIGMA PEMBANGUNAN

Ada beberapa paradigma/pendekatan mengenai pembangunan, paradigma-paradigma tersebut yakni:

1. Paradigma Tradisional

Paradigma ini mengedepankan peningkatan pendapatan per kapita atau dikenal sebagai strategi pertumbuhan ekonomi. Adanya pertumbuhan ekonomi masalah pengangguran, kemiskinan, ketimpangan distribusi dapat diatasi dengan *trickle down effect*. Indikator keberhasilan semata-mata hanya dilihat dari *Gross National Product* (GNP) per kapita riil.

2. Paradigma Baru

Muncul karena kegagalan pembangunan dengan paradigma lama yang hanya mengedepankan pertumbuhan ekonomi.

3. Strategi Pertumbuhan dengan Distribusi

Strategi ini menghendaki bahwa pembangunan tidak saja hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga memperhatikan masalah distribusi pendapatan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan pembangunan juga harus diperhatikan tentang kesempatan kerja, perhatian terhadap petani kecil, dan pengusaha ekonomi lemah. Hal ini dapat diartikan bahwa syarat utamanya adalah berorientasi pada sumber daya manusia atau ada yang memberi istilah sebagai orientasi populisme.

4. Strategi Kebutuhan Pokok

Strategi ini memandang bahwa dasar utama dari strategi pembangunan yang dilakukan adalah terpenuhinya kebutuhan pokok semua golongan, seperti sandang, pangan dan papan. Menurut Todaro (2003: 21), nilai pokok pembangunan tidak hanya meliputi pemenuhan kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan, tetapi

lebih luas dari itu, yakni meliputi *sustenance, self esteem, and freedom from servitude*. *Sustenance* adalah kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok yang meliputi sandang, tempat tinggal, kesehatan dan perlindungan. Menurut Todaro, “*without sustained and continuous economic progress at the individual as well as the societal level, the realization of human potential would not be possible*”.

Peningkatan pendapatan per kapita, penurunan kemiskinan absolut, perluasan kesempatan kerja adalah syarat yang perlu, tetapi tidak cukup untuk pembangunan. *Self esteem* adalah kebutuhan untuk dihargai. Kebutuhan pokok yang lain adalah *freedom from servitude* yakni orang memiliki kebebasan untuk memilih.

5. Strategi Pembangunan Mandiri

Strategi ini menekankan pada usaha sendiri dengan sedikit atau tanpa bantuan dari luar, seperti yang dilakukan India pada masa Mahatma Gandhi, Cina di bawah Mao Zedong, dan Tanzania di bawah Julius Nyerere.

6. Strategi Pembangunan Berkelanjutan

Strategi ini muncul karena kekhawatiran adanya kerusakan dan penipisan sumber daya alam akibat aktivitas manusia. Adanya berbagai aktivitas ekonomi telah menyebabkan tertinggalnya transisi energi, memburuknya sistem biologi utama (perikanan, padang rumput, hutan, dan pertanian), ancaman perubahan iklim (polusi dan dampak rumah kaca), serta kurangnya pangan. Hal ini terjadi karena aktivitas ekonomi yang dilakukan telah mengabaikan lingkungan hidup. Oleh karena itu, para pendukung lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan menunjukkan pentingnya strategi *eco development*, yaitu peningkatan produktivitas harus dibarengi dengan pemeliharaan ekologi dan sosial.

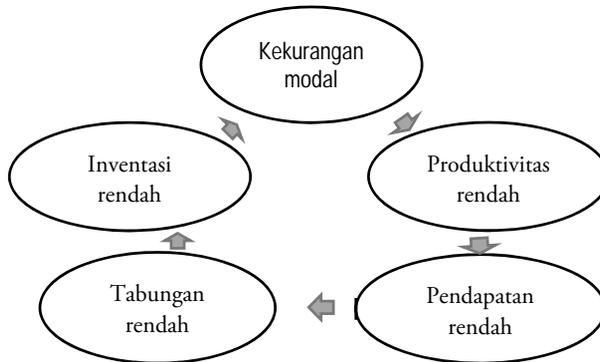
7. Strategi Berdimensi Etnik

Strategi ini memperhatikan adanya distribusi pembangunan antar-etnis yang ada supaya tidak terjadi konflik.

H. HAMBATAN PEMBANGUNAN

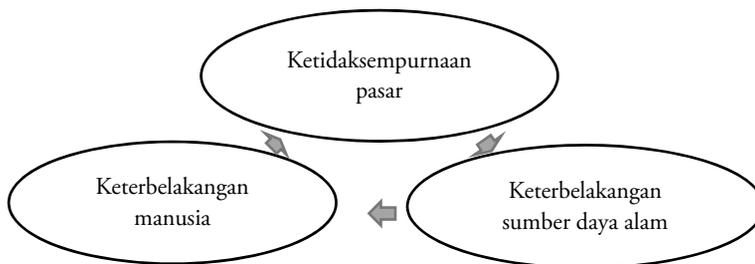
Ciri-ciri yang dimiliki negara sedang berkembang tersebut sekaligus merupakan penghambat pembangunan ekonomi. Selain itu juga memiliki penghambat yang lain, yakni berupa lingkaran setan kemiskinan, yaitu suatu kekuatan yang saling berinteraksi, sehingga mengakibatkan negara miskin tetap berada dalam keadaan miskin. Lingkaran kemiskinan tersebut bersumber dari adanya ketidaksempurnaan pasar. Ketidaksempurnaan pasar mengakibatkan kekurangan modal. Kurangnya modal mengakibatkan produktivitas rendah dan selanjutnya mengakibatkan pendapatan rendah. Rendahnya pendapatan membuat akumulasi tabungan yang menjadi sumber dana investasi juga rendah, dan investasi rendah disebabkan oleh kurangnya modal. Adanya lingkaran setan menjadi tantangan bagi pemerintah yang melaksanakan proses pembangunan untuk memutus rantai tersebut dengan menggunakan kebijakan yang disesuaikan dengan karakteristik masyarakat tersebut.

Bentuk interaksi dari kekuatan-kekuatan yang membentuk lingkaran setan tersebut adalah sebagai berikut:



Gambar 1.2
Lingkaran Setan Kemiskinan Versi Nurkse
(Sumber: Mudrajat Kuncoro [2010: 70]).

Keterbelakangan berikutnya menyangkut keterbelakangan sumber daya manusia dan sumber daya alam sebagai berikut:



Gambar 1.3
Lingkaran Keterbelakangan.

Hambatan yang lain adalah tingkat pembentukan modal yang rendah. Hal itu disebabkan karena kebanyakan tabungan dilakukan oleh kelompok berpendapatan tinggi. Sebagian pendapatan kelompok ini pun tidak untuk tujuan produktif, tetapi untuk konsumsi yang bersifat demonstratif (*demonstration effect*). Selain hambatan di atas, sebagian masyarakat Negara Sedang Berkembang (NSB) memiliki lembaga sosial dan sikap

yang tidak menunjang pembangunan ekonomi, seperti adanya unsur-unsur perlawanan sosial terhadap perubahan ekonomi, sehingga menyebabkan sulitnya program-program peningkatan ekonomi. Faktor-faktor tersebut terlihat dari adanya kelembagaan yang kurang baik. Selain itu, adanya kultur yang bersikap menolak terhadap hal-hal yang baru, dan kepercayaan yang bersifat menghambat kemajuan dan adanya sekat-sekat sosial yang sangat tajam yang dapat menyebabkan disparitas sosial dan ekonomi.

I. DAMPAK KEKUATAN INTERNASIONAL

Seperti yang telah dijelaskan, pada umumnya perekonomian NSB berorientasi ekspor, tetapi yang dilakukan adalah ekspor barang-barang primer, yaitu komoditi yang berasal dari hasil alam, seperti produk pertanian, hasil hutan, dan hasil tambang yang memiliki pasar yang tidak stabil. Ketergantungan terhadap ekspor, terutama ekspor barang primer, menyebabkan perekonomian NSB rentan terhadap pengaruh internasional dalam hal permintaan dan harga dari produk-produknya.

BAHAN DISKUSI

1. Jelaskan dengan contoh, kultur seperti apa yang pernah menjadi penghambat terlaksananya program pembangunan di suatu daerah atau suatu negara.
2. Menurut saudara, bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk memutuskan lingkaran kemiskinan? Berilah jawaban saudara dengan contoh di suatu negara!
3. Jelaskan pentingnya *eco development* dalam pembangunan ekonomi. Berikan contoh pelaksanaannya!
4. Jelaskan penerapan konsep *freedom from servitude* dalam pelaksanaan pembangunan suatu bangsa dengan menggunakan contoh!

5. Apa yang dapat dilakukan oleh suatu negara yang kaya dengan sumber daya alam agar pembangunan yang dilaksanakan dapat memberi manfaat bagi penduduknya dan pembangunan yang dilakukan bersifat *sustain*.

BAB II

TEORI-TEORI PEMBANGUNAN

Selama ini, terdapat pendapat dari banyak ahli yang menjelaskan faktor-faktor yang dapat menimbulkan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang dan bagaimana faktor-faktor tersebut saling berinteraksi. Namun, hingga saat ini, tidak ada satu teori pun yang bersifat menyeluruh, lengkap, dan menjadi satu-satunya resep baku yang digunakan semua negara dalam membangun perekonomian. Permasalahan yang dihadapi setiap negara berbeda-beda, sehingga teori yang tepat dipakai di suatu negara belum tentu tepat untuk mengatasi kondisi di negara lain.

Ada banyak ahli ekonomi yang melahirkan teori-teori besar, tetapi pandangan mereka yang berbeda-beda mengenai proses pertumbuhan perekonomian. Pandangan atau persepsi para ahli ekonomi terhadap suatu hal seringkali dipengaruhi oleh ideologi yang dianutnya. Selain itu, dapat pula dipengaruhi oleh berbagai peristiwa yang dialami semasa hidupnya, sehingga aspek yang ditonjolkan dalam teorinya diberi warna oleh kecenderungan amatan atau ideologinya.

Secara garis besar, teori pertumbuhan ekonomi dapat digolongkan menjadi dua, yakni "*mazhab historis*" yang menekankan proses pembangunan didasarkan pada proses tahapannya. Tokoh yang termasuk dalam golongan tersebut di antaranya ialah Karl Marx dan Rostow. Menurut penggolongan lain, teori pembangunan ekonomi dapat digolongkan menjadi lima golongan besar, yakni aliran klasik, Karl Marx, Schumpeter, Neo-klasik, dan Post Keynesian. Sedangkan, "*mazhab analitis*" menekankan pada teori yang dapat mengungkapkan proses pertumbuhan ekonomi secara logis dan konsisten. Pandangan mazhab ini dianggap bersifat abstrak dan kurang menekankan pada sisi empiris historisnya. Tokoh yang termasuk dalam golongan ini adalah golongan Klasik dan Neo-klasik. Secara berurutan, pandangan masing-masing golongan adalah sebagai berikut:

A. ALIRAN HISTORIS

Pada mazhab historis terdapat tiga hal yang perlu ditekankan. Pertama, lebih menekankan pendekatan yang bersifat evolusioner pada ilmu ekonomi. Kedua, pentingnya peranan pemerintah dalam perekonomian yang memiliki sifat nasionalisme yang begitu kental. Ketiga, menggunakan pendekatan induktif dalam analisisnya. Pentingnya mempelajari ekonomi dalam konsep sejarah sebab dianggap sebagai bagian dari perjalanan umat dan didukung pandangan-pandangan yang bersifat konservatif. Menurut mazhab ini, perlu ada kebijakan yang mengarah pada perbaikan kondisi masyarakat secara umum, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas dan efektivitas tenaga kerja. Mazhab historis diwakili oleh Friedrich List, Bruno Hildebrand, Karl Bucher, dan Walt Whitman Rostow.

1. FRIEDRICH LIST

List berpandangan bahwa perkembangan suatu masyarakat dapat dilihat dalam lima tahap perkembangan ekonomi yang didasarkan pada cara memproduksi suatu masyarakat. Lima tahapan perkembangan tersebut antara lain:

- a. Tahap berburu, ciri masyarakat primitif, yakni pada tahap ini masyarakat memenuhi kebutuhannya hanya dari alam.
- b. Tahap beternak, pada tahap ini sudah ada proses kegiatan beternak, tetapi masih bersifat nomaden.
- c. Tahap agraris, pada tahap ini masyarakat sudah mulai menetap dan bertani.
- d. Kombinasi antara bertani dan industri manufaktur, pada tahap ini pola industri manufaktur dan perdagangan masih terbentuk secara sederhana.
- e. Kombinasi antara bertani dan industri manufaktur dan perdagangan, pada tahap ini industri manufaktur dan perdagangan sudah maju. Pada tahap ini, biasanya, diterapkan pada negara-negara yang menganut sistem perdagangan.

2. BRUNO HILDEBRAND

Hildebrand melihat kebijakan-kebijakan ekonomi yang berpijak pada sejarah. Namun, pembahasannya tidak dilengkapi dengan kerangka analisis yang kohesif, sehingga sebagian besar berupa monografi sejarah yang bersifat deskriptif dalam menyelesaikan masalah-masalah ekonomi. Terdapat tiga tahap perkembangan ekonomi yang dikemukakan oleh Hildebrand, yaitu:

- a. Perekonomian barter.
- b. Perekonomian uang.
- c. Perekonomian kredit.

3. KARL BUCHER

Menurut Bucher, terdapat tiga tahapan dalam perkembangan ekonomi, yaitu:

- a. Perekonomian subsisten, yaitu produksi yang dilakukan untuk keperluan diri sendiri.
- b. Perekonomian kota, yaitu sektor produksi dan perdagangan sudah meluas.
- c. Perekonomian nasional, yaitu peranan perdagangan menjadi semakin penting.

4. WALT WHITMAN ROSTOW

Teori Walt Whitman Rostow pada mulanya merupakan artikel yang dimuat dalam *Economic Journal* (Maret 2006), kemudian dikembangkan lebih lanjut dalam bukunya yang berjudul *The Stages of Economic Growth* (1960). Rostow menggunakan pendekatan sejarah dalam menjelaskan proses perkembangan ekonomi. Menurutnya, ada lima tahap pertumbuhan ekonomi, sebagai berikut:

- a. Masyarakat tradisional. Struktur sosial masyarakat berjenjang, hubungan darah, dan keluarga adalah sangat penting. Kekuasaan politik di tangan bangsawan pemilik tanah yang didukung

serdadu dan pegawai negeri. Penduduk bekerja di sektor pertanian.

b. Prasyarat tinggal landas, yang ditandai oleh:

- 1) Muncul manusia-manusia baru yang mau bekerja keras.
- 2) Mereka menggalakkan tabungan dan mau mengambil risiko.
- 3) Munculnya bank dan sistem keuangan.
- 4) Investasi meningkat.
- 5) Jangkauan perdagangan yang semakin luas.

c. Tinggal landas, yang ditandai oleh:

- 1) Terdapat kenaikan laju investasi produktif.
- 2) Berkembangnya salah satu atau beberapa sektor manufaktur penting dengan laju pertumbuhan tinggi. Perkembangan tersebut tidak lepas dari empat faktor dasar, yaitu:
 - a) Adanya kenaikan permintaan efektif.
 - b) Adanya pengenalan fungsi produksi baru.
 - c) Adanya keuntungan investasi dan modal yang memadai terlebih dahulu.
 - d) Adanya transformasi sistem, yaitu adanya sektor penting yang mendorong perluasan *output* sektor lain.
- 3) Hadirnya secara cepat kerangka politik, sosial, dan organisasi yang menampung hasrat ekspansi sektor modern dan memberi daya dorong pada pertumbuhan. Syarat pentingnya adalah kemampuan perekonomian untuk menggalakkan tabungan agar pertumbuhan menjadi lebih besar dari pertambahan pendapatan, guna meningkatkan permintaan efektif dan menciptakan ekonomi eksternal melalui ekspansi sektor-sektor penting.

- d. Tahap Menuju Kedewasaan. Tahap ini adalah tahapan ketika masyarakat telah dengan efektif menerapkan teknologi modern pada seluruh sumber daya yang mereka miliki. Ada tiga perubahan penting yang terjadi pada tahapan ini, yaitu:
- 1) Sifat tenaga kerja berubah menjadi tenaga kerja yang terdidik, sehingga orang lebih senang tinggal di kota, upah nyata yang diterima para pekerja meningkat, mereka mengorganisasi diri untuk memperoleh jaminan sosial, dan ekonomi yang lebih besar.
 - 2) Watak para pengusaha berubah, dari pekerja kasar berubah menjadi manajer yang halus dan sopan.
 - 3) Masyarakat bosan pada industrialisasi dan menginginkan sesuatu yang baru menuju perubahan lebih jauh.
- e. Masa konsumsi tinggi, yang ditandai dengan beberapa hal sebagai berikut:
- 1) Terjadinya migrasi ke pinggiran kota dan peningkatan pemakaian mobil secara luas.
 - 2) Ada perubahan perhatian masyarakat dari persoalan produksi ke persoalan konsumsi.
- Terdapat tiga kekuatan yang menjadi pendorong perubahan tersebut, yaitu:
- 1) Adanya kebijakan nasional untuk meningkatkan kekuasaan dan pengaruh ke dunia internasional.
 - 2) Adanya keinginan memiliki satu negara kesejahteraan dengan pemerataan pendapatan melalui pajak progresif, peningkatan jaminan sosial, dan fasilitas hiburan untuk pekerja.
 - 3) Adanya keputusan untuk membangun pusat perdagangan dan sektor penting.

Teori Rostow juga tak lepas dari kritik sebab ada pendapat yang menyatakan bahwa masyarakat tradisional tidak perlu bagi perkembangan beberapa bangsa, seperti AS dan Australia. Mereka tidak pernah melalui masa tradisional karena mereka mewarisi prakondisi di Inggris, yaitu negara yang nyata-nyata sudah maju.

Tabel 2.1 Tinggal Landas dan Sektor Pemimpin Beberapa Negara Menurut Rostow

Negara	Tahap Tinggal Landas	Sektor Pemimpin
Inggris	1783-1802	Industri kecil
Perancis	1830-1860	Jaringan jalan kereta api
Belgia	1833-1860	-
Amerika Serikat	1843-1860	Jaringan jalan kereta api
Jerman	1850-1873	Jaringan jalan kereta api
Swedia	1868-1890	Industri kayu
Jepang	1878-1900	Industri sutra
Rusia	1890-1914	Jaringan jalan kereta api
Kanada	1896-1914	Jaringan jalan kereta api
Argentina	1935	Industri substitusi impor
Turki	1937	-
India	1952	-
<i>Cina</i>	<i>1952</i>	-

Sumber: Lincoln Arsyad (1999).

B. ALIRAN KLASIK

Aliran ini muncul pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19, yaitu pada masa revolusi industri yang merupakan awal dari perkembangan ekonomi. Menurut Kaum Klasik, pertumbuhan ekonomi terjadi karena adanya pacuan antara kemajuan teknologi dan perkembangan jumlah penduduk. Pada awalnya, kemajuan teknologi lebih cepat dari pertambahan jumlah penduduk, tetapi akhirnya yang terjadi adalah hal sebaliknya. Akhir dari pacuan yang dimenangkan oleh pertambahan jumlah penduduk tersebut dan berdampak pada stagnasi ekonomi. Tokoh-tokoh

aliran klasik tersebut antara lain Adam Smith, David Ricardo, dan Thomas Robert Malthus, yang masing-masing akan kita bahas berikut ini:

1. ADAM SMITH



Adam Smith adalah ahli Ekonomi Klasik yang paling terkemuka. Bukunya yang sangat terkenal berjudul *An Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of Nations* terbit 1776. Ia meyakini berlakunya doktrin hukum alam dalam persoalan ekonomi.

Smith menganggap setiap orang paling tahu terhadap kepentingannya sendiri. Oleh karena itu, sebaiknya, setiap orang dibebaskan mengejar kepentingan masing-masing demi keuntungan mereka sendiri. Ia merupakan penganut paham perdagangan bebas dan penganjur kebijakan pasar bebas. Pasar persaingan sempurna adalah mekanisme pencipta keseimbangan otomatis yang akan menciptakan maksi-malisasi kesejahteraan ekonomi. Menurutnya, terdapat tiga unsur pokok aktor produksi, yakni:

- a. Sumber daya alam yang tersedia.
- b. Jumlah penduduk.
- c. Stok barang modal.

Jumlah sumber daya alam merupakan batas maksimum bagi pertumbuhan perekonomian. Maksudnya, jika sumber daya alam belum digunakan sepenuhnya, maka jumlah penduduk dan stok modal yang ada memegang peranan dalam pertumbuhan *output*. Namun, pertumbuhan *output* akan berhenti, jika semua sumber daya alam telah digunakan secara penuh. Menurutnya, sumber daya manusia mempunyai peran yang pasif dalam proses pertumbuhan *output*. Besarnya upah cenderung sama dengan kebutuhan hidup minimum. Jika suatu saat tingkat upah di atas tingkat kebutuhan minimum, maka tenaga kerja akan meningkat dan persaingan dalam mencari kerja akan lebih tajam. Hal itu mendorong upah turun lagi sampai pada tingkat upah

yang sama dengan besarnya tingkat kebutuhan minimum. Hal ini akan menyebabkan berkurangnya angkatan kerja, sedangkan persaingan para kapitalis dalam memperebutkan pekerja akan cenderung meningkatkan upah.

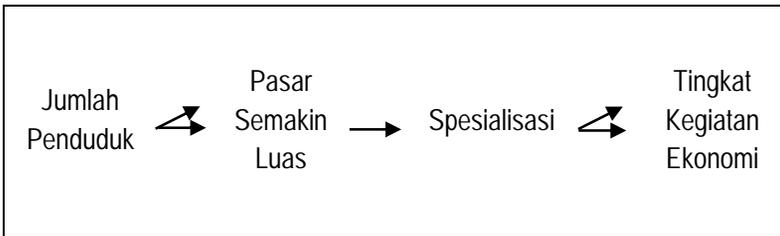
Pemupukan modal adalah syarat mutlak pembangunan ekonomi. Stok modal merupakan unsur produksi yang secara aktif menentukan tingkat *output*. Dengan kata lain, jumlah dan pertumbuhan *output* tergantung pada pertumbuhan stok modal. Pemupukan modal harus dilakukan sebelum pembagian kerja dengan cara menyisihkan pendapatan/menabung. Hampir seluruh tabungan diperoleh dari penanaman modal atau penyewaan tanah, sehingga hanya kaum kapitalis dan tuan tanah yang mampu menabung, sedangkan kelompok pekerja tidak mampu menabung.

Titik awal teori pertumbuhan ekonomi adalah spesialisasi. Dampak yang terjadi dari adanya spesialisasi adalah:

- a. Peningkatan keterampilan pekerja.
- b. Penghematan waktu dalam memproduksi barang.
- c. Penemuan mesin yang sangat menghemat tenaga. Penemuan mesin sangat erat kaitannya dengan pemupukan modal. Teknologi baru akan melahirkan pembagian kerja dan perluasan pasar.

Smith juga meyakini bahwa dalam kondisi stasioner, tingkat upah akan jatuh sampai ke tingkat yang hanya cukup untuk hidup. Sedangkan, dalam periode pemupukan modal yang cepat, tingkat upah naik melebihi tingkat kebutuhan hidup tersebut. Menurutnya, yang merupakan agen pertumbuhan ekonomi adalah para petani, produsen, dan para pengusaha.

Proses pertumbuhan bersifat kumulatif. Jika timbul kemakmuran akibat kemajuan di bidang pertanian, industri manufaktur, dan perniagaan, maka kemakmuran itu akan mendorong pemupukan modal, kemajuan teknik, peningkatan jumlah penduduk, perluasan pasar, pembagian kerja, dan peningkatan keuntungan secara terus menerus.



Menurut Smith, jika pembangunan sudah terjadi, maka proses tersebut akan terjadi secara kumulatif. Jika pasar berkembang, maka spesialisasi akan terjadi, sehingga meningkatkan produktivitas. Kenaikan pendapatan nasional terjadi karena perkembangan tersebut dan perkembangan penduduk dari masa ke masa yang terjadi bersama-sama. Dengan demikian, kenaikan dalam pendapatan nasional akan memperluas pasar dan menciptakan tabungan yang lebih banyak. Spesialisasi yang lebih tinggi dan pasar yang bertambah luas akan menciptakan teknologi dan mengadakan inovasi, sehingga perkembangan ekonomi akan berlangsung dan pendapatan per kapita akan bertambah tinggi. Menurut Smith, pertumbuhan ekonomi terjadi melalui beberapa tahap, yakni:

- a. Masa beternak.
- b. Masa bercocok tanam.
- c. Perdagangan.
- d. Industri.

Walaupun Adam Smith dianggap sebagai tokoh ekonomi yang hebat, tetapi teori Adam Smith tidak luput dari kelemahan, yakni:

- a. Pembagian masyarakat yang dilakukannya terlalu luas, sehingga mengabaikan peranan kelas menengah dalam memberikan daya dorong bagi pembangunan ekonomi.
- b. Menurutnya, yang dapat menabung hanyalah tuan tanah, kapitalis, dan lintah darat. Padahal, golongan penerima pendapatan yang lain juga dapat melakukan kegiatan menabung.
- c. Persaingan sempurna tidak terdapat di dunia nyata.

- d. Mengabaikan peran wiraswasta.
- e. Asumsi yang tidak realistis tentang keadaan stasioner.

2. DAVID RICARDO

David Ricardo lahir pada 1772. Tulisannya yang terkenal berjudul *The Principles of Political Economy and Taxation* yang terbit 1817. Teori Ricardo didasarkan pada asumsi:



- a. Seluruh tanah digunakan untuk produksi gandum.
- b. Faktor produksi tanah berlaku *law of diminishing return*.
- c. Persediaan tanah tetap.
- d. Permintaan gandum bersifat *inelastic*.
- e. Buruh dan modal adalah masukan yang bersifat variabel.
- f. Keadaan pengetahuan teknis adalah tertentu.
- g. Buruh dibayar pada tingkat upah minimal.
- h. Harga penawaran buruh tertentu dan tetap.
- i. Permintaan buruh tergantung pada pemupukan modal.
- j. Terdapat persaingan sempurna.
- k. Pemupukan modal dihasilkan dari keuntungan.

Menurutnya, terdapat tiga kelompok dalam perekonomian, yaitu:

- a. Tuan tanah.
- b. Kapitalis.
- c. Buruh.

Dengan demikian, keseluruhan pendapatan nasional dibagikan pada tiga kelompok tersebut. Keuntungan merupakan kekayaan yang disisihkan untuk pembentukan modal. Selain keuntungan, pemupukan modal juga tergantung pada:

- a. Kemampuan untuk menabung.
- b. Kemauan untuk menabung.

Kemampuan menabung tergantung pada penghasilan bersih masyarakat, sedangkan penghasilan bersih tergantung pada tingkat keuntungan dan kenaikan upah. Sumber lain pemupukan modal adalah:

- a. Pajak (sumber pemupukan modal di tangan pemerintah, tetapi akan mengurangi pemupukan modal yang dilakukan swasta, sehingga Ricardo tidak menyukai pajak).
- b. Tabungan.
- c. Perdagangan bebas.

David Ricardo mengemukakan, terdapat empat kelompok permasalahan dalam buku *The Principles of Political Economy and Taxation* (1817) dalam perekonomian, yaitu:

- a. Teori tentang nilai dan harga barang.
- b. Teori upah, sewa, bunga, dan laba.
- c. Perdagangan bebas.
- d. Akumulasi dan pertumbuhan ekonomi.

David Ricardo menganggap jumlah produksi tanah tidak bertambah, sedangkan laju pertumbuhan penduduk bertambah, sehingga terjadi adanya faktor pembatas dalam pertumbuhan *output*. Ada kecenderungan alamiah bahwa tingkat keuntungan menurun akibat naiknya biaya sewa tanah, sehingga perekonomian negara pada akhirnya mencapai keadaan stasioner. Keadaan stasioner "*stationary state*" adalah keadaan yang tidak ada perkembangan ekonomi sama sekali. Hal tersebut terjadi akibat perkembangan penduduk yang cepat akan memperbesar jumlah penduduk hingga dua kali lipat dalam satu generasi. Dengan demikian, akan menurunkan kembali tingkat pembangunan ke taraf yang lebih rendah. Pada tingkat ini, pekerja akan me-

nerima upah subsisten. Menurut Ricardo, proses pertumbuhan ekonomi yang terjadi adalah:

- a. Pada mulanya jumlah penduduk rendah dan kekayaan alam relatif banyak, sehingga para pengusaha memperoleh keuntungan yang tinggi sebab pembentukan modal tergantung pada keuntungan. Dengan demikian, laba tinggi menciptakan pembentukan modal yang tinggi pula, sehingga mengakibatkan kenaikan produksi dan permintaan tenaga kerja.
- b. Jika jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan meningkat, maka upah naik yang mendorong pertumbuhan penduduk. Jika luas tanah tetap, maka makin lama tanah yang digunakan adalah tanah yang mutunya rendah, sehingga marginal produk per pekerja semakin kecil sebab semakin banyak pekerja yang digunakan. Hal tersebut akan menurunkan tingkat keuntungan dan permintaan tenaga kerja.
- c. Tingkat upah akan turun sampai tingkat upah subsisten dan kondisi mencapai *stationary state*.

Adanya kemajuan teknologi, menurut Ricardo, tetap tidak dapat menghalangi terjadinya *stationary state*, tetapi hanya mampu mengundurkan masa terjadinya keadaan stasioner tersebut. Keadaan stasioner hanya dapat dielakkan apabila tuan tanah bersedia menggunakan sewa tanah yang diterima untuk pembentukan modal. Dengan demikian, semua potensi sumber daya sudah dikelola dan digunakan secara baik. Namun, perekonomian tetap berada pada posisi stasioner dengan ciri-ciri:

- a. Jumlah penduduk, pendapatan per kapita, dan tingkat *output* konstan.
- b. Tingkat keuntungan minimal.
- c. Akumulasi modal berhenti.
- d. Tingkat upah minimal.
- e. Sewa tanah maksimal.

Ada beberapa pandangan kritis yang dikemukakan Ricardo:

- a. Jumlah tanah terbatas.
- b. Ia menekankan pentingnya pembangunan pertanian.
- c. Menekankan pentingnya akumulasi modal dan peningkatan keuntungan untuk pemupukan modal.
- d. Menekankan pentingnya tabungan.
- e. Menekankan pentingnya perdagangan luar negeri untuk optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki.
- f. Teorinya bersifat dinamis sebab melihat pengaruh perubahan berbagai variabel dalam pembangunan ekonomi, seperti jumlah penduduk, upah, sewa, dan keuntungan.

Selain pandangannya yang kritis tentang pembangunan, teori Ricardo memiliki beberapa kelemahan, yaitu:

- a. Mengabaikan pengaruh teknologi dalam mengatasi masalah *diminishing return*.
- b. Tidak ada keadaan stasioner dengan keuntungan yang meningkat, produksi meningkat, dan terjadi pemupukan modal.
- c. Menganggap upah yang tidak akan meningkat karena pertambahan jumlah penduduk.
- d. Kebijakan pasar bebas yang tidak pernah ada dalam realitas.
- e. Mengabaikan faktor kelembagaan.
- f. Tanah juga memproduksi selain gandum.
- g. Menganggap modal dan buruh adalah koefisien yang tetap, padahal keduanya adalah variabel bebas.
- h. Mengabaikan tingkat suku bunga.

3. THOMAS ROBERT MALTHUS

Thomas Robert Malthus berpendapat bahwa proses pembangunan tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi memerlukan usaha yang konsisten dari rakyat. Dia tidak memberikan gambaran adanya gerakan menuju keadaan stasioner, tetapi yang ditekankannya adalah bahwa per-

ekonomian terlebih dahulu akan mengalami kemerosotan beberapa kali sebelum mencapai tingkat tertinggi dari pembangunan. Menurutnya pula, proses pembangunan adalah suatu proses naik turunnya aktivitas ekonomi lebih daripada sekedar lancar tidaknya aktivitas ekonomi. Pertumbuhan penduduk saja tidak cukup untuk berlangsungnya pembangunan ekonomi, justru pertumbuhan penduduk adalah akibat dari proses pembangunan. Pertumbuhan penduduk akan meningkatkan kesejahteraan hanya jika pertumbuhan tersebut meningkatkan permintaan efektif.

Proses akumulasi modal merupakan faktor paling penting bagi pembangunan ekonomi. Sumber akumulasi modal adalah laba yang berasal dari tabungan para pemilik modal. Bukan berasal dari pengurangan pengeluaran pada barang-barang mewah. Jika pengeluaran untuk konsumsi dikurangi, maka justru perekonomian akan lamban.

Malthus menolak hukum Say "*supply creates its own demand*". Menurutnya, tidak seluruhnya benar bahwa komoditi selalu dipertukarkan dengan komoditi sebab, pada kenyataannya, komoditi dalam jumlah yang besar dipertukarkan secara langsung dengan tenaga kerja daripada dengan komoditi. Dengan demikian, di pasar ada kelebihan penawaran dibanding dengan permintaan. Selain itu, ia yakin bahwa penawaran buruh dalam jangka pendek sangat tidak elastis.

Malthus memiliki beberapa saran untuk pembangunan ekonomi:

- a. Harus ada pertumbuhan seimbang antara sektor pertanian dan sistem sektor.
- b. Harus ada upaya untuk menaikkan permintaan efektif dengan cara pendistribusian kesejahteraan dan pemilikan tanah secara lebih adil.
- c. Perlunya melakukan perluasan perdagangan internal dan eksternal.

Ada beberapa kelemahan yang dimiliki teori Malthus, yakni:

- a. Stagnasi sekuler tidak melekat pada akumulasi modal sebab, pada kenyataannya, konsumsi rendah bukanlah suatu gejala tetap, tetapi hanya sementara.
- b. Pandangan negatif terhadap akumulasi modal. Berdasarkan realitasnya, akumulasi modal tidak menyebabkan berkurangnya permintaan atas barang-barang konsumen dan turunnya laba.

4. ARTHUR LEWIS

Teorinya didasarkan pada anggapan adanya penawaran buruh yang tidak terbatas di negara terbelakang dengan upah subsisten. Pembangunan ekonomi berlangsung bila modal terakumulasi, akibat peralihan buruh surplus dari sektor subsisten ke sektor kapitalis. Pembentukan modal tergantung pada surplus kapitalis. Surplus ini diinvestasikan kembali pada aktiva kapitalis baru. Pembentukan modal berlangsung dan lebih banyak orang dipekerjakan dari sektor subsisten. Proses tersebut akan berlangsung sampai rasio buruh modal naik dan penawaran buruh menjadi tidak elastis. Pokok permasalahannya adalah bagaimana proses pertumbuhan terjadi dalam perekonomian dua sektor, yaitu:

- a. Sektor tradisional dengan produktivitas rendah dan sumber tenaga kerja yang melimpah.
- b. Sektor modern dengan produktivitas tinggi dan sebagai sumber akumulasi modal.

Pembentukan modal tergantung pada surplus kapital, yakni modal dibentuk dari laba yang dihasilkan oleh para kapitalis. Menurutnya, proses pertumbuhan ekonomi akan berakhir, jika:

- a. Akibat dari pembentukan modal, tidak ada lagi surplus buruh yang tersisa.
- b. Sektor kapitalis berkembang begitu cepat, sehingga mengurangi secara absolut penduduk di sektor subsisten.

Beberapa keterbatasan teori Lewis, yakni:

- a. Tidak semua negara terbelakang mempunyai penawaran buruh yang tidak terbatas.
- b. Tingkat upah di sektor kapitalis tidak konstan. Berdasarkan kenyataan, tingkat upah sektor industri di negara terbelakang terus naik sepanjang waktu, walaupun terdapat pengangguran terbuka di sektor pedesaan.
- c. Buruh terampil bukan kesulitan sementara.
- d. Proses multiplikasi tidak berlangsung di negara terbelakang sebab proses pembentukan modal akan berhenti sebelum seluruh surplus buruh terserap.
- e. Mengabaikan permintaan total sebab anggapannya bahwa sektor subsisten konsumsinya sangat sedikit.
- f. Mobilitas buruh tidaklah mudah.
- g. Kelompok berpendapatan rendah juga menabung.

5. KARL MARX

Karl Marx lahir pada 1818 di Kota Trier, Jerman. Pemikiran Marx sangat dipengaruhi oleh Darwin dan menggunakan gagasan ini untuk menjelaskan proses dialektik sejarah. Menurut Marx, masyarakat menempuh tahapan-tahapan yang berbeda dalam sejarah. Penentuan tahapan-tahapan tersebut didasarkan pada perubahan dalam sarana produksi dan hubungan-hubungan produksi.

Menurutnya, berdasarkan sejarah, perkembangan masyarakat terjadi melalui lima tahap, yakni:

- a. Masyarakat komunal primitif, yang masih menggunakan alat-alat produksi sederhana yang merupakan milik komunal. Tidak ada surplus produksi di atas konsumsi.
- b. Masyarakat perbudakan, adanya hubungan antarpemilik faktor produksi dan orang-orang yang hanya bekerja untuk mereka. Para budak diberi upah sangat minim, mulai ada spesialisasi untuk bidang pertanian, kerajinan tangan, dan sebagainya. Oleh

sebab itu, dengan murahnya harga buruh, maka minat pemilik faktor produksi untuk memperbaiki alat-alat yang dimilikinya juga rendah. Buruh makin lama sadar dengan kesewenang-wenangan yang dialaminya, sehingga menimbulkan perselisihan antara dua kelompok tersebut.

- c. Masyarakat feodal, kaum bangsawan memiliki faktor produksi utama, yaitu tanah. Para petani kebanyakan adalah budak yang dibebaskan dan mereka mengerjakan dahulu tanah milik bangsawan. Hubungan ini mendorong adanya perbaikan alat produksi, terutama di sektor pertanian. Kepentingan dua kelas tersebut berbeda, para feodal lebih memikirkan keuntungan saja dan kemudian mendirikan pabrik-pabrik. Banyak timbul pedagang-pedagang baru yang didukung raja, lalu membutuhkan pasar yang lebih luas. Perkembangan ini mengakibatkan timbulnya alat produksi kapitalis dan menghendaki dihapusnya sistem feodal. Kelas borjuis yang memiliki alat-alat produksi menghendaki pasaran buruh yang bebas dan dihapusnya tarif serta tantangan lain dalam perdagangan yang diciptakan kaum feodal. Hal tersebut menjadikan masyarakat tidak lagi menyukai sistem ini.
- d. Masyarakat kapitalis, hubungan produksinya didasarkan pada kepemilikan individu masing-masing kapitalis terhadap alat-alat produksi. Kelas kapitalis mempekerjakan buruh. Keuntungan kapitalis membesar yang memungkinkan berkembangnya alat-alat produksi. Perubahan alat yang mengubah cara produksi selanjutnya menyebabkan perubahan kehidupan ekonomi masyarakat. Perbedaan kepentingan antara kaum kapitalis dan buruh semakin meningkat dan mengakibatkan perjuangan kelas.
- e. Masyarakat sosialis, kepemilikan alat produksi didasarkan atas hak milik sosial. Hubungan produksi merupakan hubungan

kerja sama dan saling membantu antara buruh yang bebas unsur eksploitasi. Tidak ada lagi kelas-kelas dalam masyarakat.

Marx juga meramalkan terjadinya keruntuhan sistem kapitalis. Menurutnya, runtuhnya kapitalisme terjadi karena adanya:

1. Konsentrasi penggabungan perusahaan-perusahaan agar tidak bangkrut karena persaingan dalam masyarakat kapitalis.
2. Akumulasi yang menyebabkan perbedaan kaya-miskin semakin lebar.
3. Kesengsaraan karena kemiskinan semakin luas.

Akibatnya, daya beli masyarakat terus merosot yang berdampak pada over produksi, harga barang merosot, produksi ditahan, dan banyak pabrik ditutup, sehingga terjadilah krisis.

Menurut Karl Marx, masyarakat menempuh tahapan-tahapan yang berbeda dalam sejarah. Adapun yang menentukan tahap-tahap tersebut adalah perubahan dalam sarana produksi dan juga hubungan-hubungan produksi yang telah dijelaskan di atas. Namun, sejarah telah membuktikan bahwa periode evolusi yang dikemukakan Marx ternyata keliru. Tidak ada masa dalam sejarah masyarakat yang melalui tahapan evolusi sebagaimana yang dikemukakan Marx. Sebaliknya, sebagaimana sistem yang diyakini Marx terjadi melalui serangkaian tahapan tertentu. Bahkan, dapat terjadi dalam waktu bersamaan dan dalam masyarakat yang sama pula. Saat satu wilayah dari suatu negara sedang mengalami sistem yang menyerupai masyarakat feodal, sistem kapitalis berlaku di wilayah lainnya dalam negara yang sama. Jadi, pernyataan bahwa tahapan dari satu sistem ke sistem berikutnya mengikuti pola evolusi, sebagaimana yang dikemukakan Marx dan teori evolusi tidak dapat dibuktikan sama sekali.

C. NEO-KLASIK (SOLOW-SWAN)



Teori ini berkembang berdasarkan pandangan analisis-analisis pertumbuhan ekonomi, menurut pandangan ekonom klasik dan berkembang pada 1950-an. Tokoh pelopor perintis teori

ekonomi neo-klasik adalah Robert Solow. Pokok pemikirannya tertuang dalam artikel jurnal berjudul “*A Contribution to the Theory of Economic Growth*” (1956).

Pasangan Solow yaitu Trevor W. Swan, ekonom besar Australia dengan tulisannya yang terkenal *Economic Growth and Capital Accumulation* (1956). Perkembangan teori neo-klasik mengacu pada pandangan ekonom klasik. Menurut teori yang dikemukakan oleh Solow-Swan, pertumbuhan ekonomi tergantung pada adanya ketersediaan dari faktor-faktor produksi, seperti tenaga kerja, akumulasi modal, dan pertumbuhan penduduk. Analisis yang mendasari pemikiran ini adalah perekonomian berada pada kondisi tenaga kerja penuh (*full employment*) dan tingkat pemanfaatan penuh (*full utilization*) dari faktor-faktor produksinya. Artinya, perekonomian akan berkembang tergantung pada akumulasi modal, penambahan penduduk, dan kemajuan teknologi. Rasio modal *output* dapat berubah untuk menghasilkan sejumlah *output* tertentu, dapat menggunakan kombinasi tenaga kerja, dan modal yang berbeda-beda. Jika banyak tenaga kerja yang digunakan, maka modal yang dibutuhkan lebih sedikit. Namun, jika banyak modal yang digunakan, maka tenaga kerja yang dibutuhkan lebih sedikit.

Teori pertumbuhan neo-klasik memiliki banyak variasi. Biasanya disajikan dalam bentuk fungsi produksi dari *Cobb-Douglass*, yakni *output* merupakan fungsi dari tenaga kerja dan modal. Kemajuan teknologi merupakan variabel eksogen. Asumsi yang digunakan adalah “*diminishing marginal productivity*” dari setiap input yang digunakan.

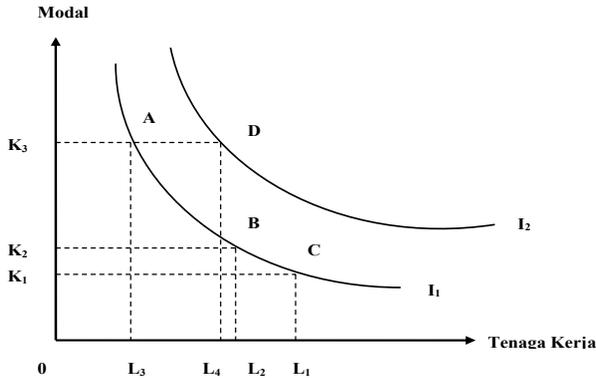
Fungsi Cobb-Douglass:

$$Q_t = T_t K_t^a L_t^b$$

Keterangan:

- Q = Tingkat produksi pada tahun t.
- T_t = Tingkat teknologi pada tahun t.
- K_t = Jumlah barang modal pada tahun t.
- L_t = Jumlah tenaga kerja pada tahun t.
- a = Pertambahan *output* diciptakan oleh pertambahan satu unit modal.
- b = Pertambahan *output* yang diciptakan oleh per-tambahan satu unit tenaga kerja.

Teori pertumbuhan neo-klasik menentukan kombinasi antara modal (K) dan tenaga kerja (L) yang akan digunakan untuk menghasilkan *output*. Misalnya, untuk menciptakan *output* sebesar I1, kombinasi modal dan tenaga kerja yang dapat digunakan antara K3 dan L3. Sementara K2 dan L2, serta K1 dan L1. Meskipun jumlah modal berubah, tetapi terdapat kemungkinan bahwa tingkat *output* tidak berubah. Tingkat *output* tetap dapat mengalami perubahan, meskipun jumlah modal yang digunakan konstan. Diasumsikan jumlah modal tidak mengalami perubahan sebesar K3, tetapi jumlah *output* dapat diperbesar dari I1 menjadi I2, apabila tenaga kerja yang digunakan bertambah dari L3 menjadi L4.



Gambar 2.1
Fungsi Produksi Neo-klasik
(Sumber: Lincoln Arsyad [1999]).

Solow-Swan berpendapat mengenai perkembangan ekonomi, bahwa:

1. Adanya akumulasi kapital merupakan faktor penting dalam perkembangan ekonomi.
2. Perkembangan tersebut merupakan proses yang gradual.
3. Perkembangan merupakan proses yang harmonis dan kumulatif.
4. Merupakan aliran yang optimis terhadap perkembangan ekonomi.
5. Adanya aspek internasional dalam perkembangan tersebut.

Menurut teori ini, tingkat bunga dan tingkat pendapatan akan menentukan tingginya tingkat tabungan. Pada suatu tingkat teknik tertentu, tingkat bunga akan menentukan investasi, jika kesempatan untuk investasi bertambah, misalnya, karena kemajuan teknologi, tambahnya permintaan untuk investasi mengakibatkan tingkat bunga naik yang selanjutnya meningkatkan jumlah tabungan. Adanya kenaikan investasi tersebut menyebabkan harga-harga barang naik.

Kenaikan harga-harga dan tingkat bunga mengakibatkan investasi terbatas hanya pada proyek-proyek dengan tingkat keuntungan terbesar. Akhirnya, permintaan investasi berkurang, sehingga tingkat bunga dan harga barang kapital turun kembali. Jika tingkat bunga sangat rendah sedemikian rupa, maka tidak ada orang yang mau menabung. Jika keadaan

tersebut terjadi, maka akumulasi kapital berakhir dan perekonomian mengalami keadaan yang statis. Agar tidak mengalami hal tersebut, maka kondisi *full employment* harus tetap dijaga dengan mengadakan proyek-proyek pekerjaan umum.

Kemajuan teknologi, seperti penemuan-penemuan baru yang mengurangi penggunaan tenaga buruh, juga merupakan pendorong kenaikan pendapatan nasional. Mereka yakin bahwa manusia mampu mengatasi keterbatasan pertumbuhan, akibat habisnya sumber daya alam. Hal lain lagi yang dianggap penting untuk pertumbuhan ekonomi adalah kemampuan untuk menabung. Jika tidak ada tabungan, kemajuan teknologi yang baru belum dapat digunakan.

Menurut teori neo-klasik, tingkatan perkembangan ekonomi yang dialami suatu negara melalui beberapa tahap berikut:

1. Mula-mula negara meminjam kapital dan disebut sebagai debitur yang belum mapan.
2. Setelah dapat menghasilkan dengan kapital pinjaman tersebut, negara itu membayar deviden dan bunga atas pinjaman yang dilakukan. Pada tingkat ini belum dibayar pokok pinjaman kapital.
3. Setelah penghasilan meningkat terus, sebagian penghasilan digunakan untuk melunasi hutang dan sebagian dipinjamkan ke negara lain yang membutuhkan. Negara berada dalam tingkat debitur yang sudah mapan (*mature debtor*).
4. Negara dapat menerima bunga dan dividen lebih besar daripada yang dibayar, jadi ada surplus. Dengan kata lain, hutangnya semakin sedikit dan piutangnya semakin besar. Negara tersebut sampai pada tingkatan kreditur yang belum mapan (*immature creditor*).
5. Negara melulu hanya menerima deviden dan bunga dari negara lain. Namun, negara sampai pada tingkat kreditur yang sudah mapan (*mature creditor*).

Kritik atau kelemahan dari teori neo-klasik, ada beberapa kekurangan dari teori neo-klasik, yakni:

1. Kurang menonjolkan analisis permintaan dan penawaran guna menciptakan produk, faktor produksi, dan kurs valuta asing yang tepat untuk melangsungkan kegiatan produksi yang efisien.
2. Kurang mencantumkan teori kelembagaan dan politik.
3. Teori monopoli neo-klasik di negara berkembang, ternyata banyak gagal untuk menyajikan dan menjelaskan mengenai kegiatan sehari-hari dari berbagai perusahaan negara serta swasta yang menjadi pelaku usaha.

D. TEORI KETERGANTUNGAN SCHUMPETER

Teori Schumpeter pertama kali dikemukakan dalam bukunya yang berbahasa Jerman pada 1911 yang kemudian dikemukakan pada tahun 1934 dalam bahasa Inggris dengan judul *The Theory of Economic Development*. Kemudian Schumpeter menggambarkan teorinya lebih lanjut tentang proses pembangunan dan faktor utama yang menentukan pembangunan dalam bukunya yang diterbitkan pada 1939 berjudul *Business Cycle*.

Teori Schumpeter digolongkan dalam kelompok teori pertumbuhan klasik. Namun, dari banyaknya kesimpulan, khususnya mengenai prospek perbaikan hidup masyarakat banyak dalam perekonomian kapitalis, Schumpeter lebih dekat dengan para ekonom modern. Dia optimis bahwa dalam jangka panjang tingkat hidup orang banyak dapat ditingkatkan, sesuai dengan kemajuan teknologi yang dapat dicapai masyarakat tersebut. Dia tidak terlalu menekankan pada aspek pertumbuhan penduduk dan keterbatasan sumber daya alam dalam proses pertumbuhan ekonomi. Ini karena, menurutnya, motor penggerak perkembangan ekonomi adalah inovasi, sedangkan pelakunya adalah wiraswasta. Menurutnya, kemajuan ekonomi adalah peningkatan *output* total masyarakat.

Ia membedakan pengertian antara pertumbuhan ekonomi dan perkembangan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi timbul karena faktor yang

bersifat rutin, yakni pertumbuhan penduduk dan akumulasi kapital yang berasal dari tabungan rutin masyarakat, sedangkan perkembangan ekonomi atau *development* adalah kenaikan *output* yang disebabkan karena inovasi. Menurutnya, yang lebih menarik adalah kenaikan *output* yang bersumber dari perkembangan ekonomi. Perkembangan ekonomi berawal dari suatu lingkungan sosial, politik, dan teknologi yang menunjang kreativitas para wiraswasta.

Inovasi adalah penerapan pengetahuan teknologi di dunia ekonomi. Inovasi oleh wiraswasta akan menimbulkan posisi monopoli bagi pencetusnya yang akan menghasilkan keuntungan di atas keuntungan normal. Hal ini merupakan rangsangan bagi calon inovator. Inovasi itu sendiri memiliki tiga pengaruh, yaitu:

1. Diperkenalkannya teknologi baru.
2. Menimbulkan keuntungan lebih yang merupakan sumber dana penting untuk akumulasi kapital.
3. Timbulnya proses imitasi.

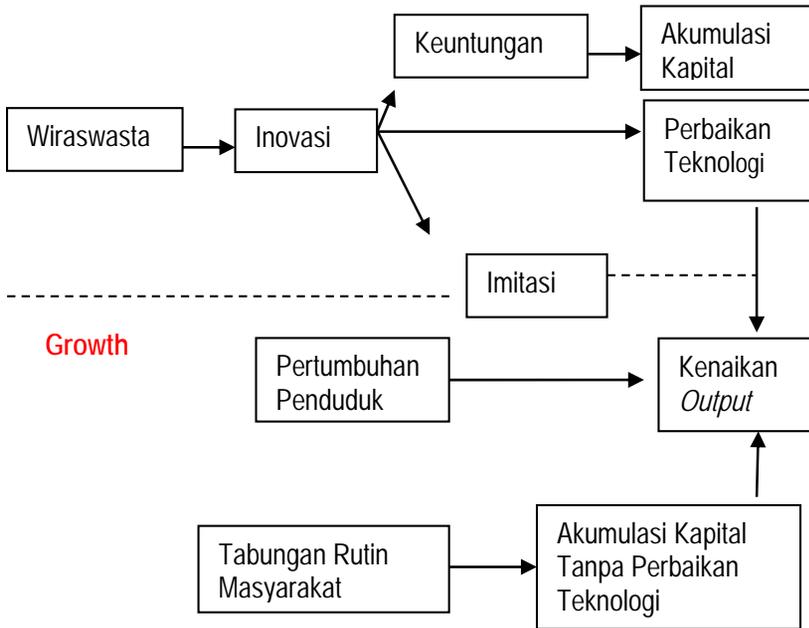
Proses imitasi mempunyai pengaruh berupa:

1. Menurunnya keuntungan monopoli.
2. Penyebaran teknologi baru dalam masyarakat.

Schumpeter mengemukakan ada lima kegiatan yang dapat dikelompokkan sebagai inovasi, yaitu:

1. Produk baru.
2. Daerah pasar baru.
3. Cara produksi baru.
4. Perubahan organisasi industri.
5. Sumber bahan mentah baru.

Berikut alur diagram proses pembangunan ekonomi menurut Schumpeter yang disajikan dalam gambar model Schumpeter. *Development*, lingkungan sosial, politik, dan teknologi yang menunjang inovasi.



Gambar 2.2
Model Schumpeter
 (Sumber: Lincoln Arsyad [2018]).

Apa syarat-syarat terjadinya inovasi? Syarat terjadinya inovasi adalah:

1. Tersedianya calon inovator di masyarakat
2. Adanya lingkungan sosial, politik, dan teknologi yang mendukung. Sistem kapitalis dan kebebasan berusaha serta dukungan lembaga yang sesuai.

Selain itu, harus terdapat pula dua faktor lain yang menunjang terlaksananya inovasi tersebut, yaitu:

1. Tersedianya cadangan atau suplai ide-ide baru secara cukup
2. Adanya sistem perkreditan yang dapat menyediakan dana bagi para *entrepreneur* untuk merealisasikan ide-ide tersebut.

Inovator adalah orang yang benar-benar berkecimpung dalam dunia usaha dan punya semangat berani mencoba menerjemahkan ide baru menjadi kenyataan. Mereka, biasanya, bukan orang yang menemukan

teori baru atau ide baru, tetapi mereka adalah yang dapat membuat ide-ide tersebut menjadi bagian dari kehidupan ekonomi masyarakat. Salah satu ciri inovator adalah berani mengambil risiko. Mereka berani mengambil risiko karena kemungkinan adanya keuntungan monopoli dan semangat mengalahkan pesaing. Sistem kredit merupakan faktor penunjang inovasi, yakni para investor dapat memperoleh kesempatan lebih bebas dalam mewujudkan idenya.

Menurutnya, dalam jangka panjang, sistem kapitalis akan runtuh karena terjadinya transformasi gradual dalam sistem tersebut menuju ke arah yang lebih sosialis. Kapitalis akan berubah justru karena kesuksesannya dalam mencapai kemakmuran. Dengan demikian, kemakmuran masyarakat akan membawa pada perubahan kelembagaan dan pandangan masyarakat yang menjauhi sistem kapitalis asli karena semakin meluasnya sistem tunjangan sosial bagi penganggur, orang tua, dan lain-lain. Dengan kata lain, Schumpeter mengatakan bahwa sumber kemajuan ekonomi adalah daya kreasi manusia sebagai pelakunya dan bukan sekedar akumulasi kapital atau pertumbuhan penduduk. Oleh sebab itu, kreasi manusia merupakan faktor sentral dalam proses kemajuan ekonomi.

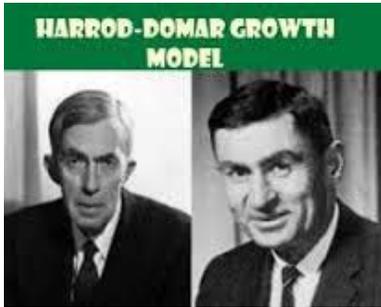
Salah satu kendala yang dihadapi negara-negara berkembang adalah sangat langkanya calon-calon inovator dan belum adanya lingkungan yang menunjang inovasi. Oleh karena itu, hal yang sangat penting dilakukan adalah melakukan pembaruan kelembagaan sosial politik dalam rangka mengembangkan lingkungan yang subur bagi kegiatan inovasi. Schumpeter percaya bahwa pertumbuhan ekonomi melalui jalur kapitalisme akan membawa kemakmuran bagi rakyat banyak, tanpa perlu campur tangan yang bersifat fundamental dari pemerintah. Pemerintah cukup menyediakan lingkungan yang menunjang inovasi dan sistem ekonomi itu sendiri akan membawa kemakmuran yang cukup merata.

Schumpeter mengemukakan beberapa pendapatnya mengenai kapitalisme, yakni:

1. Negara sedang berkembang mengejar kemajuan ekonomi, sehingga sistem yang dianggap sesuai adalah sistem kapitalis.
2. Kapitalis meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat dan sekaligus distribusi pendapatan yang lebih merata.
3. Kapitalis akan runtuh akibat adanya transformasi gradual dalam sistem yang menuju ke arah sosialis.

Kritik seperti apa yang disampaikan terhadap teori Schumpeter? Pada negara sedang berkembang, teori kapitalisme Schumpeter tidak dapat sepenuhnya berlaku karena sebagian negara berkembang mengalami situasi ekonomi dan politik yang tidak menentu. Kondisi yang tidak menentu tersebut tidak lepas dari pengaruh keadaan dalam negeri maupun faktor luar negeri, sehingga diperlukan kekuatan lingkungan sosial, politik, teknologi, dan inovasi yang lebih baik.

E. KEYNESIAN (HARROD-DOMAR)



Model teori ekonomi pembangunan ini diperkenalkan Sir Roy F. Harrod (1900-1978) dan Evsey Domar (1914-1997). Model ini dibangun berdasarkan pengalaman negara maju. Teorinya menelaah persyaratan pertumbuhan stabil (*steady growth*), yaitu pertumbuhan yang selalu menciptakan penggunaan barang-barang modal secara penuh.

Teori Harrod-Domar, terinspirasi oleh teori yang dikemukakan oleh Keynes. Pada teori Keynes dianggap kurang membahas terkait masalah ekonomi jangka panjang. Sebaliknya, teori Harrod-Domar lebih mengungkapkan teori-teori analisis syarat berkembangnya perekonomian dalam jangka panjang, yakni teori yang menunjukkan syarat agar suatu perekonomian dalam kondisi *steady growth*. Dalam teori Harrod-Domar, pertumbuhan modal diperoleh melalui proses akumulasi tabungan. Teori ini menunjukkan faktor yang diabaikan oleh Keynes bahwa dalam pembentukan modal tidak hanya dipandang sebagai pengeluaran yang akan menambah kemampuan dalam menghasilkan barang dan jasa, tetapi justru menunjukkan pada permintaan yang lebih efektif di masyarakat.

Teori ini memberi peran kunci pada investasi dalam proses pertumbuhan ekonomi, terutama tentang watak ganda investasi, yaitu:

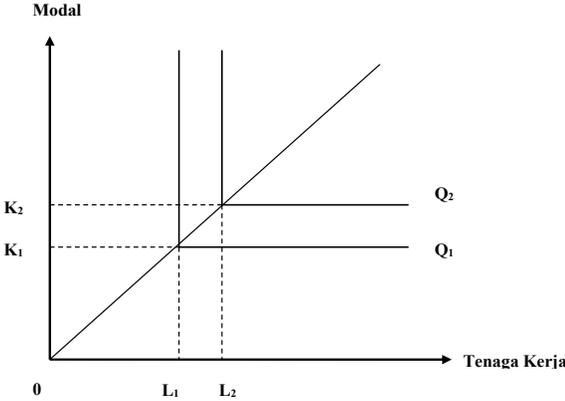
1. Menciptakan pendapatan/menambah permintaan efektif masyarakat.
2. Memperbesar kapasitas produksi/menambah kesanggupan suatu perekonomian untuk menghasilkan barang.

Harrod-Domar sependapat dengan Keynes bahwa penambahan produksi dan pendapatan nasional bukan ditentukan oleh penambahan dalam kapasitas produksi, tetapi oleh kenaikan pengeluaran masyarakat. Dengan demikian, walaupun kapasitas produksi bertambah, tetapi pen-

dapatan nasional baru akan bertambah dan pertumbuhan ekonomi tercipta jika pengeluaran masyarakat mengalami kenaikan dibanding dengan masa sebelumnya.

Berbagai asumsi yang dipakai oleh teori ini adalah:

1. Pada taraf permulaan perekonomian telah mencapai tingkat kesempatan kerja penuh dan barang-barang modal yang tersedia dalam masyarakat sepenuhnya digunakan.
2. Tidak ada campur tangan pemerintah.
3. Bekerja pada perekonomian tertutup tanpa perdagangan luar negeri.
4. Besarnya tabungan masyarakat proporsional dengan besarnya pendapatan nasional, dalam keadaan ini berarti fungsi tabungan dimulai dari titik 0.
5. Kecenderungan marginal menabung, besarnya tetap. Begitu juga perbandingan antara modal dengan jumlah produksi.
6. Tidak ada penyusutan barang modal yang dapat dipakai seumur hidup.
7. Tingkat harga umum konstan, yaitu upah uang sama dengan tingkat pendapatan nyata.
8. Tidak ada perubahan suku bunga.
9. Ada proporsi yang tetap antara modal dan buruh dalam proses produksi.
10. Modal tetap dan modal lancar disatukan menjadi modal.
11. Dalam perekonomian hanya terdapat satu jenis produk.



Gambar 2.3
Fungsi Produksi Harrod-Domar
(Sumber: Arsyad, Lincoln [1999]).

Dalam gambar ini, fungsi produksi berbentuk L karena sejumlah modal hanya dapat menciptakan suatu tingkat *output* tertentu, yakni tergantung modal dan tenaga kerja yang digunakan. Jika ingin menghasilkan *output* sebesar Q_1 , maka modal dan tenaga kerja yang digunakan sebesar K_1 dan L_1 . Jika ingin menambah *output* sebesar Q_2 , maka digunakan kombinasi modal sebesar K_2 dan tenaga kerja sebesar L_2 .

Jika rasio modal *output* (*capital output ratio*) adalah k dan s adalah rasio tabungan nasional, maka *national saving ratio* yang merupakan persentase dari *output* nasional yang ditabung dan bahwa jumlah investasi baru ditentukan oleh jumlah tabungan total S . Dengan demikian, model pertumbuhan ekonominya menjadi:

1. Jika s adalah MPC, maka

$$S = s Y \dots\dots\dots 2.1$$

2. Investasi (I) didefinisikan sebagai perubahan stok modal (K) yang dapat diwakili oleh ΔK , sehingga dapat ditulis persamaan sederhana yang kedua sebagai berikut:

$$I = \Delta K \dots\dots\dots 2.2$$

Namun, sebab jumlah stok modal K mempunyai hubungan langsung dengan jumlah pendapatan nasional atau *output* Y , seperti telah ditunjukkan oleh rasio modal *output* k , maka

$$\frac{K}{Y} = k \dots\dots\dots 2.3$$

Atau

$$\frac{\Delta K}{\Delta Y} = k \dots\dots\dots 2.4$$

Atau akhirnya

$$\Delta K = k \Delta Y \dots\dots\dots 2.5$$

3. Terakhir, mengingat jumlah keseluruhan dari tabungan nasional (S) harus sama dengan keseluruhan investasi (I), maka persamaan berikutnya dapat ditulis sebagai berikut:

$$S = I \dots\dots\dots 2.6$$

Dari persamaan 2.1 diketahui bahwa $S = s Y$ dan dari persamaan 2.2 serta persamaan 2.5 kita telah mengetahui bahwa:

$$I = \Delta K = k \Delta Y$$

Dengan demikian, identitas tabungan yang merupakan persamaan modal dalam persamaan 2.6 adalah sebagai berikut:

$$S = sY = k \Delta Y = \Delta K = I$$

Atau bila diringkas menjadi

$$sY = k \Delta Y \dots\dots\dots 2.7$$

Selanjutnya, apabila kedua sisi persamaan 2.7 dibagi mula-mula dengan Y dan kemudian dengan k, maka akan diperoleh sebagai berikut:

$$\frac{\Delta K}{\Delta Y} = \frac{s}{k} = \text{pertumbuhan ekonomi}$$

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi akan secara langsung atau secara positif berbanding lurus dengan rasio tabungan, yakni semakin banyak bagian GNP yang ditabung dan diinvestasikan, maka pada akhirnya nanti akan lebih besar lagi pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan. Sebaliknya, secara negatif atau berbanding terbalik terhadap rasio modal *output* dari suatu perekonomian, yakni semakin besar rasio modal *output* nasional atau k, maka tingkat pertumbuhan ekonomi semakin rendah.

Kendala dari penerapan teori ini di negara berkembang adalah keterbatasan peluang untuk pembentukan modal baru. Oleh karena itu, pemikiran inti dari "kendala modal" dijadikan alat pembenaran dan dimanfaatkan untuk mengabsahkan pengaliran modal, serta bantuan teknis secara besar-besaran dari negara-negara maju ke sejumlah negara berkembang.

F. TEORI PERTUMBUHAN ENDOGEN

Romer (1994) mencoba mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi proses pertumbuhan ekonomi yang berasal dari dalam "*endogenous*" sistem ekonomi itu sendiri. Kemajuan teknologi dianggap bersifat endogen, yakni pertumbuhan ekonomi merupakan ha-

sil dari keputusan para pelaku ekonomi dalam berinvestasi di bidang ilmu pengetahuan.

Muncul sebagai sebuah kritik terhadap asumsi *diminishing marginal returns to capital investment*. Faktor utama penyebab terjadinya perbedaan tingkat pendapatan per kapita antarnegara adalah karena adanya perbedaan mekanisme alih pengetahuan, kapasitas investasi modal fisik, modal insani, dan infrastruktur. Terdapat elemen dasar teori pertumbuhan endogen, yakni:

1. Adanya perubahan teknologi yang bersifat endogen melalui sebuah proses akumulasi ilmu pengetahuan.
2. Adanya penciptaan ide-ide baru oleh perusahaan sebagai akibat dari mekanisme luberan pengetahuan (*knowledge spillover*).
3. Produksi barang-barang konsumsi yang dihasilkan oleh faktor produksi ilmu pengetahuan akan tumbuh tanpa batas.

Fungsi Teori Pertumbuhan Endogen:

$$Y = f(R, K, H)$$

Keterangan:

Y = adalah total *output*.

R = adalah penelitian dan pengembangan (R & D) yang dilakukan oleh setiap perusahaan dalam perekonomian.

K = adalah akumulasi modal fisik.

H = adalah akumulasi modal insani.

Ada beberapa kritik dari teori pertumbuhan endogen, yaitu:

1. Pertumbuhan ekonomi di NSB seringkali dihambat oleh serangkaian inefisiensi yang bersumber pada kelemahan infrastruktur, kerapuhan sistem kelembagaan, dan pasar (baik pasar modal maupun pasar barang) yang jauh dari sempurna. Faktor-faktor yang sangat berpengaruh ini ternyata juga kurang diperhatikan oleh teori pertumbuhan endogen.
2. Teori ini masih menggunakan beberapa asumsi teori klasik yang terbukti tidak cocok untuk diterapkan di NSB misalnya, teori ini

mengasumsikan hanya ada satu sektor produksi atau dengan kata lain semua sektor dianggap simetris.

Tabel 2.2 Pokok-pokok Pemikiran Para Tokoh Ekonomi

Tokoh	Pokok-pokok Pemikiran	Kelemahan
Adam Smith	<ul style="list-style-type: none"> • Tiga unsur pokok sistem produksi, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber daya alam yang tersedia. 2. Jumlah penduduk. 3. Stok barang modal. • Sumber daya alam merupakan batas maksimum bagi pertumbuhan perekonomian. • Stok modal merupakan unsur produksi yang secara aktif me-<i>mentukan</i> tingkat <i>output</i>. • Jumlah dan pertumbuhan <i>output</i> tergantung pada pertumbuhan stok modal. • Pemupukan modal harus dilakukan sebelum pembagian kerja. • Pemupukan modal adalah syarat mutlak untuk pembangunan ekonomi. • Pemupukan modal dilakukan dengan cara menyisihkan pendapatan/ menabung. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembagian masyarakat yang dilakukannya terlalu luas, sehingga mengabaikan peranan kelas menengah dalam memberikan daya dorong bagi pembangunan ekonomi. • Menurutnya, yang dapat menabung hanyalah tuan tanah, kapitalis, dan lintah darat. Padahal, golongan penerima pendapatan yang lain juga dapat melakukan kegiatan menabung. • Persaingan sempurna tidak terdapat di dunia nyata. • Mengabaikan peran wiraswasta. • Asumsi yang tidak realistis tentang keadaan stasioner.
David Ricardo	<ul style="list-style-type: none"> • David Ricardo mengemukakan terdapat 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengabaikan pengaruh teknologi

	<p>empat kelompok permasalahan dalam perekonomian, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Teori tentang nilai dan harga barang. 2. Teori upah, sewa, bunga, dan laba. 3. Perdagangan bebas. 4. Akumulasi dan pertumbuhan ekonomi. <ul style="list-style-type: none"> • Pandangan kritis yang dikemukakan Ricardo, yakni: <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Tanah Terbatas. 2. Ia menekankan pentingnya pembangunan pertanian. 3. Menekankan pentingnya akumulasi modal peningkatan keuntungan untuk pemupukan modal. 4. Menekankan pentingnya tabungan. 5. Menekankan pentingnya perdagangan luar negeri untuk pemanfaatan sumber daya secara optimum. 6. Teorinya bersifat dinamis karena melihat pengaruh perubahan berbagai variabel dalam pembangunan ekonomi, seperti jumlah penduduk, upah, sewa, dan keuntungan. 	<p>dalam mengatasi masalah <i>diminishing return</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada keadaan stasioner dengan keuntungan yang meningkat, produksi meningkat, dan terjadi pemupukan modal. • Menganggap upah yang tidak akan meningkat karena penambahan jumlah penduduk. • Kebijakan pasar bebas yang tidak pernah ada dalam realitas. • Mengabaikan faktor kelembagaan. • Tanah juga memproduksi selain gandum. • Menganggap modal dan buruh adalah koefisien yang tetap. Padahal, keduanya adalah variabel bebas. • Mengabaikan tingkat suku bunga.
Malthus	Proses pembangunan adalah suatu proses naik turunnya aktivitas ekonomi lebih daripada sekedar lancar tidaknya aktivitas	<ul style="list-style-type: none"> • Stagnasi sekuler tidak melekat pada akumulasi modal karena pada

	<p>ekonomi. Pertumbuhan penduduk saja tidak cukup untuk berlangsungnya pembangunan ekonomi, justru pertumbuhan penduduk adalah akibat dari proses pembangunan. Pertumbuhan penduduk akan meningkatkan kesejahteraan hanya jika pertumbuhan tersebut meningkatkan permintaan efektif.</p>	<p>kenyataannya konsumsi rendah bukanlah suatu gejala tetap, tetapi hanya sementara.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pandangan negatif terhadap akumulasi modal. Menurut kenyataan, akumulasi modal tidak menyebabkan berkurangnya permintaan atas barang-barang konsumen dan turunnya laba.
<p>Arthur Lewis</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pokok masalahnya adalah bagaimana proses pertumbuhan terjadi dalam perekonomian dua sektor, yaitu : <ol style="list-style-type: none"> 1. Sektor tradisional dengan produktivitas rendah dan sumber tenaga kerja yang melimpah. 2. Sektor modern dengan produktivitas tinggi dan sebagai sumber akumulasi modal. 3. Pembentukan modal bergantung pada surplus kapital (modal dibentuk dari laba yang dihasilkan oleh para kapitalis). 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak semua negara terbelakang mempunyai penawaran buruh yang tidak terbatas. • Tingkat upah di sektor kapitalis tidak konstan. Dalam kenyataannya tingkat upah sektor industri di negara terbelakang terus naik sepanjang waktu walaupun terdapat pengangguran terbuka di sektor pedesaan. • Buruh terampil bukan kesulitan sementara. Proses multiplikasi tidak berlangsung di

		<p>negara terbelakang karena proses pembentukan modal akan berhenti sebelum seluruh surplus buruh terserap.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengabaikan permintaan total karena anggapannya bahwa sektor subsisten konsumsinya sangat sedikit. • Mobilitas buruh tidaklah mudah. • Kelompok berpendapatan rendah juga menabung.
Marx	<ul style="list-style-type: none"> • Menurutnya, berdasarkan sejarah perkembangan masyarakat melalui lima tahap, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat kumunal primitif, yang masih menggunakan alat-alat produksi sederhana. 2. Masyarakat perbudakan, adanya hubungan antarpemilik faktor produksi dan orang-orang yang hanya bekerja untuk mereka. 3. Masyarakat feodal, kaum bangsawan memiliki faktor produksi utama yaitu tanah. 	<p>Tidak ada masa dalam sejarah masyarakat yang melalui tahapan evolusi sebagaimana yang dikemukakan Marx. Sebaliknya, sebagaimana sistem yang diyakini oleh Marx terjadi melalui serangkaian tahapan tertentu.</p>

	<p>4. Masyarakat kapitalis, hubungan produksinya didasarkan pada pemilikan individu masing-masing kapitalis terhadap alat-alat produksi.</p> <p>5. Masyarakat sosialis, kepemilikan alat produksi didasarkan atas hak milik sosial hubungan. Tidak ada lagi kelas-kelas dalam masyarakat.</p>	
<p>Neo-klasik</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Analisis yang mendasari pemikiran ini adalah perekonomian berada pada kondisi tenaga kerja penuh '<i>Full Employment</i>' dan tingkat pemanfaatan penuh (<i>full utilization</i>) dari faktor-faktor produksinya. Artinya, perekonomian akan berkembang tergantung pada akumulasi modal, penambahan penduduk, dan kemajuan teknologi. <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya akumulasi kapital merupakan faktor penting dalam perkembangan ekonomi. 2. Perkembangan tersebut merupakan proses yang gradual. 3. Perkembangan merupakan proses yang harmonis dan kumulatif. 4. Merupakan aliran yang optimis terhadap perkembangan ekonomi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kurang menonjolkan analisis permintaan dan penawaran guna menciptakan produk, faktor produksi, dan kurs valuta asing yang tepat guna melangsungkan kegiatan produksi yang efisien. • Kurang mencantumkan teori kelembagaan dan politik. • Teori monopoli neo-klasik di negara berkembang ternyata banyak gagal untuk menyajikan dan menjelaskan mengenai kegiatan sehari-hari dari berbagai perusahaan negara dan swasta yang menjadi pelaku usaha.

	5. Adanya aspek internasional dalam perkembangan tersebut.	
Schumpeter	<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan ekonomi timbul karena faktor-faktor yang bersifat rutin, yakni: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pertumbuhan penduduk dan akumulasi kapital yang berasal dari tabungan rutin masyarakat sedang. 2. Perkembangan ekonomi atau <i>development</i> adalah kenaikan <i>output</i> yang disebabkan karena inovasi. 3. Menurutnya, yang lebih menarik adalah kenaikan <i>output</i> yang bersumber dari perkembangan ekonomi. 4. Perkembangan ekonomi berawal dari suatu lingkungan sosial, politik, dan teknologi yang menunjang kreativitas para wiraswasta. 5. Dalam jangka panjang tingkat hidup orang banyak dapat ditingkatkan, sesuai dengan kemajuan teknologi yang dapat dicapai masyarakat tersebut. • Schumpeter berpendapat mengenai teori kapitalisme, yaitu: 	Dalam era negara sedang berkembang teori kapitalisme schumpeter tidak dapat sepenuhnya terjadi, karena dalam kondisi ini berbagai negara berkembang mengalami situasi ekonomi dan politik yang tidak menentu. Kondisi dapat dipengaruhi oleh faktor dalam atau luar negeri sehingga diperlukan kekuatan lingkungan sosial, politik, teknologi dan inovasi yang lebih baik.

	<ol style="list-style-type: none">1. Negara sedang berkembang mengejar kemajuan ekonomi, sehingga kapitalis sesuai.2. Kapitalis meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat dan sekaligus distribusi pendapatan merata.3. Kapitalis akan runtuh akibat adanya transformasi gradual dalam sistem yang menuju ke arah sosialis.	
--	---	--

BAHAN DISKUSI

1. Mengapa ilmu ekonomi memegang peranan utama dalam upaya memahami berbagai persoalan pembangunan?
2. Uraikanlah menurut Anda, mengapa pemahaman akan makna pembangunan sedemikian penting bagi perumusan kebijakan? Uraikanlah pendapat Anda!
3. Uraikanlah secara singkat berbagai makna teori pertumbuhan dan pembangunan dari teori historis dan analitis. Apa saja kelemahan dan keunggulan dari masing-masing teori tersebut?
4. Bagaimana menurut pendapat saudara tentang pendapat dari mazhab Keynesian yang dikemukakan Harrod-Domar? Berikan contoh untuk fungsi produksi yang digunakan!
5. Apa letak perbedaan teori pertumbuhan dan pembangunan yang dikemukakan pada mazhab klasik dan neo-klasik? Diskusikan dengan teman saudara mengenai teori mana yang lebih baik digunakan di Indonesia!

BAB III

KOMPONEN-KOMPONEN PEMBANGUNAN EKONOMI

Apa saja yang diperlukan agar terjadi pertumbuhan ekonomi? Setiap perekonomian selalu mengupayakan terjadinya pertumbuhan ekonomi setiap tahun. Jika terjadi pertumbuhan ekonomi, maka jumlah barang dan jasa yang dihasilkan meningkat terlihat dari peningkatan angka PDB. Adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pula kesejahteraan ekonomi masyarakat dapat mengalami peningkatan. Ada beberapa komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi yang perlu memperoleh perhatian dari setiap negara. Komponen-komponen tersebut, yaitu:

1. Akumulasi modal yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, modal, dan sumber daya manusia.
2. Pertumbuhan penduduk yang beberapa tahun selanjutnya akan memperbanyak jumlah angkatan kerja.
3. Kemajuan teknologi (Todaro, 2013: 137).

A. AKUMULASI MODAL

Pada umumnya, negara-negara berkembang memiliki kelangkaan modal. Hal tersebut karena rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya tabungan di negara berkembang adalah akibat dari sebagian besar pendapatan yang habis untuk konsumsi. Kurangnya tabungan tersebut, juga terjadi karena adanya *international demonstration effect*, yaitu keinginan untuk meniru konsumsi negara-negara maju.

Tambahan modal yang banyak tidak selalu menyebabkan terjadinya proses perkembangan ekonomi. Boleh jadi, tambahan modal yang sedikit saja sudah dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi dengan cepat, ketika modal tersebut diperoleh dari sumber yang tepat dan dialokasikan secara tepat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa modal itu meru-

pakan hasil ketimbang sebab perkembangan ekonomi. Dengan kata lain, perkembangan ekonomi akan selalu menambah jumlah modal, sedangkan penambahan modal tidak selamanya meningkatkan kemajuan ekonomi. Apalagi jika penambahan modal dilakukan dengan menambah hutang yang tidak dilakukan secara cermat. Pembentukan modal sebenarnya lebih ditentukan oleh adanya permintaan dari para wiraswasta yang bersemangat, daripada faktor pemupukan modal itu sendiri. Ada berbagai sumber pembentukan modal, yakni:

1. Tabungan sukarela (*voluntary saving*).
2. Pajak (*forced saving*).
3. Tabungan pemerintah.
4. Pinjaman pemerintah dapat berasal dari luar negeri (*foreign loan*) maupun dari dalam negeri.
5. Inflasi.
6. Investasi asing (PMA).

Hal di atas menyebutkan bahwa salah satu cara pembiayaan pembangunan adalah dengan inflasi. Bagaimana inflasi dapat dianggap sebagai salah satu sumber pembentukan modal? Inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan tingkat harga umum dan terjadi secara terus menerus. Adanya inflasi menyebabkan para pelaku ekonomi memperoleh barang dengan jumlah yang lebih sedikit, walaupun jumlah pengeluarannya sama. Dengan kata lain, konsumsi riilnya berkurang. Dengan demikian, inflasi dapat diartikan sebagai pajak yang tidak tampak.

Setelah modal diperoleh, bagaimana modal tersebut akan digunakan? Penggunaan modal tergantung pada beberapa kriteria, yakni:

1. Kriteria neraca pembayaran, '*balance of payments criteria*'. Dalam pengertian ini, investasi hendaknya digunakan untuk menaikkan volume ekspor dengan jalan memproduksi barang-barang substitusi impor, atau untuk meningkatkan produksi barang-barang yang akan diekspor.

2. Kriteria produktivitas sosial marginal, '*marginal social productivity criteria*'. Pada kriteria ini, investasi digunakan untuk proyek-proyek yang diharapkan memberi hasil paling tinggi atau investasi di proyek-proyek yang paling menguntungkan dan memiliki ICOR yang paling rendah.
3. Kriteria intensitas faktor-faktor produksi (*factor intensity criteria*). Investasi dilaksanakan pada proyek-proyek dengan intensitas kapital yang rendah dan kapital yang sedikit saja, sudah dapat menghasilkan *output* yang banyak.
4. Kriteria bagian investasi kembali, '*reinvestment quotient criteria*'. Kriteria ini berusaha agar tingkat investasi per kapita selalu bertambah besar, sehingga kriteria tersebut berupaya memaksimalkan perbandingan kapital tenaga kerja (*capital labor ratio*) pada masa yang akan datang dan memaksimalkan produksi per tenaga kerja.
5. Kriteria operasional, '*operational criteria*'. Penggunaan kriteria ini, jika akan melakukan investasi. Sda tiga hal yang perlu diperhatikan, yaitu:
 - a. Tingkat perputaran kapital (*capital turnover*) dari investasi tersebut.
 - b. Pengaruhnya terhadap neraca pembayaran internasional.
 - c. Keuntungan sosial yang akan timbul (*social profitability*).
6. Kriteria perbandingan biaya manfaat, '*benefit-cost ratio*'. Penggunaan kriteria ini, investasi yang diadakan harus memiliki perbandingan manfaat dan biaya yang lebih besar dari satu. Arti manfaat di sini adalah manfaat bersih yaitu total manfaat dikurangi kerugian selain dari kapital. Sehubungan dengan besarnya investasi yang dilakukan, ada dua teori yang dapat dipilih. Teori-teori tersebut, yaitu:
 - a. Teori usaha perlahan-lahan (*gradualism*). Teori ini berpendapat bahwa negara terbelakang sebaiknya mengadakan industrialisasi secara perlahan untuk menghindari risiko yang terlalu besar.

Menurut teori ini, investasi seyogyanya dilakukan pada sektor yang terpilih.

- b. Teori dorongan besar, '*Big Push Theory*'. Investasi harus dilaksanakan secara besar-besaran di semua bidang yang bertujuan untuk memaksimalkan *output* dan menghilangkan kemiskinan. Titik berat teori ini adalah pada *economic of scale* yang berupa produksi masa. Tantangan dari teori ini adalah dibutuhkannya modal yang sangat besar, padahal modal adalah langka di negara-negara berkembang.

Sehubungan dengan *big push theory*, maka ada suatu doktrin yang disebut sebagai *Doktrin Pembangunan Seimbang* yang didukung oleh Rosenstein Rodan, Ragnar Nurkse, dan Arthur Lewis. Doktrin ini meyakini bahwa perkembangan ekonomi akan berhasil apabila dalam proses pembangunan terdapat keseimbangan antara sektor industri dan sektor pertanian, antara sektor dalam negeri dan sektor ekspor, antara daerah perkotaan dan daerah pedesaan. Menurut doktrin ini, dengan adanya pembangunan yang seimbang antara semua bidang dan daerah, maka pasar akan semakin luas. Ini karena semakin besarnya ketergantungan masing-masing sektor. Dengan demikian, persoalan perkembangan yang seimbang terletak pada hubungan yang bersifat komplementer.

Kebalikan dari doktrin pembangunan seimbang adalah konsep *pertumbuhan tidak berimbang* yang dikemukakan oleh Hirschman. Menurut teori ini, pembangunan tidak harus dilakukan secara besar-besaran di semua sektor dan semua daerah, tetapi hanya pada sektor terpilih serta daerah yang terpilih agar tercipta *bottleneck* dan terjadi kelangkaan. Menurut teori ini, adanya *bottleneck* dan kelangkaan karena pembangunan yang tidak seimbang justru merupakan dorongan yang kuat untuk kemajuan teknologi.

B. PENDUDUK DAN TENAGA KERJA

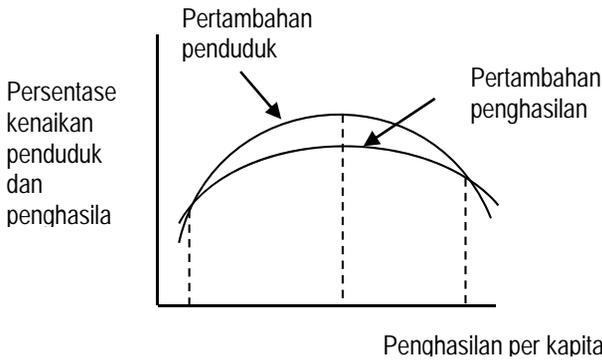
Masalah kependudukan yang dihadapi oleh negara maju dan negara berkembang berbeda. Jika beberapa negara maju menghadapi struktur penduduk tua, justru di beberapa negara berkembang mengalami masalah dengan laju peningkatan jumlah penduduk. Selain masalah pesatnya peningkatan jumlah, ada beberapa aspek kependudukan lain yang dihadapi oleh negara-negara berkembang. Aspek-aspek tersebut adalah:

1. Adanya struktur umur yang tidak *favorable*.
2. Distribusi penduduk yang timpang.
3. Terbatasnya tenaga kerja terdidik dan terlatih.

Berkaitan dengan kependudukan, tujuan pembangunan adalah untuk mengoptimalkan pendapatan riil per kapita. Penduduk sebenarnya memiliki dua peranan dalam pembangunan. Selain sebagai faktor produksi, penduduk juga merupakan pasar bagi produk-produk yang dihasilkan suatu perekonomian. Pendapat Prof. Hansen mengenai stagnasi sirkuler mengatakan bahwa penambahan penduduk justru akan memperbesar permintaan agregat, terutama permintaan untuk investasi. Keynes juga melihat bahwa penambahan penduduk berarti terdapat peningkatan daya beli pula karena penambahan jumlah penduduk akan memperbesar permintaan agregat. Selain meningkatkan permintaan agregat, penambahan penduduk akan mendorong investasi karena akibat dari penambahan penduduk tersebut dapat terjadi peningkatan kebutuhan perumahan dan fasilitas umum.

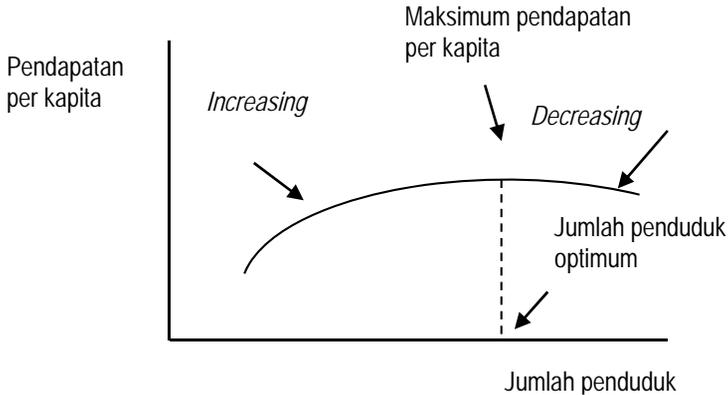
Berbeda dengan di atas, pada negara-negara berkembang akan berlaku keadaan yang sebaliknya. Perkembangan jumlah penduduk yang tinggi justru akan menghambat perkembangan ekonomi. Thomas Robert Malthus berpendapat bahwa akan ada perlombaan antara tingkat pertumbuhan *output* dengan tingkat perkembangan penduduk, dan akhirnya akan dimenangkan oleh perkembangan penduduk. Lanjut Malthus, negara-negara sedang berkembang ditandai oleh apa yang disebut dengan “perangkap keseimbangan pendapatan yang rendah, *low level equilibrium*”

trap, atau *the malthusian population trap*” yang berarti pada tingkat penghasilan subsisten. Jika terjadi kenaikan yang sedikit saja, maka akan mengakibatkan penduduk berkembang cepat dari biasanya dan lebih cepat pula dari perkembangan tingkat penghasilan. Akibatnya, pendapatan per kapita akan turun lagi pada tingkat yang jauh lebih rendah dari semula. Akan tetapi, jika penghasilan itu turun lagi di bawah tingkat subsisten, maka penduduk akan turun jumlahnya dengan tingkat yang lebih cepat dari tingkat penurunan jumlah penghasilan tersebut. Akibatnya, akan menaikkan penghasilan per kapita lagi dan kembali pada tingkat penghasilan semula pada tingkat yang subsisten.



Gambar 3.1
Pertambahan Penduduk dan Pertambahan Penghasilan.

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah berapa jumlah penduduk yang seharusnya dimiliki oleh suatu negara? Teori penduduk optimum menjelaskan tentang jumlah penduduk yang dapat menghasilkan tingkat upah riil atau tingkat penghasilan per kapita yang maksimum sebagai berikut:



Gambar 3.2
Teori Penduduk Optimum.

Inti dari teori tersebut mengatakan bahwa apabila tingkat teknologi, sumber daya alam, dan selera tidak mengalami perubahan, maka akan terdapat suatu jumlah penduduk yang dapat memaksimalkan pendapatan riil per kapita. Jika penduduk berkurang dan menjadi lebih sedikit dari jumlah penduduk optimum, maka pasar menjadi semakin sempit. Sebaliknya, jika penduduk bertambah dan menjadi lebih besar daripada jumlah penduduk optimum, maka akan berlaku *law of diminishing return*. Apabila jumlah penduduk bertambah, tetapi belum mencapai jumlah optimum, maka akan berlaku *increasing return*.

C. TEKNOLOGI DAN FUNGSI WIRASWASTA

Perkembangan ekonomi salah satunya adalah hasil dari penerapan teknologi. Dengan demikian, harus ada orang yang membuat keputusan untuk mengganti cara-cara lama dengan cara baru yang disebut dengan inovasi. Hal tersebut juga disebut dengan *entrepreneurial function*, 'fungsi

wiraswasta'. Dengan kata lain, fungsi wiraswasta adalah mengadakan tindakan yang menghasilkan kombinasi baru dari faktor-faktor produksi dalam proses yang produktif. Ada beberapa macam tipe wiraswasta berdasarkan tindakannya, yaitu:

1. *Innovating entrepreneur*. Tipe ini biasanya adalah orang-orang yang bersifat agresif dalam percobaan dan ingin atau tertarik pada kemungkinan untuk dapat dipraktikkan.
2. *Initiative entrepreneur*. Tipe ini adalah orang-orang yang siap menggunakan inovasi yang ditemukan *innovating entrepreneur*.
3. *Fabian entrepreneur*. *Entrepreneur* ini adalah *entrepreneur* yang sifatnya sangat hati-hati dan ragu-ragu. Ia akan meniru bila inovasi itu jelas-jelas menguntungkan.

Ada beberapa motif inovasi di negara-negara Barat, yakni:

1. Dorongan untuk mencari laba.
2. Mempertahankan organisasi dan motif untuk dapat hidup berkembang dalam persaingan.
3. Mempertahankan kedudukan sebagai manajer atau untuk menjaga prestise.
4. Keinginan untuk menemukan cara kerja yang lebih baik.

Adanya inovasi dapat meningkatkan perkembangan ekonomi. Meskipun demikian, seringkali terdapat beberapa hambatan dalam menggunakan hasil penemuan baru tersebut. Hambatan-hambatan dalam penggunaan hasil temuan tersebut dapat digolongkan dalam tiga faktor, yakni:

1. Faktor ekonomis
2. Faktor sosial budaya
3. Faktor kemungkinan adanya tekanan dari beberapa orang yang berkuasa.

Oleh karena adanya hambatan tersebut, maka dalam penerapan inovasi di negara-negara berkembang ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan agar inovasi tersebut dapat diterapkan. Beberapa prinsip tersebut adalah:

1. Harus memiliki pemahaman budaya masyarakat setempat.
2. Adanya pemahaman bahwa inovasi tersebut merupakan kebutuhan masyarakat setempat, bukan kebutuhan orang lain.
3. Teknik yang baru hendaknya disesuaikan dengan prinsip-prinsip masyarakat setempat.
4. Penyesuaian harus dilakukan secara perlahan-lahan.
5. Memelihara hubungan baik dengan pemuka masyarakat setempat.

Adanya akomodasi dengan budaya setempat, maka penerapan inovasi yang dilakukan tidak akan berbenturan dengan masyarakat dan justru dapat memberi manfaat bagi kemajuan ekonomi.

BAHAN DISKUSI

1. Beri contoh dan jelaskan pentingnya pemahaman budaya lokal dalam menerapkan kebijakan pembangunan ekonomi!
2. Menurut Anda, Indonesia melakukan kebijakan pembangunan yang bersifat *gradualis* atau *big push*? Jelaskan jawaban saudara tersebut dengan contoh implementasi kebijakan yang telah dilakukan! Menurut Anda, mengapa itu yang dipilih?
3. Jelaskan apa pentingnya *entrepreneur* dalam pembangunan ekonomi! Berilah contoh peran *entrepreneur* dalam perkembangan ekonomi suatu bangsa!
4. Mengapa investasi asing (PMA) dianggap sebagai salah satu sumber modal pembangunan? Apa kelebihan dan kekurangan PMA sebagai sumber modal? Jelaskan jawaban Anda dengan contoh riil!
5. Jelaskan tentang teori penduduk optimal! Menurut Anda, bagaimana relevansi kondisi kependudukan di negara-negara maju dan di negara-negara berkembang?

BAB IV

INDIKATOR-INDIKATOR PEMBANGUNAN

A. SEKILAS INDIKATOR PEMBANGUNAN

Suatu negara yang telah melaksanakan pembangunan tentu ingin mengetahui sejauh mana keberhasilan pembangunan yang telah dilaksanakan tersebut. Dalam jangka panjang, proses peningkatan pendapatan per kapita saja tidak cukup untuk membuat kita mengatakan bahwa perekonomian telah berkembang. Perbaikan struktur sosial, sistem kelembagaan “aturan organisasi”, perubahan sikap, dan perilaku masyarakat juga merupakan bagian penting dari pembangunan ekonomi.

Dalam paradigma tradisional, pembangunan ekonomi biasanya memiliki pengertian yang sama dengan pertumbuhan ekonomi. Dalam konsep ini, pertumbuhan GNP (*Gross National Product*) digunakan sebagai indikator pembangunan. Namun, dalam paradigma baru sejak 1950 hingga akhir 1960-an, kondisi perekonomian menunjukkan bahwa kenaikan GNP tidak serta merta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan (*development*) adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan, teknologi, kelembagaan, dan budaya (Alexander, 1994). Proses pembangunan terjadi pada semua aspek kehidupan masyarakat, baik aspek ekonomi, sosial, budaya, politik, dan lainnya, baik pada tingkat makro (nasional) maupun mikro (masyarakat/kelompok). Arti penting dari pembangunan adalah adanya kemajuan (*progress*), pertumbuhan, dan diversifikasi.

Dengan melihat definisi tersebut, maka ada beberapa ukuran/ indikator yang dapat dipakai untuk melihat keberhasilan pembangunan. Indikator pembangunan merupakan tolak ukur yang digunakan dalam mengukur performa suatu negara dalam pencapaian pembangunannya, serta perbandingan terhadap negara-negara lain. Manfaat dilakukannya

identifikasi dari indikator pembangunan adalah untuk membandingkan kemajuan pembangunan atau tingkat kesejahteraan masyarakat antar-wilayah atau negara dan untuk mengetahui model pembangunan setiap negara atau wilayah.

B. KLASIFIKASI INDIKATOR PEMBANGUNAN

Pada buku ini, indikator pembangunan akan dibedakan dalam dua macam indikator, yaitu indikator ekonomi dan indikator sosial.

1. INDIKATOR EKONOMI

Indikator pembangunan di bidang ekonomi secara parsial menunjukkan adanya kemajuan dan perkembangan yang terjadi di berbagai hal yang berkaitan dengan ekonomi. Penggunaan indikator dan variabel pembangunan di bidang ekonomi dapat berbeda dari satu negara ke negara lain. Di negara-negara yang masih miskin, kemajuan dan pembangunan masih diukur dengan melihat ketersediaan serta terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat. Sementara, di negara-negara yang lebih maju, indikator pembangunan mungkin diukur dengan ketersediaan atau terpenuhinya kebutuhan dasar lain di luar kebutuhan primer (Tikson, 2005). Ukuran keberhasilan pembangunan dari sisi ekonomi meliputi pendapatan per kapita, laju pertumbuhan ekonomi, dan *purchasing power parity*.

a. Pendapatan Per kapita

Pendapatan per kapita adalah sama dengan pendapatan per penduduk. Besarnya pendapatan per kapita suatu negara dapat mencerminkan kemakmuran penduduk di negara tersebut. Pendapatan per kapita selalu diharapkan mampu mendefinisikan mengenai laju pertumbuhan kesejahteraan masyarakat pada tiap-tiap negara, serta dapat menggambarkan perubahan corak perbedaan tingkat kesejahteraan yang ada, sehingga pertambahan pendapatan per kapita mencerminkan peningkatan kemakmuran. Pendapatan per kapita ini, juga dapat dipakai untuk

membedakan tingkat kemajuan ekonomi antara negara yang satu dengan lainnya. Bank Dunia menggunakan komponen pendapatan per kapita sebagai indikator yang digunakan untuk mengklasifikasi peringkat pembangunan suatu negara terhadap negara lain. Pembagiannya adalah sebagai berikut:

1) **Low-Income Countries (LIC)**

Negara-negara yang termasuk dalam kelompok *Low-Income Countries* (LIC) adalah semua negara yang memiliki pendapatan per kapita kurang atau sama dengan US\$765.

2) **Middle-Income Countries (MIC)**

Middle Income Countries ini terbagi atas *Lower Middle Income* (LMC) dan *Upper Middle Income* (UMC). Negara yang termasuk dalam kelas LMC adalah negara-negara yang pendapatan per kapitanya antara US\$ 766 hingga US\$ 3.035. Sedangkan, negara yang termasuk dalam kelas UMC adalah negara-negara yang pendapatan per kapitanya antara US\$ 3.036 hingga US\$ 9.385.

3) **High-Income Countries (HIC)**

Negara-negara yang termasuk dalam golongan negara berpendapatan tinggi, '*high-income countries*', adalah negara yang pendapatan per kapitanya sebesar atau melebihi US\$ 9386.

Dalam perhitungan pendapatan per kapita ada dua variabel yang perlu diperhatikan, yaitu pendapatan nasional dan jumlah penduduk. Rumus penghitungan pendapatan per kapita adalah sebagai berikut:

$$\text{Pendapatan Per kapita} = \frac{\text{Pendapatan Nasional}}{\text{Jumlah Penduduk}}$$

Contoh: Suatu negara A memiliki pendapatan nasional sebesar 15 miliar rupiah dalam satu tahun. Jumlah penduduk

di wilayah tersebut mencapai 200 jiwa. Perhitungan pendapatan per kapitanya adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Pendapatan Per kapita} &= \frac{\text{Rp. 15.000.000.000}}{200} \\ &= \text{Rp. 75.000.000} \end{aligned}$$

Dari rumus di atas, dapat dilihat bahwa pendapatan per kapita dapat dihitung dari nilai pendapatan nasional yang dibagi dengan banyaknya penduduk. Jika suatu negara memiliki pendapatan nasional sebesar Rp. 15.000.000.000 per tahun dengan jumlah penduduk 200 jiwa, maka pendapatan per kapitanya adalah Rp. 75.000.000 per tahun. Peningkatan kemakmuran dapat dicapai hanya jika pertambahan pendapatan nasional lebih besar dari peningkatan pertambahan penduduknya.

Tabel 4.1. Pendapatan Per Kapita di 10 Negara Berkembang Tahun 2019

No.	Negara	Pendapatan Per Kapita (US \$/ Dollar)
1	Argentina	9.729
2	Bulgaria	9.025
3	Tiongkok	8.254
4	Iran	6.949
5	Thailand	6.503
6	Peru	6.487
7	Indonesia	4.451
8	Filipina	3.338
9	Ukrania	3.225
10	Mesir	3.009

Sumber: World Development Report, 2020.

Tabel 4.2. 10 Negara dengan Pendapatan Per Kapita Tertinggi Tahun 2019

No.	Negara	Pendapatan Per Kapita (US \$/ Dollar)
1	Luksemburg	113.196,49
2	Swiss	83.716,8
3	Norwegia	77.975,43
4	Irlandia	77.777,21
5	Qatar	69.687,55
6	Amerika Serikat	65.111,6
7	Singapura	63.987,07
8	Denmark	59.795,27
9	Australia	53.825,16
10	Belanda	52.367,85

Sumber: World Development Report, 2020.

Meskipun banyak ekonom menilai bahwa pendapatan per kapita merupakan variabel yang sangat penting dan mampu mewakili indikator keberhasilan pembangunan ekonomi, tetapi perlu juga dipahami bahwa penilaian keberhasilan pembangunan dengan menggunakan perhitungan pendapatan per kapita ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Terdapat kritik yang menggambarkan kelemahan pendekatan pendapatan per kapita dalam menjadi indikator pembangunan, di antaranya:

- a) Dalam penggunaan PDB per kapita sebagai ukuran kualitas hidup sangat bergantung kepada nilai moneter dan harga. Salah satu alasan mengapa PDB per kapita sering diunggulkan dibandingkan dengan ukuran lainnya adalah kesederhanaan dalam penghitungan, tetapi dalam praktiknya, perhitungan PDB memiliki masalah yang jauh lebih rumit. Meskipun berbagai transaksi dalam suatu perekonomian banyak yang memiliki harga dan kuantitas yang jelas, tetapi di beberapa negara berkembang banyak

aktivitas sehari-hari masyarakat yang terkadang tidak tergambar dengan jelas dalam perhitungan pendapatan nasional (Stiglitz, 2010). Hal ini juga diperparah dengan kelemahan dalam metodologis di mana perbedaan-perbedaan antarnegara terkait struktur penduduk, distribusi pendapatan, dan metode perhitungan pendapatan juga diabaikan. Pada negara-negara berkembang banyak aktivitas yang bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan hidup, tetapi tidak dihitung dalam pendapatan nasional, seperti pembangunan rumah yang menggunakan cara gotong royong, pemenuhan kebutuhan dapur yang dicukupi dengan hasil dari kebun sendiri, dan lain-lain. Adanya aktivitas ekonomi yang luput dari perhitungan tersebut, menyebabkan rendahnya besaran pendapatan nasional dan selanjutnya tecermin pada nilai pendapatan per kapita juga kecil.

- b) Perbandingan kesejahteraan ekonomi antarnegara dengan menggunakan indikator GNP per kapita seringkali menyesatkan. Hal tersebut karena adanya perbedaan nilai mata uang masing-masing negara. Adanya konversi penghasilan suatu negara ke dalam satu mata uang yang sama, juga tidak mencerminkan kemampuan relatif daya beli mata uang yang berlainan, sehingga muncul kesalahan saat dilakukan perbandingan kinerja antarnegara. Oleh karena itu, muncul konsep *purchasing power parity* (PPP) yang digunakan sebagai alat konversi GNP dalam mata uang lokal ke dalam mata uang dollar AS. Penyesuaian data GNP dengan menggunakan PPP akan mencerminkan daya beli satu unit mata uang lokal untuk membeli barang dan jasa di negara tersebut, sehingga mungkin lebih rendah atau lebih tinggi daya belinya untuk membeli

barang dan jasa di negara lain pada kurs valas yang berlaku. Daya beli mata uang NSB biasanya lebih tinggi dibanding dengan kurs resmi. Hal tersebut terjadi karena banyaknya barang dan jasa yang dapat dipenuhi di negara berkembang tanpa adanya transaksi. Pada negara-negara yang harga domestiknya relatif rendah, GNP per kapita menurut PPP pada umumnya lebih tinggi dibanding GNP per kapita dengan kurs resmi. Nilai GNP per kapita dengan PPP diperoleh dengan memasukkan faktor konversi tertentu yang didesain untuk menyamakan daya beli mata uang masing-masing negara. Faktor konversi yang tidak lain adalah PPP, yakni jumlah unit mata uang suatu negara yang diperlukan untuk membeli sejumlah barang dan jasa di pasar domestik yang sama dengan daya beli satu dollar di AS.

Namun, di balik beberapa kelemahannya terdapat pula kelebihan dalam menggunakan pendekatan pendapatan per kapita ini, yaitu bahwa sejauh ini pendekatan pendapatan per kapita masih menjadi indikator yang paling mudah digunakan dan mendekati pendekatan yang dapat dihitung secara matematis mendekati kondisi yang terjadi dalam perekonomian suatu negara. Selain itu, pendekatan ini juga fokus kepada tujuan utama dari pembangunan, yaitu peningkatan taraf hidup dan pemberantasan kemiskinan.

b. Struktur Ekonomi

Pembangunan ekonomi yang terjadi di suatu negara berkaitan dengan bagaimana struktur ekonomi yang ada di negara tersebut. Struktur ekonomi akan mengalami perkembangan seiring dengan berkembangnya pembangunan ekonomi. Berkembangnya perekonomian suatu wilayah atau negara akan mengakibatkan terjadinya perubahan peranan setiap sektor, yang berakibat adanya perubahan pada struktur ekonomi wilayah atau negara tersebut. Secara umum, transformasi struktur ekonomi biasanya tecermin dari proses perubahan struktur perekonomian, dari sektor pertanian ke sektor industri atau jasa, yakni transformasi dari masing-masing perekonomian mengalami kondisi yang berbeda-beda.

Ada kecenderungan sebagai suatu hipotesis yang menyatakan bahwa semakin tinggi laju pertumbuhan ekonomi rata-rata per tahun, menyebabkan semakin tinggi atau semakin cepat proses peningkatan pendapatan masyarakat per kapita, maka akan semakin cepat pula dalam mendorong terjadinya perubahan struktur ekonomi. Kondisi ini akan semakin mungkin terjadi apabila faktor-faktor penentu lain mendukung proses tersebut, seperti tenaga kerja, bahan baku, dan teknologi tersedia dengan baik di pasaran.

Perubahan struktur ekonomi biasa juga disebut dengan transformasi struktural. Transformasi struktural dapat dilihat pada berubahnya nilai *output* atau nilai tambah dari setiap sektor dalam pembentukan PDB atau pendapatan nasional. Perubahan struktur ekonomi daerah akan berpengaruh terhadap struktur penyerapan tenaga kerja dan pada akhirnya akan berpengaruh pula terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat.

2. INDIKATOR SOSIAL

Selain indikator ekonomi, keberhasilan pembangunan harus pula dilihat dari sisi sosial. Peningkatan ukuran ekonomi tidak akan ada artinya jika dari sisi sosial tidak terjadi peningkatan. Selain itu, indikator sosial ini disusun karena kelemahan GNP per kapita sebagai pengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Kelemahan umum dari GNP per kapita sebagai tolok ukur kesejahteraan adalah karena tidak memasukkannya produksi yang tidak melalui pasar, seperti dalam perekonomian subsisten, jasa ibu rumah tangga, transaksi barang bekas, kerusakan lingkungan, dan masalah distribusi pendapatan.

Ada berbagai indikator kunci pembangunan sosial ekonomi yang disusun *United Nations Research Institute on Sosial Development* (UNRISD) berikut:

- ✓ Tingkat harapan hidup.
- ✓ Konsumsi protein hewani per kapita per hari.
- ✓ Sirkulasi surat kabar per 1000 penduduk.
- ✓ Konsumsi listrik KWH per kapita.
- ✓ Persentase manufaktur dalam GDP, dan lain-lain.

Selain itu, ada beberapa indeks yang dikemukakan Cynthia Morris (1967) dan Irma Adelman yang dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana perkembangan pembangunan yang telah dilakukan oleh suatu negara. Indeks-indeks tersebut adalah:

a. Indeks Kualitas Hidup/Physical Quality Life Index (PQLI)

Indeks Kualitas Hidup (IKH) atau biasa juga disebut dengan Physical Quality of Life Index (PQLI), merupakan indikator kualitas penduduk berupa metode pengukuran kesejahteraan penduduk yang dikenalkan Morris. Metode ini, mengesampingkan pendapatan nasional yang merupakan gabungan dari beberapa indikator kesejahteraan rakyat sektoral. Oleh karena itu, indikator ini sangat bermanfaat dalam mengukur hasil kebi-

jakan umum yang bersifat lintas sektoral. Indikator ini juga digunakan biro pusat statistik dalam mengukur indeks mutu hidup dalam usaha membandingkan tingkat kesejahteraan. Secara umum, PQLI adalah indeks non-ekonomi yang merupakan kombinasi dari tiga indikator, yaitu:

- 1) Tingkat harapan hidup satu tahun (*Life Expectancy/LE*)
- 2) Angka kematian Bayi (*Infant Mortality Rate/IMR*)
- 3) Tingkat melek huruf (*Literacy Rate/LR*).

Menurut Morris dan MC Alpin (1982), PQLI secara keseluruhan dapat menggambarkan hasil pembangunan sosial ekonomi. Jumlah kematian bayi dan harapan hidup satu tahun dapat digunakan sebagai indikator dari kemajuan segala aspek di bidang sosial, seperti gizi, kesehatan, pendapatan, dan dampak lingkungan. Meskipun demikian, dua indikator ini mencerminkan aspek interaksi sosial yang berbeda. Kematian bayi merupakan gambaran sensitif dari tingkat ketersediaan air bersih, kondisi perumahan, dan kesejahteraan ibu. Sementara itu, harapan hidup satu tahun mencerminkan tingkat gizi suatu rumah tangga dan bagaimana kondisi lingkungan yang ada disekitarnya. Selanjutnya, indikator tingkat melek huruf merupakan indeks yang menggambarkan tingkat keterampilan dan pendidikan masyarakat.

Langkah-langkah untuk menghitung PQLI adalah:

- 1) Hitung persentase penduduk yang melek huruf (tingkat melek huruf) dengan menggunakan rumus:

$$AMH_{15+}^t = \frac{MH_{15+}^t}{P_{15+}^t} \times 100$$

Keterangan:

AMH = Rasio angka melek huruf.

- MH = Jumlah penduduk 15 tahun ke atas yang melek huruf tahun ke-t.
 P = Jumlah penduduk 15 tahun ke atas pada tahun ke-t.

2) Hitung angka kematian bayi (dari 1000) kelahiran dengan menggunakan rumus:

$$\text{IMR} = \frac{299 - \text{Angka kematian bayi per 1000 kelahiran}}{2,22}$$

Keterangan:

- IMR = Tingkat *Infant Mortality Rate*
 229 = Indikator tingkat kematian maksimum.
 2,22 = Pembagi jika terdapat tingkat kematian bayi terendah.

3) Hitung angka harapan hidup dengan menggunakan rumus:

$$\text{LE} = \frac{\text{IH} - 28}{0,39}$$

Keterangan:

- IH = Harapan hidup per satu tahun kelahiran di suatu negara.
 28 = Tingkat harapan hidup terendah di Guinea-Bissau pada 1950 (dapat disesuaikan dengan kondisi negara yang akan diukur).
 0,39 = Angka yang menunjukkan bahwa bila terjadi kenaikan umur harapan hidup sebesar 0,39 tahun, maka akan menghasilkan 1 poin angka indeks.

Sumber: Modul Universitas terbuka.

Jika tiga indeks tersebut sudah dihitung dan ditemukan nilainya, maka untuk menghitung nilai PQLI dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{PQLI} = \frac{\text{AMH} + \text{IMR} + \text{LE}}{3}$$

Skala PQLI adalah antara 1 sampai 100, angka 1 adalah kinerja terburuk dan angka 100 menunjukkan kinerja terbaik.

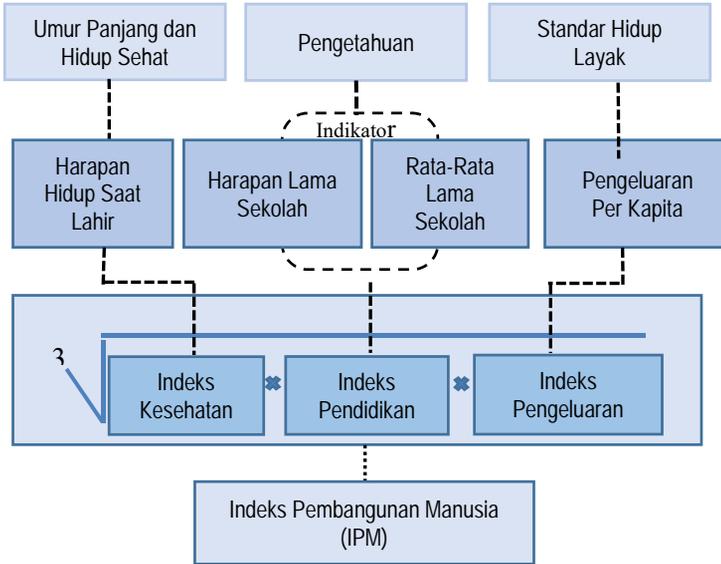
Beberapa kritikan muncul terhadap indeks PQLI ini. Beberapa ahli ekonomi mengatakan bahwa hubungan antara indikator PQLI dan indeks gabungan pendapatan per kapita sangat erat, sehingga menunjukkan hal yang tidak berbeda. Kebanyakan negara yang pendapatannya per kapitanya tinggi akan mempunyai indeks PQLI yang tinggi pula, sehingga beberapa ekonom menyatakan bahwa indeks PQLI tidak menunjukkan sesuatu yang baru.

b. Indeks Pembangunan Manusia/*Human Development Index* (HDI)

United Nations Development Programme (UNDP) memperkenalkan IPM pertama kali pada 1990. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM dibentuk dari tiga indikator yang terdiri dari:

- 1) Umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*).
- 2) Pengetahuan (*knowledge*).
- 3) Standar hidup layak (*decent standard of living*).

Pada 2010, UNDP menggunakan indikator baru dapat digambarkan melalui diagram berikut:



Gambar 4.1

Bagan Metode Perhitungan Indeks Pembangunan Manusia
(Sumber: BPS).

Untuk menghitung ketiga indeks komponen tersebut, dapat dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

1) Indeks Kesehatan

$$I_{Kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{max} - AHH_{min}}$$

AHH merupakan Angka Harapan Hidup yang dikeluarkan secara rutin oleh badan pusat statistik.

2) Indeks Pengetahuan

$$I_{Pengetahuan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$$

Indeks HLS adalah indeks Harapan Lama Sekolah yang dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{\min}}{HLS_{\max} - HLS_{\min}}$$

Indeks RLS atau Rata- Rata Lama Sekolah dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{\min}}{RLS_{\max} - RLS_{\min}}$$

3) Indeks Pengeluaran

$$I_{Pendapatan} = \frac{\ln(Pendapatan) - \ln(Pendapatan_{\min})}{\ln(Pendapatan_{\max}) - \ln(Pendapatan_{\min})}$$

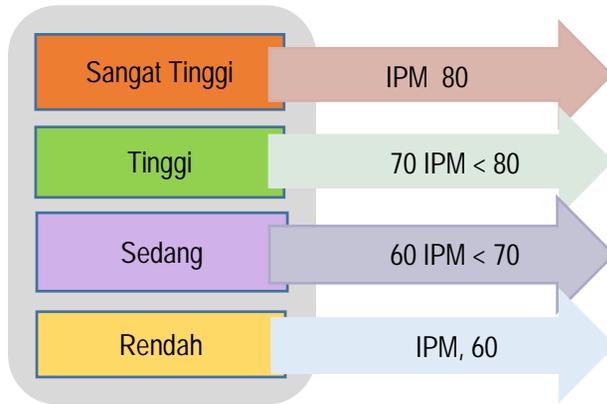
Jika tiga indikator tersebut sudah dapat ditentukan nilainya, maka untuk menghitung nilai indeks pembangunan manusia dapat digunakan rumus:

$$IPM = \sqrt[3]{I_{Kesehatan} \times I_{Pendidikan} \times I_{Pengeluaran}}$$

Sementara itu, jika ingin menghitung tingkat pertumbuhan IPM maka dapat menggunakan rumus berikut:

$$PertumbuhanIPM = \frac{(IPM_t) - (IPM_{t-1})}{IPM_{t-1}} \times 100$$

Capaian Indeks Pembangunan Manusia dapat dikategorikan kepada beberapa klasifikasi sebagai berikut:



Gambar 4.2
Klasifikasi Capaian Indeks Pembangunan Manusia
(Sumber: BPS).

Sejak 2015, Indonesia fokus pada pembangunan manusia yang berorientasi pada tataran global dengan mengacu pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau lebih dikenal sebagai *Sustainable Development Goals* (SDGs). Selain itu, bagi Indonesia IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU) (BPS, 2018).



Gambar 4.3
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
(Sumber: BPS, 2018).

Pada tujuan pembangunan berkelanjutan nasional Indonesia, pembangunan manusia tecermin dalam tujuan ketiga, yaitu *good health and wellbeing*. Tujuan keempat yaitu *quality education*, serta tujuan kedelapan yaitu *decent work and economic growth*.

Tabel 4.3. Daftar Indeks Pembangunan Manusia Indonesia Tahun 2017-2019

Provinsi	2017	2018	2019
Aceh	71,90	71,19	70,60
Sumatera Utara	71,74	71,18	70,57
Sumatera Barat	72,39	71,73	71,24
Riau	73,00	72,44	71,79
Jambi	71,26	70,65	69,99
Sumatera Selatan	70,02	69,39	68,86
Bengkulu	71,21	70,64	69,95
Lampung	69,57	69,02	68,25
Kepulauan Bangka Belitung	71,30	70,67	69,99
Kepulauan Riau	75,48	74,84	74,45
DKI Jakarta	80,76	80,47	80,06
Jawa Barat	72,03	71,30	70,69
Jawa Tengah	71,73	71,12	70,52
DI Yogyakarta	79,99	79,53	78,89
Jawa Timur	71,50	70,77	70,27
Banten	72,44	71,95	71,42
Bali	75,38	74,77	74,30
Nusa Tenggara Barat	68,14	67,30	66,58
Nusa Tenggara Timur	65,23	64,39	63,73
Kalimantan Barat	67,65	66,98	66,26
Kalimantan Tengah	70,91	70,42	69,79
Kalimantan Selatan	70,72	70,17	69,65
Kalimantan Timur	76,61	75,83	75,12
Kalimantan Utara	71,15	70,56	69,84
Sulawesi Utara	72,99	72,20	71,66
Sulawesi Tengah	69,50	68,88	68,11
Sulawesi Selatan	71,66	70,90	70,34
Sulawesi Tenggara	71,20	70,61	69,86
Gorontalo	68,49	67,71	67,01
Sulawesi Barat	65,73	65,10	64,30
Maluku	69,45	68,87	68,19

Maluku Utara	68,70	67,76	67,20
Papua Barat	64,70	63,74	62,99
Papua	60,84	60,06	59,09
Indonesia	71,92	71,39	70,81

Sumber: BPS, 2020.

c. Indeks Kebahagiaan/Happiness Index

Indeks kebahagiaan, '*happiness index*', merupakan indeks ketercapaian pembangunan yang baru diperkenalkan pada 2011. Sidang Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mengawasi penggunaan indeks ini sebagai indikator kesejahteraan. Setelah itu, beberapa Negara, seperti Inggris, Perancis, Australia, Malaysia, dan Thailand juga mulai menggunakan indikator kebahagiaan dalam mengukur keberhasilan pembangunan negara mereka. Berdasarkan laporan *World Happiness Report* berikut, peringkat *happiness index* di beberapa negara ASEAN.

Tabel 4.4. Rangkings *Happiness Index* 5 Negara ASEAN

Negara	2013	2015	2019
Indonesia	76	74	84
Malaysia	56	61	82
Thailand	36	34	54
Filipina	92	90	52
Vietnam	63	75	83

Sumber: World Happiness Index Report, 2020.

Hingga saat ini, belum terdapat patokan khusus dalam menghitung indeks kebahagiaan. Namun, beberapa prediktor yang digunakan dalam menghitung angka rata-rata kebahagiaan di atas adalah pendapatan per kapita, dukungan sosial, harapan hidup sehat saat lahir, kebebasan membuat pilihan dalam hidup, *generosity*, dan persepsi korupsi (Rahayu, 2016).

Badan Pusat Statistik, pada 2014, menyusun indeks komposit yang disusun oleh tingkat kepuasan terhadap 10 aspek kehidupan yang utama (Angela, 2018). Sepuluh aspek tersebut dianggap merefleksikan tingkat kebahagiaan yang meliputi variabel berikut:

- 1) Kesehatan.
- 2) Pendidikan.
- 3) Pekerjaan.
- 4) Pendapatan rumah tangga.
- 5) Keharmonisan keluarga.
- 6) Ketersediaan waktu luang.
- 7) Hubungan sosial.
- 8) Kondisi rumah dan aset.
- 9) Keadaan lingkungan, dan kondisi keamanan.
- 10) Kondisi keamanan.

BAHAN DISKUSI

1. Mengapa kita perlu mempelajari indikator pembangunan? Apa pentingnya indikator pembangunan dalam mengukur keberhasilan pembangunan?
2. Sebutkan dan jelaskan indikator pembangunan yang saudara ketahui!
3. Jelaskan apa kelemahan indikator pendapatan per kapita dalam menggambarkan keberhasilan pembangunan!
4. Jelaskan yang dimaksud Indeks Kualitas Hidup (IKH) atau biasa juga disebut dengan *Physical Quality Life Index (PQLI)*!
5. Mengapa indeks kebahagiaan mulai digunakan untuk mengukur keberhasilan tingkat pembangunan di suatu negara?

BAB V

SYARAT-SYARAT PEMBANGUNAN EKONOMI

Apa pentingnya kemauan berubah bagi kemajuan ekonomi? Kemampuan menerima perubahan merupakan syarat yang penting bagi perkembangan ekonomi dan sosial suatu masyarakat. Bagi masyarakat yang sulit menerima perubahan karena terlalu mempertahankan tradisi akan mengalami kesulitan mencapai kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan.

Selama ini, orang mengenal bahwa negara-negara di benua Afrika pada umumnya mengandalkan sektor pertanian yang sangat terbatas karena rendahnya curah hujan dan lahan yang kering. Selain karena rendahnya curah hujan, pertanian juga dilakukan dengan proses dan pola tanam yang bersifat tradisional, yakni dengan menggunakan alat tradisional. Hal ini telah menyebabkan terbatas pula hasil yang diperoleh, sehingga berdampak pada kemiskinan masyarakatnya. Adanya peningkatan kesadaran untuk mengatasi tantangan pertanian, sebagian negara di Afrika mengambil solusi dengan melakukan digitalisasi sektor pertaniannya. Sebagai contoh, Kenya yang telah mengembangkan berbagai aplikasi di bidang pertanian dengan menggunakan kecerdasan buatan untuk membantu petani menganalisis data tanah, seperti kandungan nutrisi dan suhu, kesehatan tanaman, mendiagnosis gangguan penyakit, menghubungkan petani untuk mengakses fasilitas kredit (Harvard Business Review, 2018). Upaya tersebut dilakukan bukan tanpa hambatan karena banyak petani yang masih minim pendidikan. Adanya keengganan petani untuk mengubah pola pertaniannya dan juga infrastruktur yang masih belum mencukupi. Namun, digitalisasi pertanian telah menarik kaum muda yang sebelumnya memandang bidang pertanian dengan sebelah mata.

Pada umumnya, kemauan masyarakat negara berkembang untuk melakukan investasi termasuk rendah. Hal itu karena masyarakatnya suka melakukan *demonstration effect* atau *conspicuous consumption*, yaitu konsumsi untuk hal-hal yang mencolok, seperti membeli barang yang bersifat konsumtif, yakni perhiasan, kendaraan bermotor, membangun rumah

dengan desain dan ukuran yang berlebihan, dan menyelenggarakan pesta keluarga. Selain itu, juga untuk pengeluaran yang bersifat *conspicuous consumption*, pengeluaran yang mereka lakukan untuk hal-hal yang bersifat non-ekonomi, seperti untuk upacara-upacara adat yang memerlukan biaya besar, yakni upacara kematian, pengeluaran untuk biaya sosial yang berlebihan, dan pembuatan pagoda-pagoda, seperti di Thailand. Tingginya biaya bersifat non-ekonomi yang dikeluarkan tersebut mengakibatkan kesempatan untuk melakukan investasi menjadi rendah.

Perhatian negara-negara di Asia, Afrika, dan Amerika terhadap pembangunan ekonomi baru muncul setelah perang dunia II. Sebelumnya, mereka sudah merasa puas dengan kondisi apa adanya. Setelah perang dunia II dan mereka menjadi negara merdeka, timbul keinginan untuk meningkatkan tingkat hidup. Usaha pertama yang mereka lakukan adalah mengubah sikap hidup yang semula bersifat subsisten menuju kemakmuran. Berbagai upaya dilakukan oleh negara-negara tersebut, contohnya Indonesia melakukan proses pembangunan bidang ekonomi dengan melalui tahapan-tahapan, yakni pada masa Orde Baru disebut dengan Pembangunan Lima Tahun (Pelita). Pembangunan dirancang untuk setiap lima tahun dan dirancang sampai pada pelita keenam. Pada akhir proses pembangunan, diharapkan masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang makmur dan sejahtera secara merata sebab dalam tahapan pelita yang ingin dicapai tidak sekedar peningkatan pendapatan nasional, tetapi juga peningkatan pemerataan pendapatan.

Jika suatu negara ingin meningkatkan kemakmurannya, ada beberapa faktor yang harus diperhatikan untuk mencapainya. Menurut Baldwin dan Meier, faktor-faktor itu adalah *indigenous forces*, mobilitas faktor-faktor produksi, dan akumulasi kapital. *Indigenous forces*, 'kekuatan dari dalam', untuk berkembang adalah keinginan yang ada dalam masyarakat itu sendiri untuk berubah menjadi lebih baik yang diikuti oleh kemauan bekerja keras meraih kemajuan, tidak merasa cepat puas, tekun, dan fokus pada tujuan. Budaya kerja keras, tekun, dan fokus telah mengantar-

kan beberapa negara yang dahulu merupakan negara miskin menjadi negara kaya dan maju.

Faktor yang kedua adalah mobilitas faktor-faktor produksi. Mobilitas faktor produksi adalah keadaan bahwa faktor produksi dapat dipertukarkan penggunaannya. Faktor produksi yang *mobile* memudahkan penempatan faktor produksi yang bersifat kurang produktif ke penggunaan yang lebih produktif. Selain mobilitas faktor produksi, meningkatkan pembangunan seharusnya dilaksanakan bersamaan dengan menghilangkan ketidaksempurnaan pasar. Ketidaksempurnaan pasar ditandai oleh informasi yang susah diperoleh, keterbatasan prasarana, adanya monopoli, dan sulitnya akses kredit mengakibatkan ekonomi berkembang lambat. Hilangnya ketidaksempurnaan pasar mengakibatkan faktor-faktor produksi dapat digunakan sepenuhnya. Cara yang dilakukan untuk menghilangkan ketidaksempurnaan pasar adalah dengan mengganti bentuk-bentuk organisasi sosial dan ekonomi, memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk meningkatkan produktivitas pada tingkat teknik yang ada, mengurangi monopoli, memperluas pasar kapital, dan mempermudah fasilitas kredit. Harapannya, dengan menghilangkan ketidaksempurnaan pasar, maka produktivitas semakin meningkat, perekonomian menjadi semakin berkembang, alokasi sumber-sumber ekonomi semakin efisien, dan mendorong ekspor semakin cepat dan luas, sehingga kemakmuran masyarakat dapat meningkat.

Contoh nyata upaya peningkatan akses kredit untuk masyarakat miskin di Bangladesh yang tidak mampu meminjam ke bank umum karena kecilnya penghasilan dan kecilnya dana yang dibutuhkan telah dilakukan oleh Muhammad Yunus dengan Grameen Bank. Kredit mikro diberikan kepada kelompok perempuan produktif yang memiliki status sosial miskin. Upaya pengentasan kemiskinan, terutama perempuan lewat pemberian kredit mikro telah mampu memberikan kontribusi dalam peningkatan kemampuan ekonomi perempuan Bangladesh.



Gambar 5.1
Perempuan Penerima Kredit Mikro Grameent Bank Bangladesh.

Akumulasi kapital ini adalah kegiatan menggunakan sebagian pendapatan untuk investasi dengan tujuan peningkatan *output* atau pendapatan di masa yang akan datang. Kegiatan tersebut dapat dilakukan oleh sektor swasta maupun pemerintah. Akumulasi kapital dapat berwujud kenaikan dalam volume tabungan riil, sehingga sumber-sumber uang yang semula untuk tujuan konsumtif dapat diarahkan untuk tujuan-tujuan produktif. Untuk dapat melakukan investasi, suatu perekonomian perlu memiliki mekanisme kredit yang memadai agar sumber-sumber tersebut dapat digunakan oleh para investor. Akumulasi kapital tidak akan terjadi hanya dengan pembentukan lembaga-lembaga keuangan saja, tetapi juga harus difasilitasi untuk adanya struktur pasar yang kuat, agar dapat mendorong mobilitas, alokasi kapital, dan dapat menyalurkan tabungan ke investasi yang bersifat produktif.

Untuk mengukur banyaknya kapital yang dibutuhkan dalam perkembangan ekonomi, perlu diperhatikan beberapa hal, seperti perkiraan tingkat pertumbuhan penduduk, target kenaikan pendapatan riil per kapita, dan angka rasio pertumbuhan antara investasi dan *output* (ICOR).

Ada beberapa cara yang dapat dilakukan pemerintah untuk meningkatkan investasi, di antaranya adalah:

1. Menciptakan iklim investasi yang menarik dengan cara membuat kemudahan prosedur untuk melakukan investasi.

2. Menjual obligasi negara (di kebanyakan negara hal ini belum populer).
3. Menyediakan fasilitas kredit untuk investasi dengan bunga yang rendah.
4. Memperluas perdagangan luar negeri dengan cara mencari pasar dan komoditas baru yang bisa diekspor.

Investasi seperti apa yang dibutuhkan untuk peningkatan pendapatan? Investasi harus memenuhi kriteria-kriteria berikut:

1. Investasi harus ditempatkan sedemikian rupa, sehingga memaksimalkan perbandingan antara *output* dan kapital (COR terendah).
2. Proyek-proyek yang dipilih harus memberikan perbandingan yang memaksimalkan penggunaan tenaga kerja terhadap investasi (produktivitas tenaga kerja tertinggi).
3. Investasi yang bertujuan untuk mengurangi kesulitan-kesulitan neraca pembayaran internasional, sehingga memaksimalkan perbandingan antara ekspor dan investasi.

A. PENYERAPAN KAPITAL

Setiap negara memiliki batas kemampuan penyerapan kapital, '*capital absorption capacity*', sendiri-sendiri. Kapasitas pada umumnya ditentukan oleh dua hal, yaitu:

1. Ada atau tersedianya faktor-faktor produksi komplementer yang bekerja sama dengan kapital.
2. Syarat-syarat yang diperlukan untuk menghindari inflasi dan untuk mempertahankan keseimbangan neraca pembayaran.

Pada umumnya, negara sedang berkembang memiliki keterbatasan yang lebih besar dalam penyerapan kapital. Faktor penyebabnya adalah karena kurangnya teknologi, tenaga ahli, dan tingkat mobilitas geografis yang rendah. Hal yang terakhir berhubungan dengan terbatasnya infrastruktur yang dimiliki.

B. STABILITAS DAN NILAI-NILAI SERTA LEMBAGA-LEMBAGA YANG ADA

Stabilitas keamanan merupakan hal yang menjadi perhatian investor, baik investor dalam negeri maupun luar negeri, untuk menjamin keamanan investasi yang dilakukan. Negara yang memiliki stabilitas yang baik menjadi tempat nyaman bagi calon investor. Sebaliknya, negara yang sering mengalami gejolak politik, sosial, dan ekonomi, tidak menarik bagi investor.

Lembaga yang ada juga menjadi perhatian. Lembaga ini adalah agama, adat istiadat, dan jiwa wirausaha. Masyarakat yang memiliki sikap wirausaha adalah masyarakat sebagai berikut:

1. Memiliki kemampuan mengenal kesempatan dalam pasar.
2. Memiliki kemampuan mengambil tindakan-tindakan alternatif.
3. Memiliki kemampuan mengkombinasi elemen-elemen secara rasional dalam keputusannya.

Semakin banyak anggota masyarakat yang memiliki jiwa wirausaha, maka perekonomian negara tersebut semakin memiliki peluang untuk berkembang.

BAHAN DISKUSI

1. Beri contoh dan jelaskan bagaimana peran kultur suatu masyarakat dalam mendorong kemajuan perekonomian bangsa tersebut!
2. Ketika suatu perekonomian memutuskan untuk menambah modal dari luar, menurut Anda apa syarat yang harus dipenuhi agar modal asing tersebut dapat mendorong perekonomian negara tersebut?
3. Jelaskan bagaimana pentingnya stabilitas untuk keberhasilan pembangunan ekonomi! Perjelas jawaban Anda dengan menggunakan contoh kasus.
4. Jelaskan bagaimana ketidaksempurnaan pasar dapat menjadi penghambat proses pembangunan! Berikan berbagai contoh riil kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk meniadakan ketidaksempurnaan tersebut!

5. Menurut Anda, apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah atau masyarakat untuk mengatasi *demonstration effect* atau *conspicuous consumption* yang menjadi penghambat dalam peningkatan taraf ekonomi masyarakat? Berikan contoh riil!

BAB VI

MASALAH PEMBANGUNAN EKONOMI

A. SEKILAS MASALAH PEMBANGUNAN EKONOMI

Proses pembangunan ekonomi di suatu negara tentu perlu didukung faktor-faktor yang saling berinteraksi satu sama lain. Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Alam (SDA), teknologi, sosial budaya, lembaga sosial, dan lain-lain merupakan faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan dalam masyarakat, seperti kebebasan menyampaikan pendapat (Sumodiningrat pembangunan di suatu negara. Namun, dalam prosesnya, pelaksanaan pembangunan tidak mungkin berjalan tanpa adanya masalah. Permasalahan nasional yang sering dihadapi dalam pembangunan di Negara Sedang Berkembang (NSB), biasanya, berkaitan dengan populasi penduduk yang memperlambat laju pertumbuhan angkatan kerja. Sempitnya lapangan pekerjaan mengakibatkan tingkat pengangguran semakin tinggi, sehingga masalah sosial di masyarakat, yaitu banyaknya pekerja yang menganggur berakibat pada tingkat kesejahteraan yang mengalami penurunan, sebab mereka akan kesulitan dalam memenuhi kebutuhannya dengan pendapatan yang mereka miliki.

B. MASALAH-MASALAH PEMBANGUNAN EKONOMI

Dalam teori ekonomi makro, ada beberapa masalah yang mungkin dihadapi oleh Negara Sedang Berkembang dalam proses pembangunan ekonomi, yaitu:

1. Kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan.
2. Masalah pertumbuhan penduduk.
3. Masalah dualisme
4. Masalah korupsi.
5. Masalah ketergantungan terhadap negara lain.

1. Kemiskinan dan Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Kemiskinan merupakan salah satu masalah serius dalam proses pembangunan di berbagai Negara Sedang Berkembang. Kemiskinan merupakan permasalahan yang sifatnya multidimensional, sehingga menganalisisnya melalui pendekatan dengan satu bidang ilmu tertentu saja tidak cukup untuk mengurai makna dan fenomena yang menyertainya.

Menurut World Bank (2000), kemiskinan dinyatakan sebagai tidak adanya kesempatan meraih kesejahteraan. Ekonomi kesejahteraan dapat diukur dengan kekayaan yang dimiliki seseorang, kesehatan, gizi, pendidikan, aset, perumahan, dan hak-hak tertentu, 1999). Mendeskripsikan berbagai cara pengukuran kemiskinan dengan standar yang berbeda-beda, maka kemiskinan dikategorikan ke dalam dua macam klasifikasi berikut:

Pertama, kemiskinan absolut. Kemiskinan ini diidentifikasi dengan ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum, seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan. Kebutuhan pokok minimum diterjemahkan sebagai ukuran finansial dalam bentuk uang. Nilai kebutuhan minimum tersebut kemudian dikenal dengan istilah garis kemiskinan. Penduduk yang pendapatannya di bawah garis kemiskinan digolongkan sebagai penduduk miskin. Pada umumnya, garis kemiskinan yang digunakan Bank Dunia adalah sebesar US \$ 2 per kapita per hari yakni US dollar yang digunakan adalah US \$ PPP (*Purchasing Power Parity*) bukan nilai tukar resmi (*exchange rate*).

Kedua, kemiskinan relatif. Kemiskinan ini adalah penghitungan kemiskinan berdasarkan proporsi distribusi pendapatan dalam suatu daerah. Kemiskinan relatif merupakan kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan. Standar minimum disusun berdasarkan kondisi hidup suatu negara pada waktu tertentu yang meru-

pakan penduduk relatif miskin. Dengan demikian, ukuran kemiskinan relatif sangat tergantung pada distribusi pendapatan/pengeluaran penduduk.

Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Artinya, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Garis Kemiskinan (GK) dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$GK = GKM + GKNM$$

Keterangan:

GK = Garis Kemiskinan.

GKM = Garis Kemiskinan Makanan yang merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilo kalori per kapita per hari.

GKNM = Garis Kemiskinan Non-Makanan berupa kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditas kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditas di perkotaan dan 47 jenis komoditas di pedesaan.

Menurut Kuncoro (1997), ada beberapa faktor yang dipandang sebagai penyebab terjadinya kemiskinan. *Pertama*, keterbelakangan perekonomian. Penduduk suatu negara menjadi miskin karena menggantungkan diri pada sektor primer, menggunakan metode produksi tradisional, dan juga diikuti dengan ketidakpedulian terhadap lingkungan. *Kedua*, ketidakseimbangan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi tidak seimbang. Penduduk miskin hanya memiliki sumber daya jumlah terbatas dengan kualitas yang rendah. *Ketiga*, adanya perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia yakni kualitas sumber daya manusia yang rendah

akan menyebabkan tingkat produktivitas rendah, sehingga upah yang diperoleh juga rendah. Rendahnya kualitas sumber daya manusia biasanya disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi, atau karena keturunan.

Selain tiga faktor di atas, adanya perbedaan akses dalam modal juga merupakan penyebab terjadinya kemiskinan. Tingkat pendapatan yang rendah disebabkan oleh produktivitas yang rendah, sehingga kemampuan menabung berakibat pada tingkat pembentukan modal rendah. Kondisi ini mengakibatkan negara akan menghadapi kekurangan modal. Pada sisi yang lain, negara miskin perangsang untuk melaksanakan penawaran modal juga rendah. Hal ini disebabkan karena luasnya pasar untuk berbagai jenis barang terbatas. Terbatasnya luas pasar disebabkan karena pendapatan masyarakat, hal ini terjadi akibat modal yang terbatas pada masa lalu (Nurkse, 1961).

Kemiskinan berbeda dengan ketimpangan distribusi pendapatan. Kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum, sedangkan ketimpangan mengacu pada standar hidup relatif dari seluruh masyarakat. Ketimpangan distribusi pendapatan memiliki hubungan dengan tingkat kemiskinan, yakni setinggi apa pun tingkat pendapatan nasional per kapita yang dicapai suatu negara, tetapi jika distribusi pendapatannya timpang, maka kemiskinan di negara tersebut akan tetap tinggi.

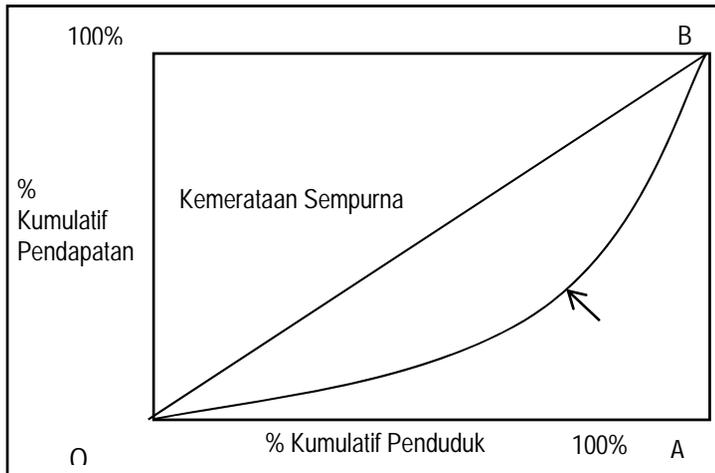
Hipotesis Simon Kuznets (1955), tentang pertumbuhan dan distribusi pendapatan mengatakan bahwa mula-mula ketika pembangunan dimulai, distribusi pendapatan akan semakin tidak merata. Namun, setelah mencapai tingkat pembangunan tertentu, distribusi pembangunan akan semakin merata. Indikator yang sering digunakan untuk mengetahui kesenjangan distribusi pendapatan adalah rasio gini dan kriteria Bank Dunia. Nilai gini ratio berkisar antara nol dan satu. Bila rasio gini sama dengan nol, berarti distri-

busi pendapatan amat merata karena setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama. Namun, bila rasio gini sama dengan satu, maka hal ini menunjukkan bahwa terjadi ketimpangan distribusi pendapatan yang sempurna karena seluruh pendapatan hanya dinikmati satu orang saja. Kriteria Bank Dunia mendasarkan penilaian distribusi pendapatan atas pendapatan yang diterima oleh 40% penduduk berpendapatan rendah. Kesenjangan distribusi pendapatan dikategorikan (a) tinggi, bila 40% penduduk berpenghasilan terendah menerima kurang dari 12% bagian pendapatan (b) sedang bila 40% penduduk berpenghasilan rendah menerima 12 hingga 17 persen bagian pendapatan (c) rendah bila 40% penduduk berpenghasilan rendah menerima lebih dari 17 persen bagian pendapatan.

Beberapa macam kesenjangan yang mungkin terjadi dalam proses pembangunan adalah sebagai berikut:

- Kesenjangan interpersonal/kesenjangan antarpenduduk.
- Kesenjangan regional.
- Kesenjangan spasial (kota-desa).
- Kesenjangan antarkelompok sosial ekonomi.
- Kesenjangan sektoral.
- Kesenjangan interpersonal/antarpenduduk.

Besarnya kesenjangan pendapatan interpersonal dapat dihitung dengan kurva lorenz atau dengan indeks gini sebagai berikut:



Gambar 6.1
Kurva Lorenz.

Kurva Lorenz merupakan indikator sederhana untuk menunjukkan kondisi pembagian pendapatan di satu wilayah. Kurva Lorenz menggambarkan kumulatif pendapatan yang diterima oleh kumulatif penduduk di satu daerah tertentu.

Sumbu horizontal menggambarkan persentase kumulatif penduduk, adapun sumbu vertikal menyatakan bagian dari total pendapatan yang diterima oleh penduduk tersebut. Garis diagonal di tengah menggambarkan pemerataan sempurna karena setiap titik pada garis diagonal merupakan tempat kedudukan persentase jumlah penduduk yang sama dengan persentase penerimaan pendapatan. Garis melengkung pada kurva ini menunjukkan kondisi pembagian pendapatan yang tidak merata. Semakin jauh atau semakin melengkung kurva Lorenz dari kurva diagonal, maka kondisi distribusi dikatakan semakin tidak merata.

Koefisien gini pada Gambar 6.1. di atas ditunjukkan oleh perbandingan antara luas daerah di dalam kurva dengan luas segitiga OAB atau secara matematis dapat ditulis sebagai berikut:

$$KG = 1 - \sum_1^n (X_{i+1} - X_i)(Y_i + Y_{i+1})$$

Atau

$$KG = 1 - \sum_1^n f_i (Y_{i+1} - Y)$$

Keterangan:

- KG = Angka koefisien gini.
 X = Proporsi jumlah rumah tangga kumulatif dalam kelas i.
 f_i = Proporsi jumlah rumah tangga dalam kelas i.
 Y_i = Proporsi jumlah pendapatan rumah tangga kumulatif dalam kelas i.

Besarnya koefisien gini antara 0-1. Semakin merata distribusi pendapatan, maka indeks gini semakin mendekati angka 0.

Kesenjangan Regional

Besarnya kesenjangan regional dapat dihitung dengan menggunakan indeks Williamson atau menggunakan indeks Entropi Theil sebagai berikut:

- Indeks Williamson :

$$IW = \frac{\sqrt{\sum (Y_i - Y)^2 F_i / n}}{Y}$$

Keterangan:

- IW = Indeks Williamson yang besarnya antara 0 -1.
 Y_i = PDRB per kapita daerah i.
 Y = PDRB per kapita rata-rata daerah i berada.
 f_i = Jumlah penduduk daerah i.
 n = Jumlah penduduk daerah i berada.

Hasil dari perhitungan indeks Williamson dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- Bila IW, < 0,3 artinya ketimpangan ekonomi wilayah rendah.
- Bila IW, 0,3 - 0,5 artinya ketimpangan ekonomi wilayah sedang.
- Bila IW.> 0,5 artinya ketimpangan ekonomi wilayah tinggi.

- Indeks Entrophy Theil

$$I = \sum \left(\frac{Y_j}{Y} \right) \log \left[\frac{\frac{Y_j}{Y}}{\frac{X_j}{X}} \right]$$

Keterangan:

- I = Indeks Entrophy Theil.
- Y_j = PDRB per kapita kota/kabupaten j.
- Y = PDRB per kapita provinsi.
- X_j = Jumlah penduduk kota/kabupaten j.
- X = Jumlah penduduk provinsi.

2. Masalah Pertumbuhan Penduduk

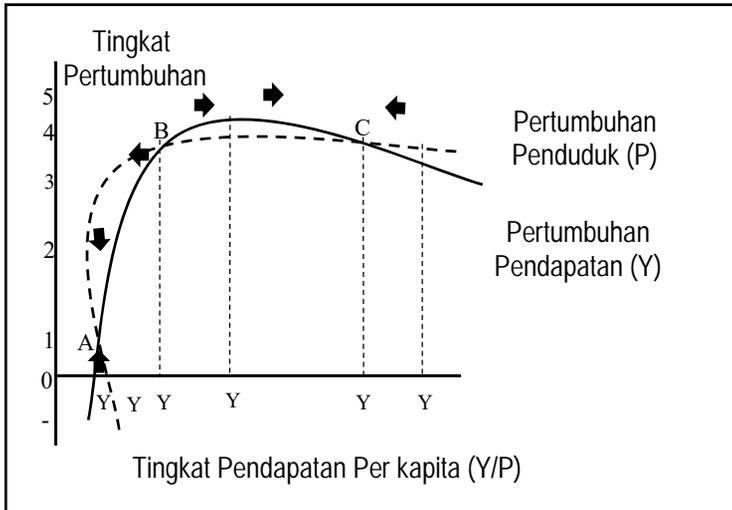
Pertumbuhan penduduk berhubungan erat dengan kenaikan jumlah angkatan kerja, ‘*labor force*’. Dua variabel ini, secara umum, memberikan dampak positif dalam mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi. Secara teori, semakin banyak angkatan kerja akan mendorong tingkat produktivitas tenaga kerja dan semakin banyak penduduk akan meningkatkan potensi pasar domestik. Namun, untuk kasus di negara berkembang, terdapat keraguan terkait apakah jumlah penduduk yang besar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi atau justru menjadi beban bagi pembangunan.

Peningkatan jumlah penduduk yang mendorong penawaran tenaga kerja akan terjadi jika sistem ekonomi yang berjalan mampu menyerap dan mempekerjakan tambahan pekerja secara produktif. Kemampuan tersebut tergantung pada tingkat dan jenis akumulasi modal dan tersedianya faktor-faktor lain yang dibutuhkan, seperti misalnya keahlian manajerial dan administratif (Pasaribu, 2019). Permasalahan yang muncul di bidang kependudukan ini akan berimbas pada permasalahan persebaran penduduk, kualitas penduduk, kecukupan dari sisi konsumsi, struktur penduduk yang sebagian besar masih muda, modal, dan teknologi yang dimiliki juga

masih rendah, sehingga mengakibatkan produktivitas kerja akan menurun dan menjadi masalah krusial yang berkaitan dengan ketenagakerjaan.

Malthus (1978) menyatakan bahwa umumnya penduduk suatu negara mempunyai kecenderungan bertambah menurut suatu deret ukur yang akan berlipat ganda setiap 30-40 tahun, kecuali bila terjadi bahaya kelaparan. Pada saat yang sama, oleh karena adanya ketentuan pertambahan hasil yang semakin berkurang dari suatu faktor produksi yang jumlahnya tetap (tanah dan sumber daya alam), maka persediaan pangan hanya akan meningkat menurut deret hitung. Kenyataannya, oleh karena setiap anggota masyarakat hanya memiliki tanah yang sedikit, maka kontribusi marginal atau produksi pangan akan semakin menurun. Oleh karena itu, pertumbuhan pangan tidak dapat berpacu dengan pesatnya pertambahan penduduk, maka pendapatan per kapita (dalam masyarakat agraris, pendapatan per kapita diartikan sebagai produksi pangan per kapita) akan mempunyai tendensi turun sedemikian rendahnya, sehingga mencapai sedikit di atas tingkat subsisten (kemiskinan absolut).

Teori ini dikenal dengan istilah *Low Level-Equilibrium Population Trap* atau juga *Malthusian Population Trap*. Dalam bentuk diagram, model dasar tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 6.2
Kurva Malthusian Population Trap.

Sumbu vertikal mewakili pertumbuhan (dalam persen) untuk variabel penduduk (P) dan pendapatan (Y). Sedangkan, sumbu horizontal mewakili pendapatan per kapita (Y/P). Titik (Y0) menunjukkan kondisi pada saat pendapatan per kapita rendah, yakni tingkat perubahan jumlah penduduk bernilai atau dapat dikatakan pertumbuhan penduduk dalam keadaan stabil. Pada tingkat pendapatan per kapita se-besar Y2, laju pertumbuhan penduduk mencapai laju pertumbuhan maksimum. Diasumsikan laju pertumbuhan penduduk tersebut akan tetap bertahan sampai terjadi perubahan pendapatan per kapita yang lebih tinggi. Wilayah sebelah kanan dari Y5 angka kelahiran akan mulai menurun dan kurva pertumbuhan penduduk kemiringannya menjadi negatif dan kembali mendekati sumbu horizontal. Pada awalnya, pertumbuhan pendapatan nasional (agregat) mempunyai hubungan yang positif dengan tingkat pendapatan per kapita. Hal ini karena negara-

negara yang memiliki pendapatan per kapita yang lebih tinggi akan memiliki tingkat tabungan yang lebih tinggi juga, sehingga lebih banyak investasi dapat dilakukan. Tingkat investasi yang tinggi akan mendorong tercapainya pertumbuhan pendapatan agregat yang lebih tinggi pula. Namun, setelah melewati tingkat pendapatan per kapita tertentu (Y_3), kurva pertumbuhan pendapatan akan mencapai titik maksimum dan kemudian mulai menurun. Ini adalah titik pertambahan hasil yang semakin berkurang, '*diminishing return*', dalam model Malthus yang terjadi, ketika investasi dan tenaga kerja terus bertambah, pada sisi yang lain, sumber daya alam dan tanah relatif tetap.

Meskipun teori Malthus ini banyak disetujui oleh banyak ekonom, tetapi tidak sedikit pihak yang membantah teori ini. Antara lain adanya anggapan bahwa Malthus tidak dapat meramalkan akan terjadinya revolusi industri dan revolusi dalam teknologi pertanian yang memungkinkan peningkatan produksi bahan makanan yang jauh melebihi peningkatan jumlah penduduk.

3. Masalah Dualisme

Dualisme adalah konsep yang menunjukkan adanya perbedaan di antara berbagai golongan dalam masyarakat. Konsep ini, mengacu pada pemikiran J. H. Boeke yang menggambarkan keadaan suatu masyarakat yang berbeda satu sama lain, tetapi hidup berkembang secara berdampingan. Keadaan pertama bersifat "superior", sedangkan yang lainnya bersifat "inferior", seperti halnya adanya cara produksi modern berdampingan dengan cara produksi tradisional, antara orang kaya dengan orang miskin tak berpendidikan, dan keadaan lain yang kontras dalam satu masa dan tempat (Hudiyanto, 2014).

Konsep dualisme mempunyai empat unsur pokok, yakni:

1. Dua keadaan yang berbeda, yakni satu keadaan bersifat superior dan keadaan lain bersifat inferior yang dapat hidup berdampingan.
2. Kenyataan hidup yang berdampingan tersebut bersifat kronis bukan transisional.
3. Derajat superioritas dan inferioritas itu tidak menunjukkan kecenderungan yang menurun, tetapi justru meningkat.
4. Keterkaitan antara unsur superioritas dan inferioritas menunjukkan bahwa peran unsur superioritas dalam mengangkat derajat unsur inferioritas sangatlah kecil.

Dualisme dapat dikelompokkan menjadi lima macam, yakni dualisme sosial, dualisme ekologis, dualisme teknologi, dualisme finansial, dan dualisme regional.

a. Dualisme Sosial

Konsep ini merupakan temuan seorang ekonom Belanda, J. H. Boeke, tentang kondisi di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Menurut Boeke, pemikiran ekonomi Barat tidak dapat diterapkan untuk memahami masalah ekonomi di negara-negara jajahan tanpa adanya modifikasi teori. Prinsip pokok pemikiran Boeke adalah bahwa ada perbedaan mendasar dari tujuan kegiatan ekonomi di Barat dan Timur. Ia mengatakan bahwa kegiatan ekonomi di Barat berdasarkan pada rangsangan kebutuhan ekonomi, sedangkan di Indonesia oleh kebutuhan-kebutuhan sosial. Dalam arti ekonomi, masyarakat memiliki tiga ciri, yakni semangat sosial, bentuk organisasi, dan teknologi yang mendominasinya. Ketergantungan di antara ketiga ciri tersebut, dikatakan, sebagai sistem sosial atau gaya sosial. Pada masyarakat dapat terdapat dua sistem sosial atau lebih masyarakat. Kondisi seperti itu disebut dengan masyarakat dualistik atau masyarakat majemuk. Dalam masyarakat yang

demikian terdapat dua sistem sosial yang hidup secara berdampingan, yakni yang satu tidak dapat menguasai sepenuhnya sistem lainnya, demikian pula sebaliknya. Keadaan dualistik tersebut disebabkan oleh adanya sistem sosial yang lebih modern, terutama yang berasal dari Barat, kemudian berkembang ke negara lain akibat adanya penjajahan dan perdagangan internasional. Akibatnya, di Negara Sedang Berkembang terdapat pertentangan antara sistem sosial yang diimpor dengan sistem sosial pribumi.

b. Dualisme Ekologis

Konsep ini dikenalkan oleh Clifford Geertz, yakni dualisme ini ditandai oleh perbedaan dalam sistem ekologis, yang menggambarkan pola sosial dan ekonomi tertentu menyatu di dalamnya serta membentuk keseimbangan internal. Ia menjelaskan konsepnya dengan menggunakan kasus Indonesia. Adanya perbedaan antara Jawa dengan luar Jawa, seperti Kalimantan dan Sumatera. Jawa merupakan sistem ekologi padat karya yang ditandai oleh pertanian padi, tebu yang membutuhkan iklim tropis dan butuh banyak air. Luar Jawa ditandai oleh pertanian padat tanah, padat karya, dan padat modal, seperti tambang, karet, kelapa sawit.

c. Dualisme Teknologi

Konsep ini merupakan suatu keadaan yakni dalam suatu kegiatan ekonomi tertentu digunakan teknik produksi dan organisasi produksi modern, seperti pada produksi sektor pertambangan dan perkebunan yang sangat berbeda dengan kegiatan ekonomi lainnya, seperti pertanian tanaman pangan, industri rumah tangga yang hanya menggunakan teknologi sederhana dan memungkinkan untuk mengganti modal dengan tenaga kerja.

Adanya perbedaan tersebut akhirnya akan mengakibatkan perbedaan pada tingkat produktivitas yang sangat besar.

d. Dualisme Finansial

Pengertian dualisme finansial menunjukkan bahwa pasar uang di Negara Sedang Berkembang dapat dipisahkan ke dalam dua kelompok, yaitu:

- 1) Pasar uang yang terorganisir dengan baik terdiri dari bank-bank komersial dan lembaga keuangan non-bank, terutama terdapat di kota-kota besar dan pusat-pusat perdagangan.
- 2) Pasar uang yang tidak terorganisir, yakni tidak terbentuk dari lembaga keuangan formal, misalnya rentenir, petani kaya.

e. Dualisme Regional

Konsep ini merupakan ketidakseimbangan tingkat pembangunan antara berbagai daerah dalam satu negara. Ada daerah yang berkembang pesat sedangkan daerah lain perkembangannya lambat, bahkan mungkin mengalami penurunan. Dualisme regional di Negara Sedang Berkembang dapat dibedakan menjadi dua jenis, yakni:

- 1) Dualisme antara daerah perkotaan dengan daerah pedesaan.
- 2) Dualisme antara pusat negara, pusat industri, dan perdagangan dengan daerah-daerah lain dalam negara tersebut.

Kondisi dualisme tersebut dapat mengakibatkan bertambah lebarnya kesenjangan tingkat kesejahteraan di berbagai daerah. Selain itu, dualisme regional yang semakin buruk dapat menimbulkan masalah-masalah sosial politik yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi di Negara Sedang Berkembang.

Pengaruh Dualisme terhadap Pembangunan.

Berbagai macam dualisme yang ada di NSB, terutama dualisme sosial dan dualisme teknologi mengakibatkan mekanisme pasar tidak

dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Adanya penggunaan teknologi padat modal telah mengakibatkan semakin sulitnya permasalahan tenaga kerja yang umumnya dihadapi oleh NSB, yaitu tingginya angka pengangguran. Selain itu, adanya pengaruh yang kuat dari sektor tradisional terhadap kehidupan masyarakat dan kegiatan ekonomi. Kegiatan-kegiatan ekonomi yang menggunakan teknik sangat sederhana dan didasarkan pada cara berpikir tradisional mengakibatkan produktivitas sangat rendah dan upaya-upaya pembaruan menjadi sangat terbatas. Selain berdampak buruk, adanya dualisme juga dapat meningkatkan dualisme teknologi. Adanya teknologi tinggi di Negara Sedang Berkembang memungkinkan negara tersebut memiliki produktivitas yang tinggi dan akhirnya tercipta pertumbuhan ekonomi yang tinggi pula. Namun, sektor modern pada umumnya mengalami perkembangan yang sangat pesat, sehingga terciptalah jurang tingkat kesejahteraan antarsektor tradisional dan sektor modern semakin lebar.

4. Masalah Korupsi

Korupsi sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak lain. Sebagai contoh, perbuatan seorang pejabat yang melanggar hukum menggunakan jabatannya untuk memperoleh suatu keuntungan yang berlawanan dengan kewajibannya.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa tingkat korupsi di suatu negara dapat menghambat pembangunan ekonomi, baik pada negara sedang berkembang maupun negara maju. Banyak negara yang mulai serius mengantisipasi bahaya korupsi terhadap perekonomian, dengan cara membentuk lembaga atau organisasi yang mampu mencegah dan mengendalikan korupsi. Beberapa studi empiris menunjukkan bahwa korupsi dapat mengakibatkan turunnya tingkat investasi, produktivitas belanja publik, distorsi alokasi

sumber daya, dan akhirnya berimbas pada terhambatnya pertumbuhan ekonomi (Dreher & Herzfeld, 2005; Mauro, 1995; Rose-Ackerman, 1996).

Korupsi melemahkan kemampuan negara untuk memungut pajak, sebagian dengan melemahkan sistem perpajakan melalui persepsi ketidakadilan dan favoritisme, sehingga dapat menguras kas negara. Korupsi juga mendistorsi pengeluaran pemerintah dengan mempromosikan proyek-proyek terlalu besar dan boros yang menghasilkan suap (*kickback*). Pada sisi yang lain, korupsi juga merugikan investasi di bidang-bidang, seperti kesehatan dan pendidikan yang memiliki dampak ekonomi dan sosial yang positif. Oleh karena itu, warga miskin amat bergantung pada layanan pemerintah, distorsi semacam ini memengaruhi mereka secara tidak proporsional dan membatasi peluang ekonomi. Pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif juga terancam, jika pemerintah tidak dapat memastikan lingkungan bisnis yang berdasarkan imparialitas dan prinsip-prinsip hukum, *'rule of law'*. Suap membuat investasi menjadi lebih mahal.

Berikut perbandingan negara dengan tingkat korupsi paling tinggi dan negara dengan tingkat korupsi paling rendah pada tahun 2019 menurut *Transparency International* (TI):

Tabel 6.1 10 Negara dengan Tingkat Korupsi Tertinggi dan Terendah 2019

10 Negara Rendah Korupsi			10 Negara Tinggi Korupsi		
No.	Negara	CPI Indeks	No.	Negara	CPI Indeks
1	Denmark	87	1	Somalia	9
2	New Zealand	87	2	Sudan Selatan	12
3	Finlandia	86	3	Siria	13
4	Singapura	85	4	Yaman	15
5	Swedia	85	5	Venezuela	16
6	Swiss	85	6	Sudan	16
7	Norwegia	84	7	Afganistan	16

8	Belanda	82	8	Korea Utara	17
9	Jerman	80	9	libya	18
10	Luxembourg	80	10	Haiti	18

Sumber: Transparency CPI report 2019.

Transparency International (TI), merupakan organisasi internasional yang bertujuan memerangi korupsi politik. Organisasi ini secara berkala membuat laporan hasil riset mengenai persepsi korupsi di suatu negara dengan parameter penilaian 0 (nol) sebagai negara yang dipersepsikan sangat korup dan sebaliknya 100 (seratus) merupakan negara dengan persepsi sangat bersih dari korupsi.

Berdasarkan data di atas, pada umumnya negara-negara terkorup merupakan Negara Sedang Berkembang. Sementara negara dengan persepsi korupsi yang rendah merupakan negara maju yang memiliki tingkat pendapatan per kapita yang tinggi. Korupsi dapat menyebabkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah dan perpecahan dalam suatu Negara yang kemudian memiliki efek tidak langsung pada stabilitas dan pertumbuhan inklusif. Penelitian IMF menunjukkan bahwa mengurangi korupsi berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Penurunan dari persentil ke-50 hingga ke-25 dalam indeks korupsi atau tata kelola berhubungan dengan penurunan tingkat pertumbuhan PDB per kapita tahunan hingga setengah poin persentase atau lebih, dan penurunan rasio investasi terhadap PDB sebesar 1½-2 poin persentase.

5. Ketergantungan terhadap Negara Lain

Teori ketergantungan dikenal juga dengan istilah teori dependensi. Perkembangan ekonomi dunia di masa liberalisasi ekonomi yang begitu pesat dalam dekade terakhir ini telah meningkatkan saling ketergantungan dan persaingan antarnegara. Munculnya teori ini dilandasi pada adanya persoalan keterbelakangan dan pembangunan negara dunia ketiga untuk menantang hegemoni ekonomi, politik, budaya, dan intelektual dari negara maju.

Ketergantungan didefinisikan sebagai hubungan dua negara atau lebih. Namun, apabila salah satu dari negara tersebut dapat berkembang dan memiliki otonomi dalam pembangunannya, sementara negara lainnya tidak mengalami kondisi yang sama, maka hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai ketergantungan. Frank dalam Suwarsono dan So (2000), mendefinisikan ketergantungan sebagai pola hubungan antara dua negara yang bersifat asimetris. Biasanya negara yang satu memiliki kekuatan yang lebih dibanding negara lainnya. Ketergantungan yang terwujud dapat ditunjukkan melalui ketergantungan modal, teknologi, dan tenaga ahli. Hal tersebut sebagai dampak dari proses pembangunan yang memihak pada negara maju (Purwandari, 2011).

Dos Santos (1970), mengklasifikasikan ketergantungan ke dalam kelompok berikut:

a. Ketergantungan Kolonial

Ketergantungan ini merupakan bentuk penguasaan penjajah (negara pusat) terhadap negara pinggiran. Kegiatan ekonomi utama negara pinggiran adalah perdagangan ekspor dari hasil bumi yang dibutuhkan negara penjajah. Pada kondisi ini, para penjajah akan memonopoli tanah, pertambangan, dan tenaga kerja, sehingga dapat dikatakan bahwa hubungan penjajah dengan penduduk lokal bersifat eksploitatif.

b. Ketergantungan Finansial

Pada kondisi ini, secara *de facto* dan *de jure*, negara pinggiran telah masuk ke dalam kategori negara merdeka, tetapi pada kenyataannya negara ini masih dikuasai oleh kekuatan-kekuatan finansial dari negara pusat. Contoh dalam kasus ketergantungan kolonial, negara pinggiran masih mengekspor bahan mentah bagi kebutuhan industri negara pusat. Negara pusat menanamkan modalnya pada pengusaha lokal di negara pinggiran untuk menghasilkan bahan baku tersebut. Bahan baku primer tersebut

kemudian dijual ke negara pusat dengan harga yang murah. Dengan demikian, pengendalian dilakukan melalui kekuasaan ekonomi dalam bentuk kekuasaan finansial.

c. Ketergantungan Teknologi Industri

Pada kondisi ini, negara-negara pinggiran tidak lagi mengekspor bahan mentah untuk keperluan industri di negara pusat. Perusahaan-perusahaan multinasional dari negara pusat mulai menanamkan modalnya untuk kegiatan industri di negara pinggiran yang produksinya ditujukan ke dalam pasar negara pinggiran. Meskipun industri ini ada di negara pinggiran, bahkan seringkali dimiliki oleh pengusaha lokal, tetapi teknologinya berasal dari perusahaan-perusahaan multinasional di negara maju.

Kondisi ketergantungan ini, pada intinya disebabkan oleh dominasi negara-negara maju sebagai pemilik modal dalam menentukan kebijaksanaan investasinya, sehingga menyebabkan ketimpangan dalam keuntungan yang masuk ke masing-masing negara. Keuntungan ini, biasanya lebih banyak yang mengalir ke negara investor daripada ke negara yang dibantu.

BAHAN DISKUSI

1. Sebutkan, apa saja masalah pembangunan ekonomi di Negara Sedang Berkembang!
2. Apa perbedaan permasalahan kemiskinan dan distribusi pendapatan?
3. Jelaskan mengenai kesenjangan antarpenduduk!
4. Jelaskan mengenai kurva *Malthusian Population Trap*!
5. Bagaimana masalah korupsi di suatu negara dapat memengaruhi pembangunan?

BAB VII

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN EKONOMI

A. TUJUAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

Pentingnya keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara merupakan pertarungan tingkat kesejahteraan masyarakat di negara tersebut. Berbagai strategi dan kebijakan yang ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dilakukan pemerintah dengan melaksanakan program-program pembangunan ekonomi untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan menciptakan iklim usaha yang kondusif serta meningkatkan pendapatan masyarakat. Tujuan utama kebijakan pembangunan ekonomi adalah *full employment*, *economic growth*, dan *price stability*.

1. *Full Employment*

Full employment atau kesempatan kerja penuh adalah kondisi perekonomian nasional, yakni semua atau hampir semua orang mau dan mampu bekerja diupah yang berlaku serta kondisi kerja yang mampu melakukannya. Berusaha mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh tanpa inflasi merupakan tujuan setiap negara. Apabila suatu negara dapat selalu mencapai tujuan ini dengan sendirinya, maka tujuan lainnya seperti akan tercapai.

2. *Economic Growth*

Economic Growth atau tingkat pertumbuhan ekonomi merupakan tujuan dari pembangunan ekonomi di negara mana pun. Peningkatan pertumbuhan ekonomi ini, kemudian perlu diikuti dengan tingkat pendapatan per kapita yang juga tinggi. Kondisi ini merupakan kondisi yang dianggap ideal dalam mencerminkan kesejahteraan masyarakat di suatu negara.

3. *Price Stability*

Price stability atau kestabilan harga merupakan prasyarat dasar untuk mencapai peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pertumbuhan yang tinggi. Stabilitas perekonomian menciptakan stabilitas harga karena perekonomian yang stabil mampu menyebabkan biaya yang rendah atau terjangkau bagi masyarakat. Sebaliknya, ketidakstabilan akan menyengsarakan masyarakat karena rencana masa depan sulit tercapai khususnya dalam jangka panjang terkait investasi.

B. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN EKONOMI

1. KEBIJAKAN DALAM NEGERI

a. Peran Pemerintah

Pemerintah adalah *agent of development*. Pemerintah punya peran yang sangat besar untuk suksesnya pelaksanaan pembangunan. Suparmoko (1990) menjelaskan hal tersebut karena situasi di banyak negara dewasa ini berbeda dengan ketika negara-negara yang sekarang telah maju mengalami perkembangan. Perkembangan ekonomi dewasa ini, tidak bersifat spontan seperti perkembangan abad 19. Oleh karena itu, pemerintah harus aktif mengatasi hambatan-hambatan yang ada.

Pada sejarah teori ekonomi, peran pemerintah dibutuhkan dalam rangka mengatur mekanisme pasar yang menjadi landasan pertumbuhan ekonomi dan efisiensi. Mekanisme pasar dilandasi oleh pengambilan keputusan secara individu. Dengan demikian, akan menciptakan rangsangan (*insentif*) untuk belajar yang mendorong terjadinya penemuan-penemuan baru dan kemudian diaplikasikan dalam pasar (*inovasi*). Kondisi ini akan mendorong perekonomian mencapai kondisi *pareto optimum*. Selain itu, peran pemerintah dibutuhkan dalam rangka mengatasi kegagalan pasar (*monopoli/ oligopoli, eksternalitas, ketidaksempurnaan informasi dan sebagainya*). Pemerintah juga da-

pat mendorong penciptaan modal sosial secara tidak langsung dengan menyediakan barang publik yang diperlukan, terutama hak milik dan keamanan. Menurut Tjokroamidjojo (1995) peran pemerintah dapat dilihat dari tiga macam bentuk sebagai berikut:

- 1) Sebagai penjaga keamanan dan ketertiban dalam perkembangan.
- 2) Sebagai *service state*, maka peranan pemerintah merupakan abdi sosial dari keperluan-keperluan yang perlu diatur dalam masyarakat.
- 3) Sebagai *entrepreneur* atau pendorong inisiatif usaha dari masyarakat. Pemerintah menjadi *development agent* atau unsur sebagai pembaharuan atau pembangunan.

Tiga peran ini diharapkan dapat berjalan dengan baik dan diimbangi dengan kondisi *good governance*. *World Bank* (1992) mendefinisikan *good governance* adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab, sejalan dengan prinsip demokrasi, pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi, baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran dan penciptaan legal serta *political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Konsep ini juga digunakan dalam kerangka persyaratan bantuan biaya pembangunan yang diberikan oleh *world bank*.

b. Doktrin Pembangunan Berimbang: Pandangan Rosenstein-Rodan dan Nurkse

Kebijakan pembangunan seimbang adalah kebijakan yang mengharuskan adanya pembangunan serentak dan harmonis dari berbagai sektor ekonomi, yaitu antara berbagai industri barang konsumsi dan barang modal. Keseimbangan antara sektor

industri dan sektor pertanian, sektor dalam negeri dan sektor ekspor, antara *overhead sosial* dan *overhead ekonomi*. Adanya pembangunan yang serentak tersebut diharapkan semua sektor dapat tumbuh bersama. Oleh karena itu, dibutuhkan keseimbangan antara sisi permintaan dan penawaran.

Sisi penawaran memberikan tekanan pada pembangunan serentak dari semua sektor yang saling berkaitan dan yang berfungsi meningkatkan penawaran barang. Hal ini meliputi pembangunan yang serentak dari barang setengah jadi, bahan mentah tenaga kerja, dan pertanian. Sebaliknya, dari sisi permintaan berkaitan dengan penyediaan lapangan kerja yang lebih besar dan menambah penghasilan agar terjadi peningkatan permintaan terhadap barang serta jasa.

Jika semua industri dibangun secara serentak, maka jumlah tenaga kerja yang terserap akan sangat besar. Dengan demikian, akan tercipta permintaan dari masing-masing industri satu sama lain. Rosenstein-Rodan memberi contoh tentang pabrik sepatu. Seandainya sebuah pabrik sepatu yang besar didirikan di suatu daerah, yakni 20.000 penganggur akan dikaryakan. Jika pekerja-pekerja ini membelanjakan semua upahnya untuk membeli sepatu, maka akan tercipta pasar sepatu. Akan tetapi, pekerja-pekerja tersebut ternyata tidak membelanjakan seluruh pendapatannya untuk sepatu. Jika seluruh rangkaian industri dibangun secara serentak, maka semua industri tersebut akan meluas melalui proses *multiplier*.

Dengan demikian, kebijakan pertumbuhan dengan metode ini menggariskan agar sektor modern tidak boleh terlalu jauh meninggalkan sektor tradisional. Jika semua kondisi yang diidealkan terjadi, maka apa yang disebut sebagai *vicious circle of poverty* tidak akan menjadi masalah lagi dalam proses *kapital formation*.

Terdapat kritik terhadap doktrin kebijakan pembangunan berimbang ini antara lain:

- 1) Biaya yang sangat tinggi.
- 2) Melebihi kemampuan negara berkembang.
- 3) Disproporsi faktor.
- 4) Kelangkaan sumber.
- 5) Anggapan keliru tentang hasil yang meningkat.
- 6) Pertumbuhan berimbang bukan hal pokok bagi *induced investment*.
- 7) Tidak mempertimbangkan perencanaan.
- 8) Hanya dapat diterapkan di negara maju.

c. Kebijakan Pembangunan Tidak Seimbang

Kebijakan ini dikemukakan Hirschman dan Streeten. Bertolak dari kritik terhadap model pertumbuhan berimbang, Hirschman yang kemudian didukung juga oleh Rostow mengajukan argumen kebijakan pertumbuhan tidak berimbang. Menurut kebijakan ini, pembangunan pada dasarnya adalah rangkaian ketidakseimbangan, *'disequilibrium'*. Kebijakan ini menolak keharusan investasi secara besar-besaran untuk memompa setiap sektor ekonomi yang memiliki pola hubungan komplementer. Adanya pembuatan skala prioritas investasi yang tepat, perekonomian akan berputar terus dan proyek-proyek baru (*induced investment*) akan berjalan memanfaatkan eksternalitas ekonomi maupun *sosial overhead* kapital dari proyek sebelumnya dilaksanakan. Pembangunan tidak seimbang didasarkan pada tiga pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Secara historis, pembangunan yang sudah berlaku adalah pembangunan tidak seimbang.
- 2) Tujuannya adalah untuk mempertinggi efisiensi penggunaan sumber daya yang tersedia.

- 3) Pembangunan tidak seimbang akan menciptakan *bottleneck* dalam proses pembangunan yang kemudian menjadi pendorong untuk pembangunan selanjutnya.

Seperti Hirschman, Rostow membuat sebuah idealisasi pembangunan yang bersifat *self-propelling* dan bertumpu pada dua sektor, yaitu tradisional dan modern. Oleh seorang ahli sejarah ekonomi teori ini dipercaya bahwa semua negara akan berkembang dalam sebuah rentetan fase yang sama.

Kebijakan pembangunan yang tidak seimbang dianggap lebih sesuai untuk dilaksanakan di Negara Sedang Berkembang yang pada umumnya mengalami kekurangan sumber daya. Adanya pembangunan yang tidak seimbang, upaya pembangunan dapat dipusatkan pada beberapa kegiatan tertentu. Adanya keuntungan merupakan tanda adanya ketidakseimbangan. Adanya keuntungan dalam satu bidang tertentu akan mendorong penanaman modal dalam bidang tersebut, sehingga penanaman modal baru tersebut akan menghapuskan keuntungan pada industri sejenis, tetapi akan menciptakan keuntungan pada industri lain. Ketidakseimbangan berlaku, sehingga mendorong penanaman modal di industri yang disebutkan kedua tersebut. Menurut Hirschman, peran kebijakan pembangunan adalah untuk menjamin agar ketidakseimbangan terus terjadi.

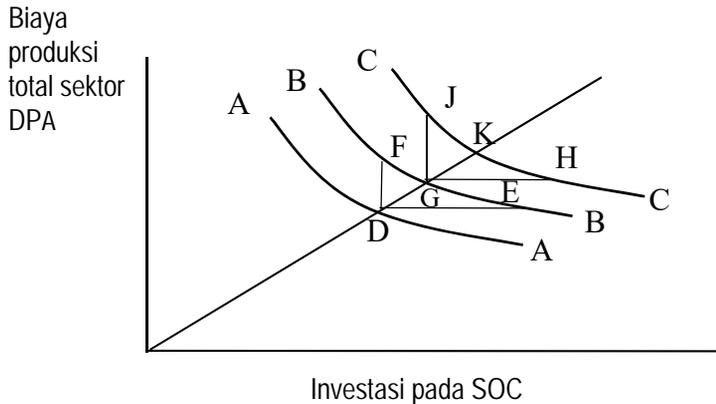
d. Ketidakseimbangan Sektor Sarana dan Prasarana

Jika sumber daya terbatas, apa yang harus dilakukan jika ingin melakukan pembangunan? Mana yang harus didahulukan? Oleh karena itu, harus ada upaya untuk pengalokasian sumber daya. Alokasi sumber daya tersebut dibedakan dalam dua pendekatan, yaitu:

- 1) Pilihan pengganti (*substitution choices*), yaitu menentukan proyek yang harus dilaksanakan.

- 2) Pilihan pengunduran (*postponement choices*), yaitu menentukan urutan proyek yang harus didahulukan pelaksanaannya.

Berikut ini adalah gambar alokasi sumber daya untuk sektor *Social Overhead Capital* (SOC) dengan sektor *Directly Productive Activities* (DPA).



Gambar 7.1
Kurva SOC dan DPA.

e. Kebijakan Tesis Usaha Minimum Kritis

Teori ini dikemukakan Leibenstein. Leibenstein mengemukakan bahwa negara terbelakang dikecam oleh lingkaran setan kemiskinan yang membuat mereka tetap berada di sekitar tingkat keseimbangan pendapatan per kapita yang rendah. Jalan keluar dari kebuntuan ini adalah “upaya minimum kritis” tertentu yang akan meningkatkan pendapatan per kapita pada tingkat pembangunan yang berkesinambungan dapat dipertahankan. Oleh karena itu, pada batas atau selama jangka waktu tertentu, perekonomian harus memperoleh rangsangan pertumbuhan yang lebih besar di atas batas minimum kritis tertentu.

Menurut Leibenstein, setiap ekonomi tunduk pada goncangan dan rangsangan. Goncangan berdampak menurunkan penda-

patan per kapita, sedangkan rangsangan cenderung meningkatkan pendapatan per kapita. Suatu negara menjadi terbelakang jika jumlah rangsangan terlalu kecil dan jumlah guncangan sangat besar. Menurutnya, peningkatan pendapatan per kapita cenderung menaikkan laju pertumbuhan penduduk. Namun, kecenderungan ini hanya sampai pada titik tertentu. Jika melebihi titik itu kenaikan pendapatan per kapita akan menurunkan tingkat kesuburan, dan ketika pembangunan memperoleh momentum, maka laju pertumbuhan penduduk menurun. Menurutnya, laju pertumbuhan maksimum penduduk antara 3%-4%.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa tingkat pendapatan per kapita bekerja sebagai kekuatan pendorong pendapatan, sedangkan tingkat pertumbuhan penduduk merupakan faktor penekan pendapatan. Oleh sebab itu, supaya terjadi pembangunan yang berkesinambungan, investasi awal harus berada di atas tingkat minimum tertentu agar menghasilkan tingkat pendapatan per kapita yang cukup besar dalam rangka mengatasi kekuatan penekan pendapatan. Selain faktor pertumbuhan penduduk, ada faktor lain yang memerlukan upaya minimum kritis, faktor tersebut adalah:

- 1) Skala ekonomi internal, upaya minimum kritis harus lebih besar di atas tingkat pendapatan subsisten agar roda pembangunan dapat bergerak.
- 2) Adanya agen pertumbuhan seperti pengusaha, investor, penabung, dan inovator.
- 3) Adanya rangsangan yang memiliki dua sifat yaitu:
 - a) Rangsangan *zero sum*, yang tidak meningkatkan pendapatan nasional, tetapi hanya bersifat upaya *distributive*.
 - b) Rangsangan *positive sum*, yang menuju pada pengembangan pendapatan nasional.

Terdapat kritik terhadap tesis usaha minimum kritis ini antara lain:

- 1) Laju pertumbuhan penduduk lebih banyak berkaitan dengan peningkatan kesehatan bukannya peningkatan pendapatan per kapita.
- 2) Mengabaikan usaha pemerintah dalam menurunkan tingkat kelahiran.

2. KEBIJAKAN LUAR NEGERI

Kebijakan Perdagangan Internasional

Arus sumber keuangan internasional berasal dari:

1) **Penanaman Modal Asing**, terdiri atas:

- FDI (*Foreign Direct Investment*) berupa pendirian anak perusahaan.
- Investasi portofolio, berupa pembelian saham, obligasi, dan sertifikat deposito.

Penanaman Modal Asing (PMA) yang sedemikian besar memberikan kekuatan ekonomi dan kadang-kadang juga kekuatan politik. Pada dasarnya, mereka adalah perusahaan global yang selalu mencari kesempatan ekonomi dan seringkali mendominasi aneka komoditas dagang di NSB. Bahkan, nilai penjualannya melebihi GDP negara-negara berkembang di tempat mereka beroperasi. Adanya PMA seringkali menimbulkan kontroversi.

➤ Argumen yang mendukung PMA

Argumen yang mendukung PMA sebagian besar berasal dari analisis neo-klasik tradisional yang memusatkan perhatiannya pada determinan pertumbuhan ekonomi. Menurut analisis ini, PMA dan bantuan luar negeri merupakan sesuatu yang positif karena mengisi kekurangan tabungan yang yang dapat dihimpun di dalam negeri, menambah cadangan devisa, memperbesar

penerimaan pemerintah, dan mengembangkan keahlian manajerial bagi negara penerima.

a) Kesenjangan tabungan-investasi

Contoh kesenjangan tabungan-investasi yang dapat diatasi dengan PMA adalah model pertumbuhan Harrod-Domar yang mengungkapkan adanya hubungan langsung antara tingkat tabungan suatu negara (α) dengan tingkat pertumbuhan output-nya (g) melalui persamaan berikut:

$$G = \sigma \alpha$$

yaitu σ adalah rasio modal-*output*.

Apabila sasaran pertumbuhan *output* nasional ditargetkan 7% per tahun dan rasio modal-*output* sebesar 3, maka tingkat tabungan yang dibutuhkan negara tersebut adalah sebesar 21% (hal ini karena $\alpha = g \cdot \sigma$). Jika tabungan domestik yang dapat dimobilisasi hanya mencapai 16% dari GDP, maka terdapat *saving gap* sebesar 5%. Jika negara yang bersangkutan dapat mengisi kekurangan tersebut dengan sumber finansial dari luar negeri (baik dari pihak swasta asing maupun pemerintah), maka negara tersebut akan lebih berpeluang dalam mencapai sasaran pertumbuhan.

b) Kesenjangan Bidang Manajemen

Semangat kewiraswastaan, teknologi produksi, dan keterampilan, kecakapan-kecakapan tersebut dibawa oleh pe-modal asing yang kemudian dialihkan kepada mitra usaha dalam negeri melalui program pelatihan dan proses *ma-gang*.

➤ Argumen yang menentang PMA

Menurunnya tingkat tabungan dan investasi domestik karena persaingan yang tidak sehat, terpacunya tingkat konsumsi domestik, dan terhambatnya perusahaan domestik sebagai berikut:

- 1) Pada jangka panjang dapat memperburuk neraca transaksi berjalan karena adanya impor barang modal dan setengah jadi oleh perusahaan multinasional, adanya pengiriman kembali keuntungan hasil bunga royalti ke negara asal.
- 2) Kontribusi pajak yang diberikan tidak terlalu besar. Adanya pemberian fasilitas PMA yang berlebihan dari tuan rumah.
- 3) Keterampilan dan pengalaman manajemen yang ditransfer tidak memberikan manfaat yang berarti bagi tuan rumah.

Secara umum, negara-negara dunia ketiga mengemukakan keberatan yang senada, yaitu:

- 1) Adanya dampak positif yang tidak merata, bahkan justru memperkuat struktur ekonomi yang dualistis dan memperburuk distribusi pendapatan, memperburuk ketimpangan kesempatan ekonomis antara daerah pedesaan dan perkotaan sebab hampir semua perusahaan multinasional beroperasi di perkotaan.
- 2) Perusahaan multinasional pada umumnya menghasilkan barang yang tidak sepenuhnya dibutuhkan penduduk. Selain itu, teknologi yang digunakan padat modal.
- 3) Sumber daya domestik cenderung dialokasikan pada proyek yang secara sosial tidak menguntungkan.
- 4) Perusahaan multinasional dapat memengaruhi kebijakan pemerintah.

- 5) Menghalangi perkembangan perusahaan lokal yang berpotensi untuk menjadi pesaing.

Bantuan Pembangunan Resmi Pemerintah dan Swasta

1) Investasi Portofolio

Investasi portofolio swasta berfungsi untuk meningkatkan modal bagi perusahaan domestik, berfungsinya bursa efek, membantu investor domestik mendiversifikasikan aset mereka. Namun, jika ditinjau dari perspektif kebijakan pemerintah, apakah arus dana investasi portofolio yang besar tersebut dapat mendukung stabilitas atau bahkan sebaliknya, yaitu menggoyahkan stabilitas karena dana investasi portofolio dapat berpindah tempat dari satu negara ke negara lain dalam waktu sangat cepat.

Bantuan Pinjaman Luar Negeri

Ada beberapa motif mengapa pihak donor memberi bantuan, motif-motif antara lain:

- 1) Motivasi Politik
- 2) Motivasi Ekonomi
- 3) Motivasi ekonomi dan kepentingan negara donor.

Sementara itu, alasan Negara Sedang Berkembang bersedia menerima bantuan, yakni:

- 1) Penerimaan NSB atas kesahihan persepsi negara maju tentang apa yang diperlukan NSB untuk memacu pembangunan.
- 2) Alasan politik.
- 3) Alasan moral.

3. Kebijakan Sektor Pertanian

Kebijakan pertanian (*agricultural policies*) adalah serangkaian tindakan yang telah, sedang, dan akan dilaksanakan pemerintah un-

tuk mencapai tujuan tertentu dalam sektor pertanian (Ellis, 1998). Kebijakan ini mengharuskan upaya pemerintah melalui peningkatan berbagai instrumen dan peraturan untuk meningkatkan produksi dan konsumsi komoditas pertanian (Pearson et al., 2004; van Tongeren, 2008; Ragasa, 2011). Secara umum, tujuannya adalah dalam rangka memajukan pertanian dan mengusahakannya agar lebih produktif, sehingga pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan petani.

Sektor pertanian merupakan sektor yang memiliki peranan strategis dalam struktur pembangunan perekonomian nasional sebuah negara. Hal-hal yang berkaitan dengan keberlangsungan sektor ini perlu menjadi perhatian penting bagi pemerintah di suatu negara, terutama negara berkembang. Penyediaan lahan, teknologi, penanganan hama, menentukan pasar, proteksi, kredit hingga kebijakan lain. Perekonomian berbasis apabila dikelola dengan baik mampu menjadi motif kebangkitan ekonomi di dunia. Negara-negara BRIC (Brazil, Rusia, India, dan China) mengimbangi inovasi di bidang teknologi industri dengan menjadikan sektor pertanian sebagai penunjang roda pembangunan di sektor riil (*buffer zone*) dan memenuhi kebutuhan pangan nasionalnya. Selain BRIC, contoh negara berkembang yang memiliki kebijakan cukup baik di sektor pertanian adalah Thailand. Strategi kunci kebijakan pertanian Thailand meliputi: (1) pengembangan kualitas hidup petani (*smart farmer*), (2) pengembangan efisiensi produksi pertanian, manajemen, dan ketahanan pangan, dan (3) pengembangan sumber daya pertanian secara efisien, seimbang, dan berkelanjutan.

Thailand merupakan salah satu negara pengekspor beras terbesar dunia selain Vietnam dan India. Beras merupakan salah satu komoditas pertanian utama dan unggulan Thailand di samping komoditas lain, seperti gula, jagung, sayuran, dan buah yang sudah menjadi produk global. Kebijakan pembangunan pertanian kunci Thailand salah satunya terkait dengan peningkatan harga beras

(*rice pledging policy*). Adanya kebijakan tersebut, pemerintah Thailand berupaya menjamin agar petani beras memperoleh harga riil yang relatif tinggi di tingkat panen dan penggilingan padi. Oleh karena itu, pemerintah Thailand menyiapkan mekanisme pembelian langsung beras petani. Selain itu, pemerintah Thailand juga melaksanakan kebijakan peningkatan harga ekspor beras. Pemerintah Thailand merasa memiliki daya tawar dan daya saing beras secara dominan di pasar global. Peningkatan harga ekspor beras tersebut ditransmisikan dan diteruskan ke harga petani dan pedagang (lee dan kesa, 2013).

4. Kebijakan Sektor Industri

Banyak Negara Sedang Berkembang memandang sektor industri sebagai sarana utama kebijakan yang paling efektif untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Sektor industri sering dijadikan objek pembangunan karena dianggap dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan kesempatan kerja lebih luas, dan mengarah ke modernisasi perekonomian negara.

Pembangunan sektor industri merupakan suatu jalan untuk meningkatkan kesejahteraan dalam rangka meningkatkan taraf hidup yang lebih maju dan lebih bermutu. Artinya, pembangunan industri merupakan tujuan pokok mencapai kesejahteraan masyarakat, bukan hanya untuk mencapai tujuan fisik saja (Arsyad L., 1999).

Produk-produk industrialisasi selalu memiliki nilai *terms of trade* yang tinggi dengan nilai tambah yang lebih besar dibandingkan produk-produk sektor lain. Keberagaman produk di sektor industri memberikan manfaat tambahan (*Marginal Utility*) yang tinggi kepada pemakainya serta memberikan marjin/keuntungan yang lebih menarik. Oleh sebab itu, industrialisasi dianggap sebagai obat mujarab (*panacea*) untuk mengatasi masalah pembangunan ekonomi di negara berkembang (Pasaribu, 2012).

Pada teori ekonomi, ada dua macam pola strategi yang dapat digunakan dalam melaksanakan suatu proses industrialisasi, yaitu:

a. Strategi Substitusi Impor/Import Substitution (SI)

Strategi ini disebut juga dengan istilah *inward-looking strategy* atau orientasi ke dalam. Kebijakan ini diawali dengan mengganti barang-barang yang tadinya diimpor dengan memproduksinya di dalam negeri. Kebijakan ini paling sering ditempuh pada tahap awal pembangunan ekonomi, khususnya pembangunan industri.

b. Strategi Promosi Ekspor/Export Promotion (PE)

Strategi ini sering disebut dengan istilah *outward looking strategy* atau orientasi ke luar. Strategi promosi ekspor memadukan promosi penjualan melalui sebuah program yang mengkoordinasi untuk berkomunikasi dengan para pembeli dan pihak lain di luar negeri untuk memengaruhi keputusan pembelian (M. Suyanto, 2007).

Strategi SI lebih menekankan pada pengembangan industri yang berorientasi pasar domestik, sedangkan PE ke pasar internasional.

5. Kebijakan Fiskal

Kebijakan Fiskal merupakan tindakan yang diambil oleh Pemerintah dalam bidang perpajakan dan anggaran belanja negara dengan tujuan untuk memengaruhi pengeluaran agregat ekonomi. Terdapat dua kebijakan fiskal yang dikenal dalam teori perekonomian, yaitu kebijakan fiskal ekspansif dan kebijakan fiskal kontraktif. Kebijakan fiskal ekspansif adalah kebijakan fiskal yang bertujuan meningkatkan output perekonomian. Sebaliknya, kebijakan fiskal kontraktif bertujuan mengurangi *output* perekonomian. Oleh karena itu, kebijakan fiskal juga merupakan instrumen stabilisasi pemerintah.

Kebijakan fiskal berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi suatu negara. Transmisinya dapat berjalan melalui dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi. Solow (1970) menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi atau peningkatan *output* perekonomian dipengaruhi oleh tabungan, pertumbuhan populasi, dan kemajuan teknologi. Tabungan merupakan instrumen yang dipengaruhi oleh kebijakan fiskal (penerimaan pajak dan belanja negara memengaruhi tabungan nasional).

Secara tidak langsung, kebijakan fiskal ikut mengambil peran dalam pertumbuhan ekonomi. Keputusan-keputusan pemerintah mengenai kebijakan fiskal yang ditempuh suatu negara dapat mengubah *output* dalam perekonomian, baik bertambah maupun berkurang. Penurunan pajak T maupun peningkatan belanja G memiliki *multiplier effect* (efek pengganda) terhadap pendapatan (*output* perekonomian) suatu negara. Alasannya ialah pendapatan yang lebih tinggi menyebabkan konsumsi yang lebih tinggi. Kenaikan belanja pemerintah menyebabkan meningkatnya pendapatan, kemudian meningkatkan konsumsi, lalu meningkatkan pendapatan, selanjutnya meningkatkan konsumsi, dan begitu seterusnya.

Selain itu, kebijakan fiskal juga ditujukan dalam rangka menggalakkan pembangunan ekonomi, seperti meningkatkan laju investasi, mendorong investasi, meningkatkan kesempatan kerja, meningkatkan stabilitas ekonomi di tengah ketidakstabilan internasional, menanggulangi inflasi, meningkatkan dan mendistribusikan pendapatan nasional.

Kebijakan fiskal bertujuan meningkatkan dan memacu laju investasi di sektor swasta dan sektor negara. Dalam rangka itu, pemerintah harus menerapkan kebijakan investasi berencana di sektor publik. Selain itu, kebijakan fiskal memberikan solusi, yaitu dapat

meningkatkan rasio tabungan yang dapat digunakan untuk meningkatkan, memacu, mendorong, dan menghambat laju investasi.

6. Kebijakan Moneter

Seperti halnya kebijakan fiskal, kebijakan moneter di suatu negara juga diarahkan pada pencapaian sasaran ekonomi. Secara khusus, kebijakan moneter biasanya ditujukan untuk menjaga kestabilan mata uang suatu negara (inflasi dan nilai tukar). Kebijakan moneter juga merupakan usaha yang dilakukan untuk memperoleh peningkatan pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas harga pasar. Agar hal ini dapat dicapai, Bank Sentral yang juga dikenal sebagai otoritas moneter mengeluarkan kebijakan untuk mengatur keuangan negara agar lebih terkendali, seperti ketersediaan uang, distribusi, kesempatan kerja serta laju inflasi yang terkendali.

Keseimbangan pasar uang yang menjadi tujuan utama dari kebijakan moneter dapat mencerminkan keseimbangan pasar lainnya, antara lain pasar barang dan jasa. Jika jumlah uang yang dibutuhkan lebih banyak dari yang dibutuhkan, maka akan mendorong meningkatnya permintaan barang dan jasa, sehingga akan meningkatkan laju inflasi.

C. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN EKONOMI DI INDONESIA

Indonesia hingga saat ini masih termasuk ke dalam kategori Negara Sedang Berkembang. Mendorong Indonesia maju membutuhkan adanya lompatan besar dalam merancang strategi pembangunan nasional, terutama untuk memastikan terjadinya akselerasi pencapaian Indonesia maju dengan tingkat GDP yang besar di dunia. Dalam mewujudkan kebijakan perencanaan dan rencana pembangunan nasional, Indonesia memiliki kementerian yang fokus pada hal ini, yaitu Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasio-

nal (Kementerian PPN/Bappenas) yang berperan dalam menyusun kebijakan/pengambil keputusan serta menjadi koordinator kegiatan pembangunan.

Pada pelaksanaan amanat proses pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas akan berpatokan kepada RPJMN yang berupa dokumen perencanaan pembangunan yang disusun untuk jangka waktu lima tahun dan merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program presiden terpilih dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional selama 20 tahunan.

Sejak 2005 hingga kini, terdapat empat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang telah disusun, berdasarkan masa kepemimpinan presiden dan wakil presiden hasil pemilihan umum yang terdiri atas:

1. RPJM Nasional I Tahun 2004–2009, dikenal sebagai Indonesia Sehat.
2. RPJM Nasional II Tahun 2010–2014, dikenal sebagai Indonesia *Smart*.
3. RPJM Nasional III Tahun 2015–2019, dikenal sebagai Nawacita.
4. RPJM Nasional IV Tahun 2020–2024.

RPJMN ini kemudian akan diejawantahkan kembali ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP). RKP adalah rencana pembangunan tahunan nasional yang memuat prioritas pembangunan nasional, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program kementerian/lembaga, lintaskementerian/lembaga kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif. RKP merupakan pedoman bagi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

1. Kinerja Pembangunan di Indonesia

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Indonesia pada 2015-2019, memprioritaskan pada upaya mencapai

kedaulatan pangan, kecukupan energi, serta pengelolaan sumber daya maritim dan kelautan. Melihat permasalahan dan tantangan utama yang dihadapi, serta pencapaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan jangka menengah nasional untuk tahun 2015-2019 adalah terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong (Bappenas, 2019).

Tujuan pengembangan wilayah pada tahun 2015-2019 adalah mengurangi kesenjangan pembangunan wilayah antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI) melalui percepatan juga pemerataan pembangunan wilayah dengan menekankan keunggulan kompetitif perekonomian daerah berbasis SDA yang tersedia, SDM berkualitas, penyediaan infrastruktur, serta meningkatkan kemampuan ilmu dan teknologi secara terus-menerus. Berdasarkan upaya percepatan dan pemerataan tersebut, kesenjangan pembangunan wilayah antara KBI dan KTI diharapkan akan semakin berkurang, ditandai oleh meningkatnya kontribusi PDRB KTI terhadap PDB dari sekitar 20,00 persen (2014) menjadi 22,00-25,00 persen pada tahun 2019.

Tabel 7.1. Capaian Sasaran Pertumbuhan Ekonomi Wilayah

Uraian	2014	2015		2016	
	Baseline	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Sumatera	4,60	5,70	3,50	6,20	4,29
Jawa	5,60	5,70	5,50	6,50	5,61
Bali-Nusa Tenggara	5,90	4,60	10,30	7,30	5,85
Kalimantan	3,30	5,00	1,30	5,90	1,74
Sulawesi	6,90	7,40	8,20	7,60	7,42
Maluku	6,10	6,50	5,70	6,90	5,77
Papua	4,30	11,70	6,80	13,20	7,86

Sumber: Evaluasi paruh waktu RPJMN 2015-2019.

Pada 2015, kinerja perekonomian KTI secara keseluruhan dapat tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Wilayah

Nusa Tenggara-Bali, Sulawesi, dan Papua cenderung meningkat. Sedangkan, wilayah lainnya lambat dibandingkan dengan data baseline tahun 2014. Padahal, ada kebijakan dan program pengurangan kemiskinan, jumlah penduduk miskin berhasil diturunkan, tetapi belum memenuhi sasaran yang diharapkan di KTI dan KBI.

Tabel 7.2. Capaian Sasaran Kemiskinan Wilayah

Uraian	2014	2015		2016	
	Baseline	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Sumatera	11,20	10,20	11,55	9,60	11,03
Jawa	10,80	9,90	10,67	9,30	10,09
Bali-Nusa Tenggara	14,40	17,70	15,47	16,40	14,71
Kalimantan	6,60	6,30	6,42	5,90	6,18
Sulawesi	11,70	10,70	11,32	9,90	10,97
Maluku	14,30	13,90	14,32	13,10	14,01
Papua	29,40	29,80	27,65	27,40	27,63

Sumber: Evaluasi paruh waktu RPJMN 2015-2019.

Tingkat kemiskinan yang tinggi menunjukkan struktur sosial dalam masyarakat miskin kurang mampu memanfaatkan dan akses terbatas dalam pengelolaan sumber daya alam yang tersedia. Tingkat pengangguran juga berhasil ditekan seiring dengan meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi wilayah. Tingkat pengangguran di KTI menurun secara signifikan, walaupun belum memenuhi target yang diharapkan. Pada lain pihak, beberapa wilayah di Sumatera dan Jawa memiliki tingkat pengangguran yang cenderung meningkat. Tingginya tingkat pengangguran di beberapa wilayah ini menunjukkan peningkatan angkatan kerja baru di daerah tersebut belum dapat diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja (Bappenas, 2019).

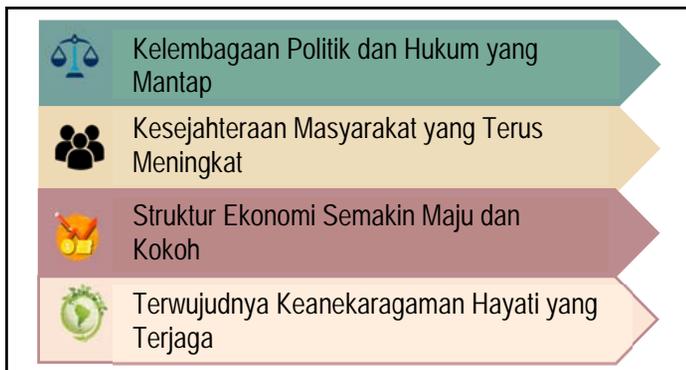
Saat ini, pertumbuhan ekonomi terhitung relatif tinggi sebab hal tersebut tercapai karena didorong oleh pertumbuhan di berbagai sektor. Industri pengolahan tumbuh rata-rata 4,3 persen per tahun dan industri pertanian tumbuh rata-rata 3,7 persen per tahun. Hal

ini dipengaruhi oleh perbaikan infrastruktur pertanian untuk memacu produktivitas. Sementara itu, industri jasa mampu menjadi motor pertumbuhan ekonomi, diantaranya industri jasa informasi dan komunikasi serta industri transportasi dan pergudangan yang tumbuh masing-masing sebesar 8,8 dan 7,4 persen per tahun (Bappenas, 2019).

Arah dan Rencana Kebijakan Pembangunan Indonesia

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025.

RPJMN 2020-2024 akan memengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, yakni pendapatan per kapita Indonesia diharapkan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income country/MIC*) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik. Terdapat empat pilar dari RPJMN ke IV tahun 2020-2024 yang merupakan amanat RPJPN 2005-2025, yaitu:



Gambar 7.2
Empat Pilar RPJMN 2020-2024.

Empat pilar tersebut akan diaplikasikan melalui tujuh agenda pembangunan yang terdiri atas:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi dan pertumbuhan yang berkualitas.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan.
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
4. Membangun kebudayaan dan karakter bangsa.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas polhukhanham dan transformasi pelayanan publik.

Selanjutnya, risiko ketidakpastian masih akan mewarnai perkembangan perekonomian dunia. Pertumbuhan ekonomi dan perdagangan dunia diperkirakan akan cenderung stagnan dengan tren melambat. Adapun risiko ketidakpastian lainnya yang perlu diantisipasi antara lain perang dagang, perlambatan ekonomi China, dan tekanan normalisasi kebijakan moneter yang beralih dari AS ke kawasan Eropa serta pandemi covid yang tentu harus membuat semua negara melakukan penyesuaian terhadap rencana pembangunan ekonomi yang ada.

BAHAN DISKUSI

1. Jelaskan menurut pendapat Anda, apa pentingnya menetapkan tujuan kebijakan pembangunan bagi suatu negara?
2. Bagaimana peran pemerintah sebagai *Agent of Development* dalam mendorong proses dan keberhasilan pembangunan disuatu negara?

3. Bagaimana pendapat Anda mengenai kebijakan penanaman modal asing dalam mendorong pembangunan ekonomi? Apa manfaat dan dampak apabila suatu negara menggunakan kebijakan tersebut?
4. Jelaskan pro kontra kebijakan pembangunan berimbang!
5. Bagaimana Anda menilai kinerja pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan apa yang dapat Anda sarankan dalam rangka mendorong pembangunan Indonesia?

BAB VIII

KONSEP PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI

A. PERENCANAAN EKONOMI

Banyak pengertian tentang perencanaan, di antaranya perencanaan diartikan sebagai pengambilan keputusan utama ekonomi tentang apa dan berapa banyak, bagaimana, bila, dan di mana akan diproduksi, serta akan dialokasikan untuk siapa, oleh badan pengambil keputusan yang berwenang atas dasar pengamatan menyeluruh terhadap sistem perekonomian sebagai satu kesatuan. Dengan kata lain, perencanaan ekonomi adalah pengendalian dan pengaturan perekonomian dengan sengaja oleh suatu penguasa pusat untuk mencapai suatu sasaran dan tujuan tertentu dalam jangka waktu tertentu pula.

Tujuan perencanaan di negara berkembang, antara lain:

1. Meningkatkan laju pembangunan ekonomi..
2. Memperbaiki dan memperkuat mekanisme pasar.
3. Menghapus pengangguran.
4. Kebutuhan pengembangan sektor pertanian.
5. Mengadakan prasarana/*overhead* ekonomi dan sosial.
6. Menghilangkan kemiskinan.

Syarat-syarat perencanaan:

1. Adanya komisi perencanaan.
2. Adanya data statistik.
3. Memiliki tujuan.
4. Memiliki sasaran dan prioritas.
5. Memobilisasi sumber.
6. Adanya keseimbangan dalam rencana.
7. Adanya administrasi yang efisien dan tidak korup.
8. Adanya pertanggungjawaban ekonomi dalam administrasi.

9. Dasar pendidikan yang baik.
10. Memperhitungkan tingkat konsumsi dan macam konsumsi sendiri dengan tidak meniru pola negara lain.
11. Adanya dukungan masyarakat.

Menurut Prof Lewis dalam Jhingan, perencanaan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Perencanaan dengan komando.
2. Perencanaan dengan rangsangan.

B. PERENCANAAN DENGAN KOMANDO

Perencanaan ini merupakan bagian integral dalam masyarakat sosialis. Ada penguasa pusat yang merencanakan, mengatur, dan memerintah pelaksanaan rencana sesuai dengan sasaran prioritas yang telah ditentukan sebelumnya. Pemerintah meletakkan posisi komando dengan mengambil alih seluruh sektor yang ada.

Kekurangan dalam sistem komando:

1. Perencanaan ini berkaitan dengan sistem birokrasi yang totaliter, di dalamnya sama sekali tidak ada kedaulatan konsumen.
2. Perencanaan ini selalu tidak memuaskan karena sangat rumit.
3. Tidak luwes.
4. Terdapat kecenderungan pemaksaan mengakibatkan standarisasi yang berlebihan demi mempermudah proses produksi.

C. PERENCANAAN DENGAN RANGSANGAN/ PARTISIPATIF

Pada perencanaan jenis ini, rakyat diajak berbuat dengan cara tertentu melalui berbagai langkah fiskal dan moneter. Jika badan perencana ingin mendorong produksi suatu komoditas tertentu, maka pemerintah dapat memberi subsidi kepada perusahaan. Namun, jika menemui kelangkaan barang, maka pemerintah dapat melakukan pengendalian harga dan pen-jatahan.

1. Perencanaan campuran

Perekonomian campuran adalah suatu lingkungan kelembagaan, yakni sebagian dari sumber daya produktif dimiliki dan dikelola oleh pihak swasta. Sedangkan, sebagian lainnya dimiliki oleh pemerintah. Besarnya proporsi kepemilikan antara swasta dan pemerintah berbeda-beda di setiap negara. Pada perekonomian kapitalis, biasanya kepemilikan pemerintah kecil. Sedangkan, dalam perekonomian campuran pengaruh pemerintah sangat besar.

Lingkungan kelembagaan merupakan dua aspek utama dari perencanaan pembangunan perekonomian campuran, yaitu:

- a. Penggunaan tabungan dalam masyarakat dan pembayaran luar negeri dilakukan dengan sengaja oleh pemerintah untuk melaksanakan berbagai investasi dalam proyek pemerintahan, serta menyalurkan sumber daya di berbagai bidang yang dapat memberikan sumbangan demi terwujudnya kemajuan ekonomi jangka panjang. Contohnya, pembangunan sekolah, listrik, tenaga air, dan infrastruktur lainnya.
- b. Kebijakan pemerintah merangsang dan mengarahkan beberapa hal dalam mengendalikan kegiatan ekonomi swasta, sehingga menjamin hubungan serasi antara keinginan swasta dengan pemerintah pusat. Keharusan adanya perencanaan di negara sedang berkembang disebabkan oleh keadaan-keadaan kelembagaan yang memaksa tidak adanya pasar yang terorganisir dengan baik, kebutuhan transformasi kelembagaan yang cepat, kebutuhan mengalokasikan sumber daya yang produktif di bidangnya, dan dampak psikologis program tujuan nasional.

D.UNSUR DAN FUNGSI PERENCANAAN

Unsur dan fungsi dalam perencanaan pembangunan dibahas masalah perencanaan pembangunan yang memberikan pengertian berbeda-beda. Tidak sedikit pula dokumen perencanaan nasional atau pernyataan dari pemimpin politik yang mengartikan konsep perencanaan pembangunan

menurut pandangan mereka sendiri. Belum ada kesepakatan tentang istilah perencanaan pembangunan tersebut.

Menurut Melville Branch, perencanaan merupakan aktivitas berkelanjutan yang dilakukan dan diinginkan untuk masa depan serta bagaimana proses untuk mencapainya. Selain itu, menurut Conyers dan Hills bahwa perencanaan adalah suatu proses yang berkesinambungan dan mencakup proses pengambilan keputusan atau alternatif sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang. Sedangkan, Watherson mendefinisikan bahwa perencanaan merupakan suatu usaha sadar terorganisasi dan terus menerus guna memilih alternatif yang terbaik dari sejumlah alternatif yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu.

Berdasarkan definisi di atas, menurut Lincolin Arsyad (2018), dapat disimpulkan bahwa terdapat empat elemen dasar dari perencanaan, yaitu:

1. Merencanakan berarti memilih. Artinya, perencanaan merupakan suatu proses memilih berbagai kegiatan yang diinginkan, dengan segala keterbatasan sumber daya yang dimiliki, sehingga tidak semua kegiatan tersebut dapat dilakukan dan tercapai pada saat bersamaan. Hubungan antara perencanaan dan proses pengambilan keputusan sangatlah erat, sehingga pembahasan mengenai pendekatan-pendekatan alternatif dalam proses pengambilan keputusan berkaitan dengan faktor-faktor yang memengaruhi proses pembuatan keputusan.
2. Perencanaan merupakan alat pengalokasian sumber daya. Sumber daya merupakan sesuatu yang dipandang dapat berguna dalam pencapaian suatu tujuan tertentu. Sumber daya yang dimaksud mencakup sumber daya alam, manusia, modal, keuangan, dan kelembagaan.
3. Perencanaan merupakan alat mencapai tujuan. Dalam konsep perencanaan alat merupakan tujuan berkaitan dengan sifat dan proses penetapan tujuan.

4. Perencanaan untuk masa depan. Elemen penting dalam perencanaan adalah elemen waktu. Tujuan dalam perencanaan dirancang sedemikian rupa supaya dapat dicapai di masa yang akan datang.

Salah satu tujuan penting dari perencanaan ekonomi di negara berkembang adalah untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi yaitu perlu meningkatkan laju modal dengan cara mendorong kenaikan tingkat tabungan, pendapatan, dan investasi. Namun, seiring dengan adanya peningkatan pada pembentukan modal seringkali timbul berbagai kendala yang dihadapi salah satunya, yaitu kemiskinan. Tingkat tabungan yang rendah disebabkan pula oleh rendahnya tingkat pendapatan. Akibatnya, laju investasi akan melambat dan mengakibatkan rendahnya modal serta produktivitas. Oleh sebab itu, memutus lingkaran kemiskinan ini diperlukan pembangunan yang terencana dengan baik. Inilah pentingnya perencanaan ekonomi di negara berkembang.

Terdapat dua cara yang dapat digunakan untuk memotong lingkaran kemiskinan, yaitu:

1. Melakukan pembangunan yang terencana dengan mencari modal dari luar negeri.
2. Menghimpun tabungan wajib atau diistilahkan sebagai industrialisasi dengan kemampuan sendiri.

Kebutuhan akan perencanaan di negara sedang berkembang didorong dengan adanya keinginan mengurangi angka pengangguran. Perlunya sebuah perencanaan untuk mengurangi pengangguran dapat dilakukan dengan cara menyediakan lapangan kerja. Oleh sebab itu, diperlukan dorongan dari badan perencanaan nasional untuk mengatasi masalah tersebut.

E. SUMBER DAYA PERENCANAAN

Sumber daya perencanaan memiliki daya tarik dari beberapa kategori lingkungan fisik, lingkungan regulasi, dan lingkungan perilaku.

1. Lingkungan fisik merupakan upaya pemerintah menyediakan jasa/fasilitas untuk memenuhi kebutuhan usaha serta industri di daerahnya untuk menunjang kualitas hidup masyarakat lokal yakni hiburan, pendidikan, perumahan, pariwisata, pusat perbelanjaan, dan lain-lain.
2. Lingkungan regulasi merupakan sistem regulasi yang dibentuk untuk menarik dan mengembangkan dunia usaha pemda. Perizinan dan birokrasi, sumbangan dan pungutan, isu tenaga kerja dan perburuhan, serta orientasi kebijakan ekonomi daerah.
3. Lingkungan perilaku merupakan perilaku investor mengenai reaksi masyarakat pada daerah yang diinvestasikan. Kearifan lokal, budaya respon, keamanan wilayah setempat.

F. SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DI INDONESIA

Masa orde lama, strategi pembangunan didasarkan pada pendekatan perencanaan pembangunan yang menekankan pada usaha membangun politik karena sebagian dari bentuk usaha untuk mempertahankan kemerdekaan nasional. Usaha-usaha dalam perencanaan ekonomi masa orde lama, sebagai berikut:

1. Perencanaan pada berbagai sektor ekonomi yang diberi nama *Plan Product* tiga tahun Republik Indonesia tahun 1948-1950 dengan fokus di bidang pertanian, peternakan, dan industri kehutanan.
2. Rencana pembangunan lima tahunan pada tahun 1956-1960.
3. Rencana pembangunan nasional semesta berencana pada tahun 1961-1969.

Seiring waktu, memasuki masa Orde Baru, perencanaan pembangunan berpangkal pada *National Building Approach* yang meliputi:

1. Jangka panjang, yang didasarkan pada pembangunan secara utuh dan terpadu antara berbagai aspek kehidupan masyarakat.

2. Jangka menengah, yang didasarkan pada pendekatan pembangunan ekonomi dan sosial yang menitik beratkan pada sektor pertanian, sosial, serta kelembagaan, dan keadilan sosial.

Rencana pembangunan lima tahunan pertama (REPELITA I) dalam masa orde baru dimulai dan disusun pada tanggal 1 April 1969. Kemudian, program dilanjutkan dengan REPELITA selanjutnya. Pada rumusan dan pelaksanaan, teori penyusunan suatu strategi pembangunan ekonomi nasional, pemerintah tidak lepas dari asas politik ekonomi yang di-anut, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 3 tentang demokrasi ekonomi.



Gambar 8.1
Tahap-Tahap Perencanaan Menurut UU-No 25 Tahun 2005.

Pendekatan Perencanaan di Indonesia Menurut UU NO. 25/2005 tentang SPPN:

1. Politik: Pendekatan ini memandang bahwa pemilihan Presiden/ Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon presiden/ kepala daerah.

2. Teknokratik: Perencanaan dilaksanakan dengan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.
3. Partisipatif: Perencanaan dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan.
4. Atas-bawah, '*top-down*'.
5. Bawah-atas, '*bottom-up*'.

Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselenggarakan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) yang dilaksanakan baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa.

G. KOMPONEN PERENCANAAN STRATEGI

1. Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan (UU No. 25/2004 (SPPN)).
2. Misi rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi UU No. 25/2004 (SPPN).
3. Tujuan merupakan sasaran atau hasil yang ingin dicapai dari misi yang telah ditetapkan. Kapan tujuan dimaksudkan agar pencapaian misi lebih terarah dan terfokus tujuan sedapat mungkin diturunkan menjadi sasaran yang bersifat kuantitatif.
4. Strategi/kebijakan merupakan cara bagaimana suatu organisasi mencapai tujuan secara tepat, sistematis, terarah, dan rasional. Strategi harus mampu memaksimalkan keunggulan kompetitif dan meminimumkan kelemahan kompetitif. Strategi disusun berdasarkan acuan pada analisis SWOT. Perumusan strategi dibagi menjadi tiga tahap, yakni penyusunan dan pengevaluasian alternatif strategi, penentuan/pemilihan strategi, dan implementasi strategi.

5. Program seperangkat aktivitas yang disusun secara sistematis sebagai penjabaran dari strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan. Instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah (UU No. 25/2004).
6. Kegiatan merupakan arah/tindakan pelaksanaan yang diambil oleh pemerintah pusat/daerah untuk mencapai tujuan.

H. MODEL-MODEL PERENCANAAN

1. Model Pertumbuhan Agregat: Memproyeksikan Variabel-Variabel Makro

Model ini mengulas perekonomian secara keseluruhan dengan mempergunakan variabel-variabel makro ekonomi yang dinilai paling memengaruhi tingkatan dan laju pertumbuhan *output* nasional, yaitu tabungan, investasi, cadangan modal, nilai ekspor, impor, bantuan luar negeri, dan lain-lain. Model ini merupakan metode yang cocok untuk meramalkan pertumbuhan *output* dalam kurun waktu antara tiga sampai lima tahun. Hampir semua model yang tergolong sebagai model pertumbuhan agregat memiliki kemiripan gagasan dengan model dasar Harrod-Domar, yang menganggap bahwa terbatasnya tabungan merupakan kendala besar untuk pertumbuhan ekonomi agregat. Model H-D dapat digunakan untuk merinci tingkat tabungan domestik yang dibutuhkan untuk mencapai target tersebut. Jika kita ketahui ber-sama bahwa,

$S = s Y$ dan

$$W + \Pi = Y \dots\dots\dots(1)$$

$$S_{\Pi} \Pi + S_w W = I \dots\dots\dots(2)$$

Keterangan:

- W = Pendapatan dari upah.
- Π = Pendapatan dari keuntungan.

$$S_{\pi} \text{ dan } S_w = \text{Nilai kecenderungan menabung masing-masing dari } \pi \text{ dan } w.$$

maka modifikasi dari rumus pertumbuhan H-D menjadi

$$k(g + \sigma) = (S_{\pi} - S_w) (\pi/Y) + S_w$$

Keterangan:

- g = Tingkat pertumbuhan output yang menjadi target.
- σ = Bagian dari cadangan modal.
- k = Rasio modal terhadap *output*.

2. Model Input-Output

Pendekatan ini memperhitungkan kenyataan bahwa kegiatan ekonomi dalam sektor-sektor industri utama senantiasa saling berhubungan satu sama lain dalam suatu bentuk himpunan persamaan aljabar yang simultan. Pada akhirnya, akan menunjukkan proses produksi atau teknologi yang digunakan dalam masing-masing sektor industri. Semua sektor industri dianggap, selain sebagai produsen *output* tertentu, juga sebagai konsumen atau pihak yang menggunakan *output* dari industri lain sebagai inputnya. Sebagai contoh adalah sektor pertanian tanaman padi, sektor ini juga menggunakan input yang merupakan *output* dari sektor industri mesin dan sektor industri pupuk.

Input-Output berdampak langsung maupun tidak langsung dari perubahan permintaan terhadap produk suatu industri yang diperkirakan akan terjadi terhadap *output*, lapangan kerja, dan impor yang dilakukan berbagai sektor industri lainnya. Hal itu dapat ditelusuri pada perekonomian secara keseluruhan yang membentuk jaringan interdependensi ekonomi yang rumit. Dengan demikian, telah ditetapkannya target *output* untuk masing-masing sektor ekonomi, maka model antar industri dapat digunakan untuk menentukan jenis dan kuantitas bahan-bahan setengah jadi, barang impor, tenaga kerja, dan modal yang diperlukan. Sehingga perencanaan ekonomi yang komprehensif secara praktis benar-benar dapat

dilaksanakan sesuai dengan tingkat produksi dan persediaan sumber-sumber daya yang diperlukan.

BAHAN DISKUSI

1. Jelaskan menurut Anda peranan penting dari perencanaan pembangunan dan jabarkan alasannya mengapa dianggap penting!
2. Berikan contoh implikasi pokok dari perencanaan pembangunan nasional pada tahap daerah!
3. Bagaimana peran pemerintah Indonesia dalam pembuatan dan pelaksanaan perencanaan? Apakah untuk jangka waktu menengah kurang lebih lima tahun sudah efektif dan efisien?
4. Berikan studi kasus dokumen perencanaan yang dibuat oleh pemerintah tingkat pusat dan daerah. Jabarkan!
5. Menurut Anda, seberapa besar peranan pemerintah dalam pembangunan daerah? Mengapa penting!

BAB IX

DIMENSI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

A. PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Akhir-akhir ini, isu tentang memburuknya lingkungan hidup akibat aktivitas ekonomi semakin meningkat. Terjadinya tanah longsor, banjir, kebakaran hutan, kasus lapindo, dan isu terbesar yang mengancam seluruh permukaan bumi adalah berupa pemanasan global yang dampaknya sudah mulai terasa. Sekarang semakin banyak orang yang menyadari bahwa upaya-upaya pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh negara-negara maju maupun negara berkembang telah mengakibatkan degradasi lingkungan dan perusakan alam yang terus menerus.

Bertolak dari kebutuhan ekonomi yang terus menerus dan cenderung semakin besar serta adanya ketidaktahuan sebagian anggota masyarakat juga sikap masa bodoh dari anggota masyarakat dunia yang lain mengakibatkan eksploitasi terhadap alam terus berlangsung dan belum ada tanda-tanda adanya niat bersama untuk menghentikannya. Pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan tanpa memperhatikan aspek pelestarian, dengan sendirinya telah meningkatkan tekanan terhadap kualitas lingkungan hidup pada masa yang akan datang. Bahkan, akan mengancam swasembada pangan, kondisi pemerataan distribusi pendapatan, dan potensi pertumbuhan ekonomi di masa yang akan datang.

Berkaitan dengan persoalan lingkungan hidup, terdapat persoalan mendasar yang perlu memperoleh perhatian. Persoalan tersebut adalah tentang pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan yang berkelanjutan atau berkesinambungan (*sustainability*) adalah pertumbuhan ekonomi di satu sisi dan pelestarian lingkungan hidup atau sumber-sumber alam di sisi yang lain. Secara ringkas, pengertian pembangunan berkelanjutan adalah pemenuhan generasi sekarang tanpa merugikan kebutuhan generasi mendatang (Todaro). Definisi lain, yakni pembangunan berkelanjutan diartikan sebagai pembangunan yang tidak menurunkan

kapasitas generasi yang akan datang untuk melakukan pembangunan, meskipun terdapat penyusutan cadangan sumber daya alam dan memburuknya lingkungan, tetapi keadaan tersebut dapat digantikan oleh sumber daya lain baik oleh sumber daya manusia maupun oleh sumber daya kapital. Dalam arti sempit, pembangunan berkelanjutan dapat pula diartikan sebagai pembangunan yang tidak mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk melakukan pembangunan, tetapi dengan menjaga agar fungsi sumber daya alam dan lingkungan yang ada tidak menurun tanpa digantikan oleh sumber daya lainnya.

Hal terpenting dari pengertian-pengertian di atas adalah bahwa pertumbuhan ekonomi pada masa yang akan datang dan kualitas kehidupan umat manusia secara keseluruhan sangat ditentukan oleh kualitas lingkungan hidup yang ada pada saat ini. Oleh sebab itu, para perencana pembangunan seharusnya senantiasa melibatkan perhitungan lingkungan (*environmental accounting*) dalam perumusan kebijakannya. Kelestarian lingkungan di satu sisi atau kerusakan lingkungan pada sisi yang lain harus diperhitungkan sebagai faktor penambah atau faktor pengurang tingkat pertumbuhan ekonomi, serta tingkat kemajuan kesejahteraan penduduk secara agregat. Atas dasar itu, perhitungan GNP harus dikoreksi menjadi NNP* (*sustainable national income*) atau pendapatan nasional neto yang berkesinambungan sebagai berikut:

$$\text{NNP}^* = \text{GNP} - D_m - D_n$$

Keterangan:

NNP* = Pendapatan nasional neto berkesinambungan.

D_m = Depresiasi aset-aset/modal manufaktur.

D_n = Depresiasi aset-aset/modal lingkungan yang dinyatakan dalam satuan moneter 'uang' tahunan.

Jika dirinci lagi menjadi

$$\text{NNP}^* = \text{GNP} - D_m - D_n - R - A$$

Keterangan:

- R = Pengeluaran atau belanja yang diperlukan untuk mengembalikan modal lingkungan (hutan, sumber perikanan, dan lain-lain) seperti sediakala.
 A = Biaya yang harus dikeluarkan untuk memperbaiki kerusakan modal lingkungan yang terlanjur terjadi pada masa sebelumnya (pencemaran udara, air, dan penurunan kualitas tanah).

Kerusakan lingkungan muncul akibat aktivitas ekonomi, baik yang dilakukan masyarakat secara perseorangan, seperti pengambilan kayu bakar di hutan dengan cara menebang pohon, pembakaran hutan untuk pembukaan ladang baru, pembuangan sampah dapur yang tidak dapat diurai oleh tanah, dan lain-lain, dapat pula kerusakan lingkungan disebabkan oleh aktivitas industri. Aktivitas industri sering menimbulkan eksternalitas, yakni dampak positif atau negatif yang timbul dan diterima oleh pihak lain, sebagai akibat adanya kegiatan suatu pihak atau pelaku ekonomi.

Alam aktivitas ekonomi perseorangan, eksternalitas negatif seperti pencemaran udara, air, dan lain-lain, sering belum dipertimbangkan sebagai salah satu bagian dari biaya yang harus dimasukkan dalam perhitungan pendapatan nasional. Terlebih, jika eksternalitas negatif tersebut dibuang begitu saja ke alam. Namun, perkembangan akhir-akhir ini menunjukkan semakin banyaknya perusahaan-perusahaan, terutama perusahaan besar yang terpaksa memasukkan biaya pengolahan limbah guna mengurangi pencemaran ke dalam perhitungan biaya produksi dan harga produk yang dihasilkan.

B. MILLENIUM DEVELOPMENT GOALS (MDGs)

Lima belas tahun lalu, kerangka hukum yang digunakan sebagai pelaksanaan di Indonesia pada masa MDGs adalah Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010. Inpres ini memberikan haluan besar tentang pelaksanaan pembangunan yang berkeadilan untuk kesinambungan serta penajaman prioritas pembangunan nasional ditujukan kepada beberapa kepala instansi dan lembaga pemerintah daerah.



Gambar 9.1
Indikator *Millenium Development Goals*
(Sumber: *UNDP org.*).

Isu-isu yang diusung MDGs sangat penting, meskipun terkesan sederhana karena terkonsentrasi pada hal-hal yang sifatnya kuantitatif. MDGs bukan sekedar soal ukuran dan angka-angka, tetapi lebih untuk mendorong tindakan nyata. Mencegah terjadinya kematian ibu lebih penting daripada sekedar menghitung berapa banyak perempuan meninggal sewaktu melahirkan. Terpenting tidak hanya menghitung berapa banyak anak Indonesia yang kekurangan gizi, tetapi juga memastikan bahwa semua anak memperoleh asupan yang cukup. Salah satu manfaat dari MDGs adalah berbagai persoalan yang diusung menjadi perhatian berbagai pihak termasuk masyarakat secara luas. Namun, laporan tentang kemajuan MDGs di tingkat kabupaten juga sangat diperlukan.

Tabel 9.1. Indikator MDGs

KOMPONEN	TUJUAN
1. Memberantas Kemiskinan dan Kelaparan.	➤ Mengurangi separuh proporsi penduduk yang berpendapatan kurang dari \$ 1 per hari. Mengurangi separuh proporsi penduduk yang menderita kelaparan.
2. Mewujudkan Pendidikan Dasar untuk Semua.	➤ Dengan cara memastikan bahwa semua anak, baik perempuan maupun laki-laki, dapat menyelesaikan pendidikan dasar.
3. Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.	➤ Menghapus ketimpangan gender di jenjang pendidikan dasar dan menengah pada tahun 2005, serta di semua jenjang pendidikan tahun 2015.
4. Menurunkan Angka Kematian Anak.	➤ Mengurangi jumlah dua pertiga kematian anak di bawah usia lima tahun.
5. Meningkatkan Kesehatan Ibu	➤ Mengurangi tiga per empat jumlah kematian Ibu melahirkan.
6. Memerangi Hiv/ Aids, Malaria dan Penyakit Menular.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Menghentikan dan mulai menurunkan laju penyebaran infeksi HIV/AIDS. ➤ Menghentikan dan mulai menurunkan laju penyebaran malaria dan penyakit menular lainnya.
7. Menjamin Kelestarian Lingkungan Hidup.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Memadukan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam kebijakan program nasional, serta memulihkan kerusakan beragam sumber daya lingkungan. ➤ Mengurangi separuh proporsi penduduk yang tidak memiliki akses berkelanjutan pada air minum bersih dan sehat. ➤ Memperbaiki kehidupan setidaknya 100 juta penghuni kawasan kumuh pada tahun 2020.
8. Mengembangkan Kemitraan Global untuk Pembangunan.	➤ Mengembangkan lebih lanjut sistem perdagangan dan keuangan terbuka. Berdasarkan aturan jelas, mudah dipahami serta tidak diskriminatif, termasuk komitmen bagi tata pemerintahan, pembangunan, dan

	<p>penanggulangan kemiskinan yang baik nasional maupun internasional.</p> <p>➤ Menanggapi kebutuhan khusus negara-negara belum berkembang. Hal ini mencakup akses bebas tarif dan kuota bagi ekspor mereka. Meningkatkan penghapusan hutang-hutang bilateral resmi, dan bantuan pembangunan resmi yang lebih besar bagi negara-negara yang berkomitmen pada pengurangan kemiskinan.</p>
--	---

C. SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

Perkembangan terbentuknya SDGs di dunia internasional dimulai pada sidang umum PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa) ke-70 pada bulan September 2015 di New York, Amerika Serikat. Hal tersebut merupakan titik sejarah baru dalam proses pembangunan global. Perwakilan 193 kepala negara dan pemerintahan dunia hadir menyepakati agenda pembangunan yang baru tertuang dalam dokumen berjudul *Transforming World: The 2030 Agenda for Sustainable Development* dengan berisi 17 tujuan dan 169 sasaran berlaku sejak 2016 hingga 2030.

SDGs merupakan lanjutan kegiatan dari *Millenium Development Goals* yang sudah disepakati oleh para anggota PBB tahun 2000, tetapi antara keduanya memiliki sedikit perbedaan yang mendasar, baik dari segi substansi maupun penyusunannya. MDGs disepakati dengan berisi 8 Tujuan, 21 Sasaran, dan 60 indikator selama kurang lebih 15 tahun.

Pelaksanaan proses *Millenium Development Goals* sendiri memiliki berbagai kelemahan karena dalam penyusunan dan implementasinya eksklusif dan sangat birokratis tanpa melibatkan peran *stakeholder* non pemerintah, organisasi, akademisi, dan berbagai sektor swasta, serta kelompok lainnya.



Gambar 9.2

Tujuan Global Ekonomi Berkelanjutan

(Sumber: *United Cities and Local Governments, 2016*).

SDGs bersifat universal dan berbeda dengan pendahulunya. SDGs mengakomodasi masalah-masalah pembangunan secara lebih komprehensif, baik kuantitatif maupun kualitatif (dengan mengakomodir isu yang tidak ada di dalam MDGs). Pada SDGs ini, secara universal lebih memberikan peran dan tanggung jawab yang sama, sehingga tercipta keseimbangan antara negara maju, berkembang, dan kurang berkembang dalam berkontribusi secara penuh terhadap keberlanjutan pembangunan.

Prinsip-prinsip yang mendasar dalam SDGs untuk menyeimbangkan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan, yaitu:

1. Manusia.
2. Bumi.
3. Perdamaian.
4. Kemakmuran.
5. Kerja sama.

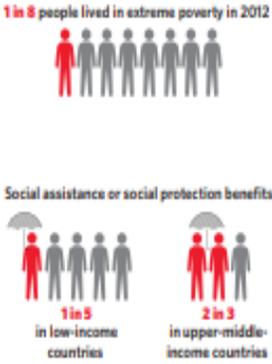
Lima prinsip ini menaungi 17 tujuan dan 169 sasaran yang tidak dapat dipisahkan, saling berhubungan, dan terintegrasi satu sama lain.

SDGs tidak dirumuskan untuk berdiri sendiri, tetapi terdapat kesepakatan-kesepakatan dalam menunjang agenda pembangunan berkelanjutan. Kepala negara dan pemerintahan menyepakati SDGs untuk meng-

hapuskan kemiskinan, kelaparan, memperbaiki kualitas kesehatan, meningkatkan pendidikan, dan mengurangi ketimpangan yang ada di masyarakat. Penjelasan bahwa setiap orang dari semua golongan akan ikut melaksanakan dan manfaat dalam SDGs.

Penyusunan indikator dilakukan masing-masing sesuai tujuan, dalam sidang umum PBB ke-70 menghasilkan *outcome* dokumen SDGs yang meliputi 17 tujuan dan 169 sasaran. Guna mengukur hasil pembangunan yang ada dalam SDGS, maka dilakukan proses tindak lanjut dan pelaporan berdasarkan pada rangkaian indikator. Indikator diukur baik level global, nasional, dan regional.

Tabel 9.2. Indikator SDGs (*Sustainable Development Goals*)

TUJUAN	KOMPONEN	TARGET PEMERINTAH DAERAH
 <p>1. Mengentaskan segala Bentuk Kemiskinan di mana pun.</p>	<p>Tujuan ini berbicara tentang meningkatkan pendapatan bagi penduduk miskin, menjamin akses terhadap pelayanan dasar dan melindungi seluruh masyarakat dari segala bentuk bencana.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pada 2030, mengentaskan kemiskinan ekstrim untuk seluruh masyarakat di dunia, yaitu masyarakat yang hidup di bawah \$1.25 per hari. ➤ Pada 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan, dan anak-anak segala usia yang hidup dalam segala dimensi kemiskinan, berdasarkan pengertian nasional. ➤ Pada 2030, menjamin bahwa seluruh laki-laki dan perempuan, terutama mereka yang miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber pendapatan, juga terhadap pelayanan dasar kepemilikan dan kontrol atas tanah serta bentuk kekayaan lainnya, seperti warisan,

		<p>sumber daya alam, teknologi baru yang layak, dan pelayanan finansial termasuk keuangan mikro.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pada 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan yang berada dalam situasi rentan, serta mengurangi keterpaparan dan kerentanan mereka terhadap kejadian-kejadian ekstrim terkait perubahan iklim maupun bencana dan tekanan ekonomi, sosial, serta lingkungan lainnya.
<p>2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan gizi, dan mendukung pertanian berkelanjutan.</p>	<p>Tujuan ini berbicara tentang menjamin bahwa semua orang dapat menikmati makanan yang aman dan bernutrisi sepanjang tahun.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Tahun 2030, mengakhiri kelaparan dan menjamin akses terhadap kualitas pangan yang baik bagi seluruh rakyat. Khususnya mereka yang miskin dan berada dalam situasi rentan sepanjang tahun. ➤ Menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen

		<p>makanan berskala mikro, khususnya perempuan, masyarakat adat, pertanian keluarga, peternak dan nelayan. Selain itu, sumber daya produksi lainnya, pengetahuan, layanan finansial, pasar dan kesempatan untuk memperoleh nilai tambah serta lapangan pekerjaan non-pertanian.</p> <p>➤ Mengakhiri segala bentuk malnutrisi, termasuk mencapai target-target yang telah disepakati secara internasional mengenai pertumbuhan balita serta menguraikan kebutuhan gizi untuk remaja putri, ibu hamil, dan menyusui, serta manula.</p>
--	--	--

 <p>MENJAMIN KEHIDUPAN SEHAT DAN MENDUKUNG KESEJAHTERAAN BAGI SEMUA DI SEGALA USIA</p>	<p>Tujuan ini berbicara tentang membantu masyarakat untuk hidup sehat dan panjang umur.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mengurangi rasio kematian ibu menjadi kurang dari 70 per 100.000 kelahiran. ➤ Mengakhiri kematian yang dapat dicegah pada bayi lahir dan balita. ➤ Mengurangi separuh angka kematian dan luka-luka akibat kecelakaan lalu lintas. ➤ Mengakhiri epidemik AIDS, tuberculosis, malaria, dan penyakit tropis lainnya. Melawan hepatitis, penyakit yang ditularkan lewat air dan penyakit menular lainnya. ➤ Mengurangi jumlah kematian dan penyakit aki-bat bahan kimia berbahaya serta pencemaran dan polusi udara, air, dan tanah. ➤ Akses universal terhadap layanan-layanan perawatan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk untuk keluarga berencana, informasi dan
<p>3. Menjamin Kehidupan Sehat dan Mendukung Kesejahteraan bagi Semua di Segala Usia.</p>		

		<p>pendidikan, serta integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.</p>
 <p>4. Menjamin dan Setara secara Kualitas dan Mendukung Kesempatan Belajar Seumur Hidup bagi Semua Pendidikan yang Inklusif.</p>	<p>Tujuan ini berbicara tentang meningkatkan pendapatan bagi penduduk miskin, menjamin akses terhadap pelayanan dasar dan melindungi seluruh masyarakat dari segala bentuk bencana.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Menjamin semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap pengembangan masa kanak-kanak awal yang berkualitas, pengasuhan dan pendidikan pra sekolah. ➤ Menjamin semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah gratis, setara dan berkualitas. ➤ Meningkatkan secara substansial jumlah remaja dan dewasa yang memiliki keahlian relevan, termasuk keahlian teknis dan kejuruan, untuk memperoleh pekerjaan yang layak serta dapat berwirausaha.

		<ul style="list-style-type: none">➤ Akses yang setara bagi semua perempuan dan laki-laki terhadap pendidikan tinggi, teknis dan kejuruan yang berkualitas dan terjangkau, termasuk universitas.➤ Menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan dan menjamin akses yang sama terhadap semua tingkatan pendidikan dan pelatihan kejuruan bagi mereka yang rentan, termasuk penyandang disabilitas, masyarakat adat, dan anak-anak yang berada dalam situasi rentan.➤ Memastikan bahwa semua pelajar memperoleh pengetahuan dan kemampuan yang dibutuhkan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, melalui pendidikan untuk
--	--	--

		<p>pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup berkelanjutan, hak asasi manusia, kesetaraan gender, mementingkan budaya perdamaian, dan anti kekerasan, kependudukan global serta apresiasi terhadap keragaman budaya dan kontribusi budaya.</p> <p>➤ Membangun dan meningkatkan mutu fasilitas pendidikan yang sensitif terhadap gender, anak, dan disabilitas serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, tanpa kekerasan, inklusif, dan efektif bagi semua.</p>
<p>5. Mencapai Kesetaraan Gender</p>  <p>Time spent each day on unpaid labour</p>  <p>Women in parliament: 23 per cent in 2016</p>	<p>Tujuan ini berbicara tentang mengakhiri kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan serta memastikan mereka memiliki kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan.</p>	<p>➤ Menghapuskan semua kebiasaan yang membahayakan seperti pernikahan dini, anak, dan paksa serta sunat pada perempuan.</p> <p>➤ Mengakhiri segala bentuk diskriminasi</p>

<p>dan Memberdayakan Semua Perempuan dan Anak Perempuan.</p>		<p>terhadap semua perempuan dan anak perempuan di manapun.</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan di ruang publik dan privat, termasuk perdagangan perempuan, pelecehan seksual dan bentuk eksploitasi lainnya.➤ Memastikan bahwa semua perempuan dapat berpartisipasi secara penuh dan memperoleh kesempatan yang sama untuk kepemimpinan pada tiap jenjang pengambilan keputusan dalam kehidupan umum, ekonomi, dan politik.➤ Mengangkat dan menguatkan kebijakan yang jelas serta penegakkan perundang-undangan untuk mendorong kesetaraan gender
--	--	--

		<p>dan pemberdayaan semua perempuan serta anak perempuan pada semua tingkat.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Melakukan perbaikan untuk memberikan perempuan hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi dan juga akses terhadap kepemilikan dan kontrol atas lahan serta bentuk-bentuk kekayaan lain, layanan finansial, warisan, dan sumber daya alam sesuai dengan hukum negara.
 <p>6. Menjamin Ketersediaan dan Manajemen Air dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua.</p>	<p>Memastikan semua orang memiliki akses terhadap air bersih dan sanitasi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Akses yang adil dan universal terhadap air minum yang aman dan terjangkau untuk semua. ➤ Meningkatkan kualitas air dengan mengurangi pencemaran, menghapuskan pembuangan limbah, dan meminimalisir pembuangan bahan kimia serta zat berbahaya, mengurangi

		<p>setengah proporsi air limbah yang tidak diolah dan meningkatkan praktik daur ulang juga penggunaan ulang yang aman dalam jumlah substansial secara global.</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Pengelolaan sumber daya air yang terintegrasi pada tiap tingkat, termasuk melalui kerja sama lintas batas bila diperlukan.➤ Penggunaan air yang efisien secara substansial di semua sektor dan menjamin penyediaan serta pengambilan air bersih yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan mengurangi jumlah orang yang mengalami kelangkaan air secara substansial.➤ Melindungi dan memulihkan ekosistem terkait air, termasuk pegunungan, hutan, rawa, sungai, daerah
--	--	---

		<p>resapan air serta danau.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat lokal dalam memperbaiki pengelolaan air dan sanitasi.
 <p>7. Menjamin Akses Terhadap Energi yang Terjangkau, dapat Diandalkan, Berkelanjutan dan Modern bagi Semua.</p>	<p>Memastikan semua orang memiliki akses terhadap energi terbarukan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Menjamin akses yang universal terhadap pelayanan energi yang terjangkau, dapat diandalkan, dan modern. ➤ Menggandakan laju peningkatan efisiensi energi dunia. ➤ Meningkatkan proporsi energi terbarukan dalam rasio penggunaan sumber energi dunia.
 <p>8. Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Penyerapan Tenaga</p>	<p>Menciptakan pekerjaan yang layak dan peluang ekonomi bagi semua.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kebijakan yang berorientasi pada pembangunan yang mendukung kegiatan-kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja yang layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, serta mendorong pembentukan dan pertumbuhan usaha

<p>Kerja Penuh dan Produktif serta Pekerjaan yang Layak bagi Semua.</p>		<p>mikro, kecil dan menengah, termasuk melalui akses terhadap layanan pendanaan/permodalan.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Mengurangi proporsi pemuda yang tidak bekerja, berpendidikan atau terlatih. ➤ Penyerapan ketenaga kerjaan yang produktif dan menyeluruh serta pekerjaan yang layak bagi seluruh perempuan dan laki-laki, termasuk pemuda dan penyandang disabilitas, serta kesetaraan upah untuk pekerjaan yang bernilai setara. ➤ Mengambil langkah-langkah untuk melarang dan menghilangkan penyerapan tenaga kerja anak-anak, mengentaskan kerja paksa. ➤ Menerapkan kebijakan yang mendukung pariwisata berkelanjutan yang mampu menciptakan
---	--	---

		<p>lapangan kerja, mendukung budaya dan produk lokal.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Melindungi hak-hak pekerja dan mendukung lingkungan kerja yang aman bagi seluruh pekerja, khususnya bagi perempuan, imigran, dan pekerja tidak tetap.
 <p>MEMBANGUN INFRASTRUKTUR BERKETAHANAN MENDUKUNG INDUSTRIALISASI YANG INKULSIF DAN BERKELANJUTAN SERTA MENDORONG INOVASI.</p> <p>9. Membangun Infrastruktur, Berketahanan Mendukung Industrialisasi yang Inkulsif dan Berkelanjutan serta Mendorong Inovasi.</p>	<p>Tujuan ini berbicara tentang memastikan keterpenuhan infrastruktur yang dibutuhkan oleh setiap orang agar dapat terhubung dengan seluruh dunia.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Membangun infrastruktur yang berkualitas, dapat diandalkan, berkelanjutan dan berketahanan, termasuk infrastruktur wilayah dan lintas batas, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan sama rata bagi semua. ➤ Meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi secara signifikan dan berupaya untuk menyediakan akses

		<p>internet yang terjangkau dan universal di negara-negara terbelakang pada 2020.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Meningkatkan akses industri rumah tangga dan usaha skala kecil lainnya terhadap layanan pendanaan seperti kredit yang terjangkau dan menggabungkan mereka ke dalam pasar dan rantai nilai.
 <p>10. Mengurangi Kesenjangan di dalam dan di antara Negara-negara.</p>	<p>Tujuan ini berbicara tentang mengurangi kesenjangan antara yang terkaya dan termiskin.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mencapai dan menjaga pertumbuhan pendapatan dari 40% populasi terbawah dengan tingkat di atas rata-rata nasional. ➤ Mengangkat kebijakan fiskal, upah, dan perlindungan sosial dan secara progresif mencapai kesetaraan. ➤ Memberdayakan dan mendorong penyertaan sosial, ekonomi, dan politik bagi semua, tanpa memandang latar

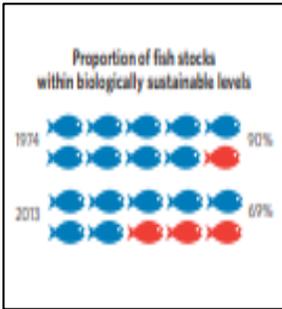
		<p>belakang sosial atau status lainnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Menjamin peluang yang sama dan mengurangi ketimpangan pendapatan, termasuk dengan menghilangkan peraturan, kebijakan, dan praktik yang mendiskriminasi serta mendorong adanya legislasi, kebijakan dan tindakan yang sesuai terkait hal tersebut. ➤ Memfasilitasi migrasi dan mobilitasi manusia yang tertib, aman, teratur, dan bertanggung jawab, termasuk melalui implementasi kebijakan migrasi yang terencana dan dikelola dengan baik.
 <p>MEWUJUDKAN KOTA-KOTA DAN PERMUKIMAN YANG INKLUSIF, AMAN, TANGGUH DAN BERKELANJUTAN.</p> <p>11. Mewujudkan Kota-kota dan</p>	<p>Memposisikan kota-kota pada inti pembangunan berkelanjutan di tengah pesatnya urbanisasi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan bagi semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, khususnya

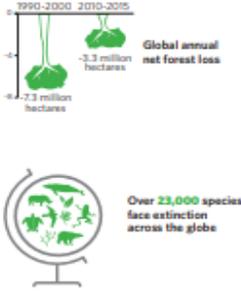
<p>Permukiman yang Inklusif, Aman, Tangguh, dan Berkelanjutan.</p>		<p>dengan memperbanyak transportasi umum, dengan memberikan perhatian khusus terhadap kebutuhan masyarakat yang rentan, perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, dan manula.</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Menjamin akses terhadap perumahan dan pelayanan dasar yang layak, aman dan terjangkau bagi semua serta meningkatkan kondisi permukiman kumuh.➤ Memperkuat upaya untuk melindungi dan menjaga warisan alam serta budaya dunia.➤ Mengurangi jumlah kematian, korban, dan pengurangan kerugian ekonomi relatif terhadap PDB yang diakibatkan oleh bencana, termasuk bencana terkait air, dengan fokus kepada melindungi masyarakat miskin
--	--	--

		<p>dan yang berada dalam situasi rentan.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Menyediakan akses universal terhadap ruang terbuka hijau dan publik yang aman, inklusif dan mudah diakses, khususnya bagi perempuan dan anak-anak, manula, serta penyandang disabilitas. ➤ Mengurangi dampak lingkungan per kapita di perkotaan, termasuk dengan memberikan perhatian khusus kepada kualitas udara dan pengelolaan limbah.
 <p>12. Menjamin Pola Konsumsi dan Produksi yang Berkelanjutan.</p>	<p>Mengurangi dampak lingkungan yang ditimbulkan terhadap bumi melalui pola produksi dan konsumsi yang sewajarnya.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pengelolaan sumber daya alam yang efisien dan berkelanjutan. ➤ Manajemen limbah dan bahan kimia yang ramah lingkungan sesuai dengan kerangka internasional yang berlaku, serta mengurangi pencemarannya terhadap tanah, air, dan udara untuk meminimalisir

		<p>dampak buruk terhadap kesehatan manusia juga lingkungan.</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Mengurangi jumlah limbah yang dihasilkan melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali sampah.➤ Mengurangi se-paruh dari jumlah sampah pangan global per kapita pada tingkat retail dan konsumen, serta mengurangi kerugian makanan sepanjang rantai produksi dan suplai.➤ Memastikan bahwa semua orang memiliki informasi terkait dan kesadaran akan pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup berwawasan lingkungan.➤ Mendorong proses pengadaan barang dan jasa publik yang berkelanjutan, sesuai dengan prioritas dan kebijakan nasional.
--	--	---

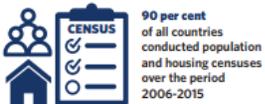
		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mendorong proses pengadaan barang dan jasa publik yang berkelanjutan, sesuai dengan prioritas dan kebijakan nasional. ➤ Mengembangkan dan mengimplementasikan berbagai cara untuk memantau dampak pembangunan berkelanjutan terhadap pariwisata berkelanjutan yang dapat menciptakan lapangan kerja dan mendukung budaya dan produk lokal.
<p>2015 Paris Climate Agreement</p>   <p>An average of 83,000 people died and 211 million were affected each year by natural disasters from 2000 to 2013</p> <p>13. Mengambil Tindakan untuk Melawan Perubahan Iklim dan Dampaknya.</p>	<p>Tujuan ini berhubungan dengan cara menghadapi dampak dari pemanasan global.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Meningkatkan daya tahan dan kapasitas untuk beradaptasi dari bahaya-bahaya terkait perubahan iklim dan bencana alam di semua negara. ➤ Meningkatkan kapasitas demi perencanaan dan manajemen perubahan iklim yang efektif di negara-negara terbelakang, termasuk berfokus pada perempuan, remaja, dan

		<p>masyarakat lokal serta yang termarginalisasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Memperbaiki pendidikan, peningkatan kesadaran, dan kapasitas sumber daya manusia serta lembaga dalam mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini perubahan iklim.
 <p>14. Mengkonservasi dan Memanfaatkan Secara Berkelanjutan Sumber Daya Maritim, Laut, dan Samudera untuk Pembangunan yang Berkelanjutan.</p>	<p>Tujuan ini berhubungan dengan melindungi pantai dan lautan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mengkonservasi setidaknya 10% dari kawasan laut dan pesisir, sesuai dengan hukum nasional dan internasional berdasarkan informasi ilmiah terbaru. ➤ Mencegah dan mengurangi segala jenis pencemaran laut, khususnya yang berasal dari kegiatan di daratan, termasuk puing-puing di lautan dan pencemaran bahan makanan. ➤ Menyediakan akses terhadap pasar dan sumber daya kelautan bagi

		<p>nelayan-nelayan kecil.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak signifikan, termasuk dengan melakukan pemulihan dan meningkatkan ketahanannya demi mencapai lautan yang baik dan produktif.
 <p>15. Melindungi, Memulihkan, dan Mendukung Penggunaan yang Berkelanjutan terhadap Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan Secara Berkelanjutan, Melawan Penggurunan, serta Menghentikan dan Membalikkan Degradasi Tanah dan</p>	<p>Tujuan ini berhubungan dengan melindungi sumber daya alam dan margasatwa.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mengerahkan sumber daya dari segala sumber pada tiap tingkat untuk membiayai pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan menyediakan insentif sesuai bagi negara berkembang terkait hal tersebut, termasuk untuk konservasi dan reboisasi hutan. ➤ Memadukan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan daerah dan nasional, proses pembangunan serta

<p>Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati.</p>		<p>strategi pengentasan kemiskinan.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Menjamin konservasi, pemulihan, dan penggunaan ekosistem air tawar dan daratan, khususnya hutan, rawa-rawa, pegunungan, dan lahan kering, sesuai dengan kewajiban yang dimiliki berdasarkan kesepakatan internasional. ➤ Mengambil tindakan untuk mengurangi degradasi habitat alamiah, menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati serta melindungi dan mencegah kepunahan spesies terancam atau langka pada tahun 2020. ➤ Menjamin konservasi, pemulihan, dan penggunaan ekosistem air tawar dan daratan, khususnya hutan,
---	--	---

		<p>rawa-rawa, pegunungan, dan lahan kering sesuai dengan kewajiban yang dimiliki berdasarkan perjanjian internasional.</p>
 <p>13% 2004 34% 2011 Proportion of child victims of human trafficking worldwide</p>  <p>1 in 2 children have not been registered by their fifth birthdays in LDCs</p> <p>16. Memperjuangkan Masyarakat yang Damai dan Inklusi, Menyediakan Akses Terhadap Keadilan bagi Semua dan Membangun Institusi-institusi yang Efektif, Bertanggung jawab, dan Inklusif pada Semua Tingkat.</p>	<p>Tujuan ini berbicara tentang menjaga keamanan masyarakat dan memastikan bahwa pemerintah bekerja secara adil dan efektif.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mengurangi segala bentuk korupsi dan penyuapan secara substansial. ➤ Mengembangkan lembaga-lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat. ➤ Mengurangi segala bentuk kekerasan dan tingkat kematian akibat kekerasan di mana pun, secara signifikan. ➤ Menjamin akses masyarakat terhadap informasi dan melindungi hak kebebasan, sesuai dengan perundang-undangan nasional dan perjanjian internasional yang berlaku. ➤ Menjamin pengambilan keputusan yang representatif,

		<p>partisipatif, inklusif, dan responsif di semua tingkat.</p>
  <p>17. Memperkuat Perangkat Implementasi dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan yang Berkelanjutan.</p>	<p>Tujuan ini berbicara tentang bekerja sama pada tingkat global untuk mencapai SDGs dan mewujudkan agenda pasca 2015 yang telah disetujui.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Memperkuat pergerakan sumber daya dalam negeri, termasuk melalui bantuan luar negeri untuk negara-negara berkembang dalam meningkatkan kapasitas negara terkait pengumpulan pajak dan sumber pendapatan lainnya. ➤ Mendorong dan mendukung kerja sama efektif antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, yang dipupuk dari pengalaman dan strategi dalam bekerja sama. ➤ Meningkatkan koherensi kebijakan terkait pembangunan berkelanjutan. ➤ Meningkatkan kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan yang dilengkapi dengan kerja sama <i>multi-stakeholder</i> yang dapat menggerakkan dan membagi

		<p>pengetahuan, keahlian, teknologi, dan sumber daya finansial untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di semua negara, khususnya negara berkembang.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Mengembangkan gagasan awal terkait penyusunan indikator untuk mengukur kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi pdb dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara-negara berkembang. ➤ Pada 2030, mengembangkan gagasan awal terkait penyusunan indikator untuk mengukur kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi PDB dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara-negara berkembang.
--	--	--

BAHAN DISKUSI

1. Jelaskan menurut pendapat Anda, apa yang dimaksud dengan pembangunan berkelanjutan? Apa keunggulan dan kelemahan dari teori tersebut?
2. Berikan contoh studi kasus dari penerapan 8 indikator ukuran dalam *Millenium Development Goals*?
3. Pada penerapan *Millenium Development Goals* di dunia terdapat kelemahan-kelemahan, sebutkan dan berikan contoh apa saja kelemahan tersebut!
4. Berdasarkan 17 indikator yang tertuang dalam *Sustainable Development Goals*, maka berikan contoh minimal 8 dan studi kasus dalam penelitiannya! Bagaimana penerapan dan realisasinya?
5. Berikan contoh studi kasus dari peranan indikator pendidikan pada masa MDGs dan SDGs di Indonesia! Adakah peranan pendidikan yang bergeser dari kedua penerapan masa tersebut? Lebih efektif MDGs atau SDGs dalam indikator pendidikan di Indonesia?

BIOGRAFI PENULIS



Lestari Sukarniati S.E., M.Si adalah dosen tetap di Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ahmad Dahlan dengan bidang konsentrasi Ekonomi Pembangunan dan Ekonomi Sumber Daya Manusia. Menempuh pendidikan SI di Fakultas Ekonomi UKSW dan S2 di MSP di universitas yang sama. Sejak masih kuliah S1 sangat menaruh minat pada masalah-masalah pembangunan ekonomi pedesaan. Kegemarannya pada masalah pembangunan ekonomi pedesaan mengantarkannya menjadi ketua pengelola Jurnal OPTIMUM sejak tahun 2010 yang pada awal berdirinya berkonsentrasi pada publikasi artikel-artikel dengan topik pembangunan ekonomi. Selain buku tentang ekonomi pembangunan ini, buku lain yang pernah disusun berjudul Ekonomi Sumber Daya manusia yang terbit tahun 2019.



Firsty Ramadhona Amalia Lubis S.E., M.Ec.Dev adalah alumni dari Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan FEB Universitas Lampung (UNILA) dan Magister Ekonomi Pembangunan di Universitas Gadjah Mada (UGM). Saat ini berstatus sebagai dosen tetap di Prodi Ekonomi Pembangunan Universitas Ahmad Dahlan (UAD) dengan bidang konsentrasi Ekonomi Perencanaan.



Nurul Azizah Az zakiyyah, S.E., M.Sc adalah alumni dari Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan FEB Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED) dan Magister Sains Ilmu Ekonomi di Universitas Gadjah Mada (UGM). Saat ini berstatus sebagai dosen tetap di Prodi Ekonomi Pembangunan Universitas Ahmad Dahlan (UAD) dengan bidang konsentrasi Ekonomi Publik dan Ekonomi Internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Abe, Alexander. 1994. *Perencanaan Daerah Partisipatif*. Yogyakarta: Pusat Jogja Mandiri.
- Ackerman, Susan Rose, 1999, *Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform*. New York: Cambridge University Press.
- AL. Angela. 2017. "Analisis Indeks Kebahagiaan di Indonesia". *Jurnal Universitas Tanjungpura*.
- Alvin Y. So, Suwarsono. 1990. *Perubahan Sosial dan Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Arsyad, Lincoln. 1999. *Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Yogyakarta: BPFE.
- , 1999. *Ekonomi Pembangunan*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.
- , (et.al). 1986. "Agribusiness in Indonesia: Fact, Problem, and Prospect", *Business News*. March 10.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). 2014. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019*. Jakarta: Bappenas.
- , 2019. *Evaluasi paruh waktu RPJMN 2015-2019*. Jakarta: Bappenas.
- , 2019. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2015*. Jakarta: Bappenas.
- , 2001. *PROPENAS 2000-2004: Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000, tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004*. Jakarta: PT Sinar Grafika.
- Badan Pusat Statistik. (2015). "Potret Awal Pembangunan Pasca MDGs", *Sustainable Development Goals (SDGs)*. (I. Said, Ali: Budiati, Ed.). Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Brakley, Edward J. 1994. *Planning Local Economic Development: Theory and Practice. Second Edition*. California: Sage Publication.

- Devas, Nick. 1989. *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia* (Terjemahan dalam Bahasa Indonesia). Jakarta: Universitas Indonesia Pres.
- Dos Santos, Theotonio, 1970. "The Structure of Dependence". *American Economic Review, American Economic Association*, vol. 60(2), pages 231-236.
- Dreher, A. and Herzfeld, T. (2005), "The Economic Costs of Corruption: A Survey and New Evidence". *Working Paper 0506001, Public Economics, Econ WP*.
- Ellis. 1998. "Household strategies and rural livelihood diversification". *Journal of Development Studies* 35(1): 1-38.
- B. F. Pasaribu, Rownlad. (2012). *Literatur Pengajaran Ekonomi Pembangunan*. Depok: Universitas Gunadarma.
- Sumodiningrat, Gunawan. 1999. *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaringan Pengaman Sosial*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Hudiyanto. (2014). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Cetakan Lingkar Media.
- Isard, Walter. 1960. *Method of Regional Analysis: An Introduction to Regional Science*. New York: The MIT and John Wiley & Son Inc..
- Departemen Dalam Negeri. 2007. *Keputusan Menteri Dalam Negeri No 050-188/Kep/Bangdal/2007 Tentang Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Departemen Dalam Negeri.
- Kesa, D. D., & Lee, C. (2013). "Kebijakan Sektor Pertanian sebagai Awal Kebangkitan Ekonomi (Studi Kasus Taiwan Dalam Mengelola Komoditas Padi)". *Jurnal Vokasi Indonesia*, 1(1).
- Kuncoro, Mudrajad. 1997. *Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah dan Kebijakan*. Cetakan pertama. Yogyakarta: Unit penerbitan dan percetakan akademi manajemen perusahaan YKPN.
- Lewis D. Blane. 2001. "The New Indonesian Equalization Transfer". *BIES*. Vol 37, No 3, p 325-345.
- Lewis, Arthur. 1966. *Development Planning*. Harper and Row. New York.

- Malthus. 1798. *An essay on the principle of population*. London: electronic scholarly publishing project.
- Mauro, P. 1995. "Corruption and Growth". *Quarterly Journal of Economics*.
- Nurkse, Ragnar. 1953. *Problems of Capital Formation in Underdeveloped Countries*. New York: Oxford University Press.
- Panuluh, Sekar & Fitri. 2016. "Perkembangan Pelaksanaan Sustainable Development Goals di Indonesia". *International NGO Forum on Indonesian Development*.
- Pearson, S., C. Gotsh and S. Bahri. 2004. *Application of Policy Analysis Matrix in Indonesian Agriculture*. Jakarta: DAI-FSPA-Yayasan Obor.
- Purwandari, Heru. 2011. "Sistem ekonomi perkebunan: Persistensi ketergantungan negara dunia ketiga". *AGRISEP* Vol. 10 No. 1 Maret 2011 Hal: 63-79.
- Ragasa, C., S.C. Babu and J. Ulimwengu. 2011. *Institutional and Capacity Challenges in Agricultural Policy Process*. Melbourne: IFPRI.
- Rahayu, Theresia Puji. 2016. "Determinan Kebahagiaan di Indonesia". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* Volume 19 No 1, April 2016. Jakarta: Unika Atma Jaya.
- Samuelson, Paul A. & Nordhaus. 1994. *Economics. Fifteen Edition*. Pennsylvania: McGraw-Hill.
- Sjafrizal. 2016. *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*. Cetakan ke 3. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Soelistyo (dkk). 1979. "Prospek Kesempatan Kerja dan Pemerataan Pendapatan dalam Repelita III". *Prisma*.
- Steeten, Paul A. 1972. *The Frontiers of Development Studies*. New York: John Wiley & Sons.
- Stiglitz, Joseph E. 2010. "Risk and Global Economic Architecture: Why Full Financial Integration May Be Undesirable". *American Economic Review*, 100 (2): 388-92.
- Sukirno, Sadono. 1981. *Ekonomi Pembangunan*. Cetakan II. Medan: Borta Gorat.

- Suparmoko. 1990. *Pengantar Ekonomi Mikro*. Yogyakarta: BPFE.
- Suyanto, M. 2007. *Marketing Strategy Top Brand Indonesia*. Yogyakarta: Andi Offset.
- United Nation. 2016. *The Sustainable Development Goals Report*. 2016. New York: United Nation.
- Tikson, T. Deddy. 2005. *Administrasi Pembangunan*. Makassar: Gemilang Persada.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. (1995). *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Pustaka. LP3ES.
- Todaro, Michael P. 1983. *Development Planning*. Oxford University Press.
- Todaro, Michael P. 2013. *Economic Development in the Third World*. Seven Edition. London: Longman.
- Transparency International. *Global Corruption Report 2009: Corruption and The Private Sector*. Diakses pada 20 Oktober 2020. <http://www.transparency.org>.
- Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang Perlu Diketahui Oleh Pemerintah Daerah. 2015. *United Cities and Local Government*.
- Undang- Undang Nomor 26/2007. Tentang Lingkungan Hidup. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 25/2004. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Jakarta.
- Van Tongeren, F. 2008. "Agricultural Policy Design and Implementation: A Synthesis". *OECD Food, Agriculture and Fisheries Working Paper No. 7*. Paris: OECD Publishing.
- Word Bank. 2003. "Decentralizing Indonesia. Regional Public Expenditure Review". *Report No 26191-IND*. Washington DC.
- , 1992a. *Governance and Development*. Washington, DC: World Bank
- , 2020. *World Development Report*.

Ekonomi Pembangunan

Teori dan Praktik di Negara Berkembang

Ada perbedaan pengertian pertumbuhan dan pembangunan. Pertumbuhan lebih menggambarkan perkembangan yang bersifat ekonomis, sedangkan pembangunan memiliki dimensi yang lebih luas dari sekedar perkembangan ekonomi. Dalam mengejar ketertinggalan, masing-masing negara berkembang melakukan proses pembangunan dengan pendekatan yang berbeda-beda. Ada berbagai pilihan teori yang dapat dipakai untuk melaksanakan pembangunan yang diinginkan.

Untuk keperluan mahasiswa dan peminat masalah pembangunan, buku ini menyajikan tentang praktik pelaksanaan pembangunan di beberapa negara (termasuk Indonesia), manfaat bahkan kerugian dari pelaksanaan pembangunan, paradigma pembangunan ekonomi, dan hambatan pembangunan, selain juga dilengkapi dengan berbagai teori pembangunan dari Aliran Historis, Aliran Klasik sampai Teori Pertumbuhan Endogen.

Berkaitan dengan kesepakatan bersama negara-negara anggota PBB tentang pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan, buku ini juga menyajikan tentang *Sustainable Development Goals*. Secara umum, buku ini membahas pembangunan yang dilaksanakan terutama oleh negara berkembang untuk mencapai tingkat kemakmuran.

UAD
PRESS

UAD PRESS

(Anggota IKAPI dan APPTI)

Kampus II Universitas Ahmad Dahlan

Jl. Pramuka No. 42, Pandeyan, Kec. Umbulharjo,

Daerah Istimewa Yogyakarta, 55161.

E-mail: uadpress@uad.ac.id

HP/WA: 088239499820

ISBN 978-623-6071-76-2 (PDF)

